

Editor : I Made Alit Dwitama

METAMORFOSIS

Pengembangan Sekolah Model di Bali

(Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Internal
dan Implementasi Kurikulum 2013)

Oleh

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.
Ni Nengah Nuadi, S.Pd., M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2018

**METAMORFOSIS
PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL DI BALI
(PRAKTIK BAIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013)**

Penulis:

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.

Ni Nengah Nuadi, S.Pd., M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama

ISBN: 978-602-70237-9-6

Desain Sampul:

Heru Susanto

Tata Letak:

Agus Ryan

Penerbit:

LPMP Bali

Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Denpasar 80234

Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682

e-mail: lpmpbali@yahoo.com, website: www.lpmpbali.or.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk

dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Nya buku yang sederhana ini bisa terwujud sebagai produk akhir pengembangan sekolah model di Provinsi Bali. Diketahui bahwa setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik disegala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dinamakan sistem penjaminan mutu internal.

SPMI yang dilaksanakan ditingkat satuan pendidikan memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1) memetakan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional, (2) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah; (3) melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; (4) melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Proses

ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya terpenuhinya standar nasional pendidikan dan tumbuh budaya mutu pendidikan.

Semua proses penjaminan mutu pendidikan dipaparkan dalam buku ini yang merupakan hasil kegiatan praktek implementasi SPMI, implementasi kurikulum 2013, akreditasi dan capaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK yang terinventarisasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah model tahun 2017 di Bali. Selain itu, buku ini juga memaparkan tentang model-model pembelajaran serta kemampuan berpikir tingkat tinggi yang merupakan penekanan-penekanan implementasi kurikulum 2013. Dengan demikian buku ini pada intinya mencoba memaparkan metamorfosis pengembangan sekolah model yang dipraktekkan di sekolah sebagai suatu program dalam bentuk implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan implementasi kurikulum 2013. Kajian ini adalah langkah yang sangat penting untuk membantu mempercepat terwujudnya pendidikan bermutu di Bali. Smoga bermanfaat.

Denpasar, Maret 2018
Kepala LPMP Bali

I Made Alit Dwitama, S.T.,M.Pd.

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia Nya buku yang berjudul "Metamorfosis Pengembangan Sekolah Model di Bali (Praktik Baik Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Implementasi Kurikulum 2013)" dapat diselesaikan sesuai rencana. Buku ini secara umum menguraikan tentang perubahan-perubahan sekolah model dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal dan implementasi kurikulum 2013. Berkat kerja keras dan bantuan beberapa pihak sehingga karya yang sederhana ini dapat terwujud. Untuk itu, ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd., selaku Kepala LPMP Bali yang telah memberikan dorongan dan fasilitasi dalam penyusunan buku ini.
2. Ibu Dra. Gusti Ayu Sriati, M.Pd. Selaku Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan LPMP Bali yang sekaligus sebagai penanggung jawab program yang begitu antusias dalam memberikan motivasi dan fasilitasi.
3. Bapak Rony Kasidi, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Umum LPMP Bali yang telah memberikan dukungan anggaran dalam mewujudkan buku ini.
4. Ibu Ni Nyoman Yumiati, M.Pd. Selaku Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidikan LPMP Bali, yang turut memberikan pemikiran-pemikiran sehingga buku ini menjadi lebih sempurna.
5. Bapak I Gede Mastika, S.T., MAP, Selaku Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Bali, yang turut memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran demi sempurnanya buku ini
6. Rekan-rekan teman sejawat Widyaiswara LPMP Bali yang turut memberikan sumbang saran dan perbaikan buku ini

Semoga Bapak/Ibu yang telah memberikan pemikiran, motivasi dan keperluan logistic buku ini diberikan kesehatan dan kemakmuran. Kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan buku. Semoga buku yang sederhana ini dapat dijadikan bahan kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan sekolah model di tahun berikutnya.

Denpasar, Maret 2018
Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
Perkembangan Pendidikan di Indonesia	2
Usaha Perbaikan Mutu Pendidikan	5
BAB II	
MODEL PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 2013	9
Pengertian Model Pembelajaran	10
Model Pembelajaran Resik	13
Pendekatan Saintifik	29
Pembelajaran Berbasis Masalah (<i>Problem Based Learning</i>)	32
Pembelajaran <i>Creative Problem Solving</i>	33
Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Project-based Learning</i>)	40
Pembelajaran <i>Inquiry/Discovery</i>	41
Pendekatan "ICARE"	43
Model Pembelajaran "SAVI"	45
Model Resolusi Konflik (MPK)	48
BAB III	
HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013	55
Pengertian <i>HOTS</i>	57
Peran Soal <i>HOTS</i> Dalam Ujian Sekolah (US)	66
BAB IV	
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	69
Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan	70
Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan	75
Membangun Budaya Mutu Pendidikan	79
Penjaminan Mutu Melalui Sekolah Model	81
BAB V	
CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN BERDASARKAN DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	93
Mutu Pendidikan	94
Indikator Mutu Pendidikan	96
Sumber Data Peta Capaian SNP	111
BAB VI	
MONITORING DAN EVALUASI SEKOLAH MODEL	113
BAB VII	
METAMORFOSIS PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL	117
Praktek SPMI Bagi Sekolah Model	118
Proses Pendampingan	121
Dampak Pendampingan	122
Implementasi SPMI di Sekolah	122
Hasil Implementasi SPMI di Sekolah	123
Implementasi Kurikulum 2013 bagi Sekolah Model	128
Capaian Mutu Pendidikan Sekolah Model	135
BAB VIII	
PENUTUP	149
DAFTAR PUSTAKA	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pendekatan dalam Pembelajaran Matematika.....	15
Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran RESIK	21
Tabel 2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah	32
Tabel 2.4 Sintaks Pembelajaran <i>Creative Problem Solving</i>	39
Tabel 2.5 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek	41
Tabel 2.6 Langkah-Langkah Pembelajaran <i>Inquiry/Discovery Learning</i>	42
Tabel 2.7 Langkah-langkah Pembelajaran Menggunakan Model "SAVI"	47
Tabel 3.1 Perbandingan Asesmen Tradisional dan Kontekstual	60
Tabel 3.2 Dimensi Proses Berpikir	63
Tabel 4.1 Kriteria Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas	86
Tabel 4.2 Kriteria Calon Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya	87
Tabel 5.1 Ruang Lingkup Instrumen PMP Tahun 2017.....	100
Tabel 6.1 Rincian Responden Monitoring dan Evaluasi.....	114
Tabel 7.1 Efektivitas Program SPMI di Provinsi Bali Secara Keseluruhan	118
Tabel 7.2 Efektivitas Program SPMI untuk Masing-masing Dimensi/Aspek.....	120
Tabel 7.3 Efektivitas Program SPMI Sekolah Model Secara Kesekuruhan.....	124
Tabel 7.4 Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 untuk Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2017.....	130
Tabel 7.5 Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Model Secara Kesekuruhan.....	131
Tabel 7.6 Hasil Akreditasi Sekolah Model.....	136
Tabel 7.7 Capaian Akreditasi Masing-masing Sekolah Model.....	136
Tabel 7.8 Skor Capaian SNP Sekolah Model Tahun 2017	141
Tabel 7.9 Rekapitulasi Capaian SNP Sekolah Model Tahun 2017	141
Tabel 7.10 Capaian Mutu SNP masing-masing Sekolah Model.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pembelajaran dengan Menggunakan Model RESIK.....	23
Gambar 4.1	Indikator Sukses Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.....	70
Gambar 4.2	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Terintegrasi (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)	76
Gambar 4.3	Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Siklus Perbaikan Mutu Berkelanjutan	77
Gambar 4.4	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	77
Gambar 4.5	Sistem Pembelajaran dalam Konteks Penjaminan Mutu Pendidikan.....	78
Gambar 4.6	Pengelolaan Sekolah dalam Konteks Penjaminan Mutu Pendidikan.....	78
Gambar 4.7	Fungsi SPMI dalam Konteks Pengelolaan Sekolah.....	79
Gambar 4.8	Prosedur Pengembangan Sekolah Model.....	83
Gambar 4.9	Prosedur Pengimbasan oleh Sekolah Model	83
Gambar 4.10	Pengimbasan Sekolah Model.....	90
Gambar 5.1	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	97
Gambar 5.2	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP.....	98
Gambar 6.1	Klasifikasi Efektivitas Pelaksanaan Program	116
Gambar 7.1	Grafik Efektivitas Program SPMI Masing-Masing Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2017.....	119
Gambar 7.2	Grafik Efektivitas Program SPMI Masing-masing Dimensi di Provinsi Bali Tahun 2017.....	119
Gambar 7.3	Grafik Efektivitas Program SPMI untuk Masing-masing Dimensi pada Masing-masing Kabupaten/Kota	120
Gambar 7.4	Proses Pendampingan Program SPMI.....	121
Gambar 7.5	Dampak Pendampingan Program SPMI	122
Gambar 7.6	Implementasi SPMI pada Satuan Pendidikan.....	123
Gambar 7.7	Hasil Implementasi SPMI pada Satuan Pendidikan.....	124
Gambar 7.8	Gambaran Umum Implementasi Kurikulum 2013 dilihat dari Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran.....	128
Gambar 7.9	Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013 Semua Jenjang di Provinsi Bali Tahun 2017.....	129
Gambar 7.10	Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	130
Grafik 7.11	Persentase Akreditasi Sekolah Model.....	136
Grafik 7.12	Persentase Capaian Mutu Sekolah Model	142

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Dalam skala makro setidaknya-tidaknya dunia abad ke-21 (sering disebut *knowledge society* zaman *now*) ditandai oleh enam kecenderungan penting, yaitu: (1) berlangsungnya revolusi digital yang semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan, (2) terjadinya integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, hubungan-hubungan multilateral, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, (3) berlangsungnya pendataran dunia (*the world is flat*) sebagai akibat berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan manusia terutama akibat mengglobalnya negara, korporasi, dan individu, (4) sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari tunggang langgang, ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan keusangan segala sesuatu cepat terjadi, (5) semakin tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan (6), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*) yang membuat pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal sangat penting, dan (6) makin tegasnya fenomena abad kreatif beserta masyarakat kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Keenam hal tersebut telah memunculkan tatanan baru, ukuran-ukuran baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus ditanggapi dan dipenuhi oleh dunia pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya (Kemdikbud, 2016: 1).

Dalam skala mikro pendidikan, zaman *now* ditandai oleh adanya imperatif-imperatif global pendidikan, di antaranya pendidikan untuk semua (PUS), pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (ESD), tujuan pembangunan milenium (*MDG's*), dan literasi dunia bagi pemberdayaan. Selain itu, juga ditandai oleh munculnya temuan-temuan dan pemikiran-pemikiran baru yang berkenaan dengan dimensi tertentu pendidikan, di antaranya temuan neurosains pendidikan dan pembelajaran (misalnya hubungan otak dan belajar), munculnya pelbagai teori kecerdasan, tumbuhnya pemikiran baru pembelajaran (misalnya *blended learning*, *mindful learning*), dan kebijakan baru bidang pendidikan dan pembelajaran. Lebih

jauh, juga muncul pergeseran peranan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat, tugas pranata dan lembaga pendidikan, dan bentuk organisasional pendidikan serta keberadaan modal manusia dalam pendidikan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru dalam sendi-sendi pendidikan termasuk sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia.

Sementara itu, dalam skala regional dan nasional Indonesia, zaman *now* ditandai oleh berbagai perubahan mendasar yang paradigmatis. Selain Reformasi pada penghujung abad ke-20, Indonesia memasuki abad ke-21 dengan sistem kenegaraan, pemerintahan, bahkan kemasyarakatan dan kebudayaan yang baru, misalnya orientasi baru pembangunan, desentralisasi, otonomi daerah, dan demokrasi serta bonus demografi. Di samping itu, memasuki abad ke-21 Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif. Bagi Indonesia, bahkan tahun 2015 menjadi garis batas agenda berbagai kesepakatan dan kebijakan global dan nasional Indonesia di berbagai bidang baik bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Berkenaan dengan bidang pendidikan, sebagai contoh, tahun 2015 merupakan tahun terakhir agenda kebijakan pendidikan untuk semua (*education for all*), tujuan pembangunan milenium (*milenium development goals*), dan agenda pendidikan nasional. Oleh karena itu, tahun 2015 menjadi tonggak penting urusan pemerintahan dan kemasyarakatan Indonesia, salah satunya urusan pendidikan nasional Indonesia.

Sehubungan dengan itu, sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia perlu ditata kembali atau ditransformasikan sedemikian rupa supaya pendidikan nasional Indonesia semakin sanggup memberi kontribusi berarti bagi kiprah dan kemajuan Indonesia dalam abad ke-21 yang sudah mengalami perubahan mendasar yang paradigmatis sebagaimana telah disinggung di atas. Di samping itu, penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia itu dihajatkan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas berbagai tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru sebagai konsekuensi berbagai keadaan yang sudah dipaparkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia merupakan tugas sejarah (imperatif) yang harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Dikatakan demikian karena tiga alasan. Pertama, bangsa-bangsa di dunia yang sekarang mengalami kemajuan sangat berarti, misalnya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Finlandia, telah ditopang atau disangga oleh pendidikan yang baik, bermutu, dan maju. Dalam berbagai pemeringkatan pendidikan di aras global, misalnya *Learning Curve*, TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan PISA (*Programme for International Student Assessment*), negara-negara tersebut selalu menduduki peringkat atas. Kedua, pelbagai studi internasional dan nasional tentang pendidikan Indonesia memberikan justifikasi betapa mendesaknya transformasi pendidikan nasional Indonesia sekarang. Laporan-laporan Bank Dunia, UNDP, dan UNESCO tentang pendidikan

Indonesia merekomendasikan transformasi secara terarah pendidikan nasional Indonesia supaya Indonesia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, terhindar dari jebakan-jebakan yang membawa aneka kemerosotan pada satu sisi dan pada sisi lain mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Ketiga, berbagai fakta dan bukti kinerja pendidikan nasional yang telah dipublikasikan oleh berbagai pihak mengamanatkan betapa mendesaknya penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia secara komprehensif dan sistemis.

Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi. Dengan karakter yang kuat, tanggung jawab yang tinggi beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru yang disebut di atas dapat dipenuhi atau diatasi. Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik. Hal ini telah ditandaskan oleh berbagai pemikiran tentang pendidikan dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Sebagai contoh, beberapa puluh tahun lalu Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia, telah menandakan secara eksplisit bahwa “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita” (Karya Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan). Demikian juga laporan Delors untuk pendidikan abad XXI, sebagaimana tercantum dalam buku Pembelajaran: Harta Karun di Dalamnya, menegaskan bahwa pendidikan abad XXI bersandar pada lima tiang pembelajaran sejagat (*five pillar of learning*), yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be* serta *learning to transform for oneself and society*.

Dalam pada itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terpapar secara tersurat berbagai kompetensi yang bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Hal tersebut menandakan bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.



Usaha Perbaikan Mutu Pendidikan

Selama beberapa dekade belakangan ini telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum terus dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan tuntutan kemajuan zaman. Pembinaan guru juga terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraannya. Berbagai intervensi terus dilakukan untuk meningkatkan layanan sekolah kepada siswa dan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana juga terus dilakukan. Pembangunan ruang kelas baru, renovasi sekolah, revitalisasi sekolah, pengadaan sarana laboratorium, pengadaan sarana TIK dan sarana lain untuk meningkatkan layanan pembelajaran telah dan akan banyak dilakukan. Tak kalah pentingnya, berbagai peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan berbagai aturan lain tentang pengelolaan sekolah dan peningkatan proses pembelajaran juga telah banyak dihasilkan.

Namun semua intervensi yang pernah dilakukan tersebut lebih banyak berpengaruh terhadap peningkatan akses terhadap layanan pendidikan masih perlu intervensi dalam hal untuk pendidikan. Menyangkut mutu memang ada peningkatan, namun belum terlalu menggembirakan. Berdasarkan survei di beberapa sekolah dan diskusi sekolah umumnya memang melaksanakan

penjaminan mutu belum utuh. Dalam beberapa diskusi kepala sekolah dan guru juga tidak tahu standar mutu yang harus mereka capai sebagai tujuan. Peningkatan mutu dianggap bukan tugas sekolah namun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah tidak sepenuhnya merencanakan peningkatan mutu sekolah untuk memenuhi 8 SNP. Sebagai akibatnya guru akan mengajar sesuai kemampuannya dengan fasilitas seadanya, bahkan alat-alat bantu pembelajaran yang mereka miliki terkadang tidak mereka gunakan. Sekolah favorit umumnya telah mampu melakukan pengelolaan sekolah dengan baik, namun sebagian besar sekolah (umumnya bukan sekolah favorit) tidak tahu bagaimana melakukan pengelolaan sekolah sesuai standar mutu pengelolaan. Kontrol pada seluruh kegiatan di sekolah belum dilakukan dengan baik dan walaupun dilakukan oleh kepala sekolah umumnya mereka tidak memiliki catatan tentang kekurangan yang terjadi, misalnya: (1) apakah guru kelas atau mapel telah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu, (2) apakah praktikum yang dijalankan telah sesuai dengan standar mutu yang seharusnya, (3) apakah metode pembelajaran yang dijalankan oleh guru dijamin dapat membuat siswa paham, terampil dan telah membentuk sikap siswa (berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, (4) apakah sarana-prasarana yang dimiliki telah terkelola dengan baik, misalnya apakah kantin cukup sehat, ruang kelas, ruang guru dan fasilitas umum cukup bersih dan nyaman, sarana sanitasi bersih, taman dan ruang terbuka hijau terkelola, sampah sudah terkelola dengan baik, dan (5) bagaimana perilaku siswa, apakah masih terjadi perkelahian antar siswa, *bullying*, tidak disiplin, kurang hormat atau sopan, tidak bisa bekerjasama, tidak menghormati hak orang lain.

Artinya review terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan belum dilakukan oleh sekolah, dengan kata lain sekolah belum memiliki peta mutu pendidikan. Sebagai akibatnya perencanaan tahunan yang dibuat tidak ditujukan untuk peningkatan mutu, terutama peningkatan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Pengawasan oleh pengawas sekolah belum sepenuhnya mampu membaca bagaimana mutu pengelolaan dan proses pembelajaran sekolah. Demikian juga pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, belum secara signifikan bisa meningkatkan mutu sekolah dan dapat ditunjukkan.

Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional

Pendidikan (SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan: (1) percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, (2) pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah: sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan sekolah berbudaya mutu, serta berdampak pada penumbuhan budi pekerti.

Selain sistem penjaminan mutu internal, upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan adalah pengembangan dan perbaikan kurikulum. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMP pada tahun 2015,

masalah utama yang dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah dalam menyusun RPP, mendisain instrumen penilaian, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, dan mengolah dan melaporkan hasil penilaian. Memperhatikan hal tersebut, upaya peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum 2014 difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian, menyajikan pembelajaran dan melaksanakan penilaian, serta mengolah dan melaporkan hasil penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. Pada tahun 2018 dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menuntut guru untuk melakukan penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong-royang dan integritas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu dipersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan Abad 21 seperti khususnya keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), keterampilan untuk bekerjasama (*collaboration*) kemampuan untuk berkreaitivitas (*creativity*), dan kemampuan untuk berkomunikasi (*communication*). Penguatan Pendidikan Karakter merupakan platform pendidikan nasional yang memperkuat Kurikulum 2013. Dengan demikian perkembangan Kurikulum 2013 tahun 2018 ini telah mengintegrasikan tiga strategi implementasi Penguatan Pendidikan Karakter yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis masyarakat sehingga implementasi Kurikulum 2013 menjadi bagian integral dalam penguatan pendidikan karakter, kecakapan literasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills/HOTS*).



BAB II
MODEL
PEMBELAJARAN
PADA
KURIKULUM
2013

Pengertian Model Pembelajaran

Membahas tentang model-model pembelajaran dalam kerangka pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 merupakan suatu hal penting. Dalam pembelajaran, penggunaan model bukan suatu yang baru. Dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika, guru dapat mengembangkan model pembelajaran sebagai upaya mempengaruhi perubahan yang baik dalam perilaku siswa. Pengembangan model pembelajaran, dimaksudkan untuk membantu guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar siswa. Salah satu pembatasan model pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Wahab bahwa model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan pembelajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses pembelajaran agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan (Wahab, 2007: 52).

Sebuah model pembelajaran dikembangkan atas beberapa asumsi diantaranya: (1) mengajar adalah upaya menciptakan lingkungan yang sesuai, di mana terdapat berbagai bagian lingkungan mengajar yang memiliki saling ketergantungan, (2) terdapat berbagai komponen yang meliputi: isi, keterampilan peranan-peranan mengajar, hubungan sosial, bentuk-bentuk kegiatan, sarana/fasilitas fisik dan penggunaannya, yang keseluruhannya membentuk sebuah sistem lingkungan yang bagian-bagiannya saling berinteraksi yang mendesak perilaku seluruh partisipan baik guru maupun siswa, (3) kombinasi yang berbeda antara bagian-bagian tersebut akan menghasilkan bentuk lingkungan yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula, dan (4) karena model pembelajaran menciptakan lingkungan, maka model pembelajaran menyediakan spesifikasi yang masih bersifat kasar untuk lingkungan dalam pembelajaran di kelas (Wahab, 2007: 52-53).

Di sisi lain dikatakan bahwa model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik dan memberi petunjuk kepada guru di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya (Jihad dan Haris, 2008:25). Dari pengertian ini dapat dimaknai

bahwa dalam memilih suatu model pembelajaran, harus disesuaikan dengan realitas yang ada dan situasi kelas yang ada, serta pandangan hidup yang akan dihasilkan dari proses kerjasama yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Kemudian Hanafiah dan Suhana menambahkan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka menyiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (*learning style*) dan gaya mengajar guru (*teaching style*), yang keduanya berjalan harmonis (Nanang Hanafiah dan Cucu Suhan, 2009: 41).

Untuk mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu diperlukan model pembelajaran yang dipandang mampu mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain, (2) suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati, (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa, (4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan, (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner, dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya (Komarudin, 2000:152).

Dari pendapat di atas dinyatakan bahwa model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar tersebut model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran (Sagala, 2010:176).

Model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir, sehingga model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu (Endang Mulyatiningsih, 2010:1). Model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam model pembelajaran sudah mencerminkan penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, atau taktik pembelajaran sekaligus, sehingga dengan demikian, satu model pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode, teknik, dan taktik pembelajaran sekaligus.

Menurut Joyce dan Weil (2000:13), model pembelajaran adalah suatu deskripsi dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum,

kursus-kursus, desain unit pelajaran dan pembelajaran, perlengkapan belajar, buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan belajar melalui program komputer. Sebab model-model ini menyediakan alat-alat belajar yang diperlukan bagi siswa. Selanjutnya dikatakan bahwa hakikat mengajar (*teaching*) adalah membantu para pelajar memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan belajar bagaimana belajar (Joyce dan Weil (2000:13). Hasil akhir atau hasil jangka panjang dari mengajar adalah kemampuan siswa yang tinggi untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian model pembelajaran tidak hanya memiliki makna deskriptif dan kekinian, akan tetapi juga bermakna prospektif dan berorientasi ke masa depan.

Model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu, yaitu: (1) rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya, (2) tujuan pembelajaran yang akan dicapai, (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan, dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai (Hanafiah dan Suhana, 2009:25). Dengan demikian, dalam pengembangan model pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari empat komponen tersebut. Berbicara lebih jauh tentang model pembelajaran ini, Joyce dan Weil (2000:50-54) mengemukakan beberapa *key ideas* yang perlu dipahami sebagai komponen suatu model pembelajaran, yaitu: sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung.

Sintaks (*syntax*) daripada model, yaitu langkah-langkah, fase-fase, atau urutan kegiatan pembelajaran. Jadi sintaks itu adalah deskripsi model dalam *action*. Setiap model mempunyai sintaks atau struktur model yang berbeda-beda. Dengan membandingkan fase-fase kegiatan pada model-model pembelajaran, dapat diidentifikasi perbedaan-perbedaan operasional di antara berbagai model sehingga jelas pula peranan apa yang harus dilakukan pembelajar agar model dapat berfungsi. Prinsip reaksi (*principle of reaction*) yaitu reaksi pembelajar atas aktivitas-aktivitas pembelajar. Prinsip reaksi itu akan membantu memilih reaksi-reaksi apa yang efektif dilakukan pembelajar. Sistem sosial (*social system*) mencakup, tiga pengertian utama yaitu: (1) deskripsi rncam-macam peranan pembelajar dan pembelajar, (2) deskripsi hubungan hirarkis/ otoritas pembelajar dan pembelajar, dan (3) deskripsi macam-macam kaidah untuk mendorong pembelajar. Sistem sosial sebagai unsur model agaknya kurang berstruktur dibandingkan dengan unsur sintaks.

Sistem pendukung (*support system*) sesungguhnya adalah kondisi yang dibutuhkan oleh suatu model. Jadi, bukan lah model itu sendiri. Sistem pendukungnya bertolak dari pertanyaan-pertanyaan dukungan apa yang dibutuhkan oleh suatu model agar tercipta lingkungan khusus. Dalam hubungan ini, sistem pendukung itu berupa kemampuan/keterampilan dan fasilitas-fasilitas teknis. Sistem pendukung diturunkan dari dua sumber yaitu kekhususan-kekhususan peranan pembelajar

dan tuntutan pebelajar. Dalam proses pembelajaran umumnya membutuhkan transkrip atau deskripsi peristiwa pembelajaran bagi pengguna model-model tertentu. Di samping itu dibutuhkan pula analisis kesulitan pelajaran dan analisis kesulitan-kesulitan khusus penggunaan model.

Diketahui bahwa setiap model mempunyai kegunaan utama di samping kegunaan-kegunaan lainnya yang dapat diterima. Dalam hal ini beberapa model didesain untuk tujuan-tujuan yang amat spesifik dan beberapa lainnya dapat dipergunakan secara umum. Penggunaan model manapun harus dapat memberi efek belajar bagi pebelajar. Efek belajar ini dapat berupa *direct* atau *instructional effects* atau berupa *indirect* atau *nurturant effect*. *Instructional effects* adalah pencapaian tujuan sebagai akibat kegiatan-kegiatan instruksional. Biasanya beberapa pengetahuan/ keterampilan. Sedangkan *nurturant effect* adalah efek-efek pengiring yang ditimbulkan model karena pebelajar menghidupi (*living in*) sistem lingkungan belajar, misalnya kemampuan berpikir kreatif, sikap terbuka dan sebagainya. Seorang pembelajar memiliki model atau strategi pembelajaran karena ingin mencapai *instructional effects* dan *nurturant effects*.

Berdasarkan uraian beberapa pengertian tentang model pembelajaran, maka yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengarahkan guru dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan rencana dan upaya sistematis yang dilakukan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran.

Model Pembelajaran Resik

a. Landasan Pengembangan Model Resik

Model pembelajaran resik mengadopsi pembelajaran kooperatif dan pendekatan pembelajaran realistik (Suradi, 2007:1). Model pembelajaran kooperatif bukan hanya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial. Hal ini bersesuaian dengan yang disarankan Marpaung bahwa perlu dikembangkan model pembelajaran matematika berdasarkan konstruksi psikologis dan konstruksi sosiologis (Marpaung, 2003:6). Dengan alasan, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang berorientasi sosial, suka berkumpul, bertandang dan berbicara. Selain itu, salah satu pendekatan pembelajaran yang diadopsi dalam model pembelajaran resik adalah pendekatan matematika realistik. Untuk itu, dalam

bagian ini akan dijelaskan dua pendekatan yang mendukung pengembangan model resik.

b. Pendekatan Matematika Realistik

Pendekatan matematika realistik diadopsi dari *realistics mathematic education* (RME), pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Kata realistik diambil dari salah satu diantara empat pendekatan dalam pembelajaran matematika menurut klasifikasi Treffers seperti yang dikutip Gravemeijer yaitu: mekanistik, empiristik, strukturalistik, dan realistic (Gravemeijer, 1994:11).

Treffers mengelompokkan pendidikan matematika dalam empat tipe dengan mengarah ke matematika horizontal dan vertical (Treffers, 1991:32). Pengelompokan itu diterangkan oleh Freudenthal seperti dikutip Gerardus Polla (2001: 46-50) sebagai berikut.

- (1) *Mechanistic, or "traditional approach"*, didasarkan pada *drill-practice and patterns*, yang mengancam orang menjadi seperti komputer (mesin). Maksudnya, aktivitas siswa didasarkan pada ingatan atau algoritma. Kesalahan akan terjadi jika siswa dihadapkan dengan persoalan lain yang berbeda dengan yang mereka ingat. Pendekatan ini tidak menggunakan matematika vertikal dan horizontal.
- (2) *Empiristic approach*, dunia adalah suatu realitas, dan siswa dipersiapkan dengan material dari dunia hidup mereka. Ini berarti siswa dihadapkan pada situasi di mana mereka melakukan aktivitas matematika horizontal.
- (3) *Structuralist, or 'new math approach'* yang didasarkan pada *set theory, flowchart and games* yang termasuk dalam matematika horizontal, dan tidak diciptakan dari dunia nyata siswa.
- (4) *Realistics approach*, suatu situasi dunia nyata (*real world*) atau suatu masalah diambil sebagai titik mulai dari belajar matematika, dan kemudian masalah itu akan dieksplorasi dengan kegiatan matematika horizontal. Hal ini dimaksudkan, siswa akan mengatur masalah itu, dan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai aspek dari persoalan matematika tersebut, dan menemukan aturan dan hubungan. Kemudian dengan menggunakan matematika vertikal, siswa akan mengembangkan konsep-konsep matematika.

Dalam pendidikan matematika, dua komponen matematisasi adalah penting, yaitu matematisasi horizontal dan vertikal. Perbedaan keempat pendekatan pendidikan matematika didasarkan pada dua komponen matematisasi, yang menekankan sejauh mana mereka memuat/ menggunakan komponen itu. Tabel

di bawah ini menunjukkan perbedaan keempat pendekatan itu.

Tabel 2.1 Perbedaan Pendekatan dalam Pembelajaran Matematika

Pendekatan	Horizontal	Vertikal
Mekanistik	-	-
Empiristik	+	-
Strukturalistik	-	+
Realistik	+	+

(Streefland, 1991: 32)

Keterangan: Tanda (-) berarti tidak memuat komponen tersebut.

Matematisasi horizontal menunjuk pada proses transformasi masalah yang dinyatakan dalam bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika, sedangkan matematisasi vertikal adalah proses dalam matematika itu sendiri yaitu lebih menekankan struktur dalam matematika (Gravemeijer, 1994:11). Pendekatan strukturalistik lebih menekankan struktur dalam suatu cabang matematika, yaitu mempelajari matematika dalam arah vertikal yang lebih cenderung memperlihatkan sifat abstrak dari matematika. Pendekatan realistik selain mempelajari dalam arah vertikal juga mempelajari dalam arah horizontal, yaitu hubungan antara konsep-konsep dalam beberapa cabang matematika, seperti misalnya geometri, aljabar linier, kalkulus, dan statistik.

Dilihat dari sudut pendidikan, langkah-langkah memahami suatu masalah melalui translasi timbal balik dari bentuk-bentuk representasi enaktif, ikonik dan simbolik dapat dipandang sebagai bagian dari matematisasi horizontal. Pembuktian dalam matematika merupakan bagian dari matematisasi vertikal. Pendekatan mekanistik tidak memuat kedua komponen matematisasi itu, sedangkan pendekatan empiristik hanya memuat komponen horizontal saja. Karakteristik lain pendekatan matematika realistik ialah landasan filosofis yang mendasarinya yaitu: matematika adalah kegiatan/aktivitas manusia, dan belajar matematika merupakan proses belajar melalui “penemuan kembali”. Dengan perkataan lain, landasan filosofis matematika dekat dengan filsafat konstruktivisme yang menyebutkan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi dari seseorang yang sedang belajar (Suparno, 1997: 14). Ini berarti, pendekatan matematika realistik lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa harus aktif, tidak boleh pasif. Siswa harus aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika itu dan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Artinya siswa harus didorong dan diberi keleluasaan untuk mengekspresikan jalan pikirannya, menyelesaikan masalah menurut idenya, mengkomunikasikan, dan belajar dari ide teman-temannya.

Gravemeijer (1994:21), menyebutkan bahwa yang mendasari pendekatan matematika realistik ialah kegunaan matematika itu sebagai alat (aspek aplikasi)

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kontekstual merupakan alasan masyarakat untuk mempelajari matematika. Kalau realistik berkaitan dengan aplikasi, Freudenthal (Gravemeijer, 1994:21), mengatakan bahwa pendidikan matematika untuk anak berkaitan dengan semua realitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendekatan matematika realistik menekankan bahwa aspek aplikasi sangat penting. Jadi pendekatan matematika realistik bertolak dari masalah-masalah kontekstual, dari sana siswa “membahasamatematikakan” masalah tersebut, kemudian menyelesaikan secara matematis.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, pada dasarnya pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan matematika realistik dicirikan oleh: (1) matematika dipandang sebagai kegiatan manusia sehari-hari, sehingga memecahkan masalah-masalah sehari-hari (*contextual problem*) merupakan bagian yang esensial, (2) belajar matematika berarti bekerja dengan matematika (*doing mathematic*), (3) siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematika di bawah bimbingan guru, (4) proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, dan siswa menjadi fokus dari semua aktivitas di kelas. Kondisi ini mengubah otoritas guru yang semula sebagai validator (pemberi jawaban yang benar) menjadi seorang pembimbing. Guru harus melatih otoritas ini dengan cara memilih kegiatan-kegiatan instruksional yang akan dilaksanakan dan membimbing pelaksanaan diskusi, dan menyeleksi kontribusi-kontribusi yang diberikan siswa (untuk dibahas secara klasikal), dan (5) aktivitas yang dilakukan meliputi; menemukan masalah-masalah kontekstual (*looking for problem*), memecahkan masalah (*solving problems*), dan mengorganisir bahan ajar (*organizing a subject matter*). Bahan ajar yang diorganisir adalah realitas-realitas yang harus diorganisir secara matematis, serta konsep-konsep matematika yang harus diorganisir; menurut ide-ide baru, untuk dimengerti lebih baik, dalam konteks yang lebih luas, melalui pendekatan aksiomatik.

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik dimulai dari masalah kontekstual. Dengan menggunakan aktivitas matematisasi horizontal siswa mencapai model matematika informal atau formal. Dengan implementasi vertikal seperti pemecahan masalah secara individu atau kelompok, membandingkan pemecahan dan diskusi, sehingga diperoleh pemecahan masalah. Selanjutnya siswa menginterpretasikan pemecahan dan strategi yang digunakan ke masalah kontekstual yang lain. Akhirnya siswa menggunakan pengetahuan matematika untuk sampai pada pengetahuan matematika formal.

c. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengupayakan seorang siswa mampu mengajarkan kepada peserta lain. Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari sesuatu

dengan baik pada waktu yang bersamaan, ia menjadi narasumber bagi peserta lainnya. Pengorganisasian pembelajaran dicirikan oleh siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran kooperatif didorong untuk bekerja sama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka akan berbagi penghargaan bila mereka berhasil sebagai kelompok.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran, guru harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkannya dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru.

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran kontekstual. Sistem pengajaran *cooperative Learning* dapat didefinisikan sebagai sistem kerja/ belajar kelompok yang terstruktur. Di dalam struktur ini mencakup lima unsur pokok yaitu; saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok (Johnson, 2009:146).

Falsafah yang mendasari *Cooperative Learning* (pembelajaran kooperatif) dalam pendidikan adalah "*homo homini socius*" yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih.

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran.

Ada banyak alasan yang membuat pembelajaran kooperatif memasuki jalur utama praktik pendidikan. Diantaranya adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi para siswa, mengembangkan hubungan antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, meningkatkan harga diri, tumbuhnya kesadaran bahwa para siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah, mengaplikasikan kemampuan serta pengetahuan mereka. Pembelajaran kooperatif menjadi semakin penting. Lebih jauh lagi, pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan yang sangat besar untuk mengembangkan hubungan antar siswa dari latar belakang etnik yang berbeda dan antara siswa-siswa pendidikan khusus terkebelakang secara akademik dengan teman sekelas mereka.

Jelasnya, tujuan kooperatif menciptakan norma-norma yang pro-akademik di antara para siswa, dan norma-norma pro-akademik memiliki pengaruh yang amat penting bagi pencapaian siswa. Interaksi diantara siswa dalam tugas-tugas pembelajaran akan terjadi dengan sendirinya untuk mengembangkan pencapaian prestasi siswa (Slavin, 1995:38).

Belajar kooperatif merupakan suatu model pengajaran yang jangkauannya melampaui (tidak hanya) membantu siswa belajar isi akademik dan keterampilan semata, namun juga melatih siswa tujuan-tujuan hubungan sosial dan manusia (Arends, 1997:26). Menurut Slavin, dalam belajar kooperatif siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sukar apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Lebih lanjut, Slavin (1995:39), mengemukakan bahwa dalam belajar kooperatif siswa bekerja sama dalam kelompok kecil saling membantu mempelajari suatu materi. Pendapat serupa diungkapkan Thomson (1995:123), mengatakan bahwa di dalam belajar kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima siswa dengan kemampuan heterogen (kemampuan tinggi, sedang, dan rendah), berbeda jenis kelamin, dan suku/ras serta saling membantu satu sama lain. Dengan demikian, belajar kooperatif akan melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan saling membantu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang dihadapinya.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam pembelajaran kooperatif kelas disusun atas kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Setiap kelompok biasanya terdiri dari empat atau lima siswa dengan kemampuan berbeda, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, jika memungkinkan dalam pembentukan kelompok hendaknya diperhatikan pula perbedaan suku, budaya, etnis, dan jenis kelamin.

Menurut Lundgren, Arends dan Ibrahim, ciri-ciri atau karakteristik dari belajar kooperatif adalah: (1) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, (2) jika memungkinkan, setiap anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda, (3) siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya, dan (4) penghargaan lebih berorientasi kelompok dari pada individu (Tahmir, 2007:19).

Berdasarkan ciri-ciri belajar kooperatif di atas, dapat dikemukakan bahwa dengan belajar kooperatif memberikan kesempatan siswa dengan berbagai latar belakang kemampuan dan kondisi sosial untuk bekerja sama, saling tergantung dan belajar saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hal ini akan lebih mudah dicapai jika menggunakan pendekatan realistik.

d. Karakteristik Model Resik

Salah satu ciri utama dari pembelajaran matematika dengan menggunakan model resik adalah menggunakan masalah kontekstual yang diangkat sebagai

masalah awal dalam pembelajaran, yakni guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Kemudian meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. Jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, guru menjelaskan atau memberikan petunjuk seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum dipahami siswa. Selain itu, adanya kerjasama siswa secara kooperatif dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan aktivitas atau pemecahan masalah yang menjadi tugas kelompok. Guru perlu membuat berbagai perencanaan sehingga ciri atau kondisi ini dapat terlaksana secara baik dalam pembelajaran. Untuk itu, guru perlu membuat perencanaan secara rinci mengenai (1) tujuan pembelajaran, (2) masalah kontekstual yang sesuai, dan (3) perangkat pembelajaran dan peralatan (media) pendukung.

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan bagian penting dalam setiap model pembelajaran, termasuk dalam model resik. Tujuan pembelajaran mengacu kepada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika yang dirumuskan dalam standar isi dari pembelajaran matematika. Standar kompetensi mata pelajaran matematika adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran matematika. Sedangkan kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Dalam menetapkan indikator kompetensi, perlu diperhatikan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Perlu pula diingat bahwa dalam model resik, pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk mencapai dampak instruksional, tetapi juga dampak pengiring.

Dalam model resik, siswa diharapkan dapat memahami sendiri suatu konsep, tanpa dijelaskan oleh guru. Jadi prinsip konstruksi pengetahuan oleh siswa, menjadi perhatian utama dalam model resik. Selain itu, model resik dirancang untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan penguatan dan perluasan pengetahuan siswa. Untuk tercapainya hal ini, sangat dibutuhkan perencanaan aktivitas atau pemecahan masalah secara baik dan sesuai. Peran guru dalam hal perencanaan aktivitas atau pemecahan masalah ini sangat utama. Guru perlu merencanakan dan mempersiapkan masalah kontekstual yang sesuai, yang memungkinkan siswa untuk beraktivitas saling membantu dalam kelompok kecil untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri.

Dalam model resik, tidak setiap konsep atau prinsip harus ditemukan sendiri oleh siswa. Prinsip dasar dalam model resik adalah bahwa suatu pengetahuan semestinya dipahami sendiri oleh siswa melalui aktivitas atau pemecahan masalah yang dilakukan. Pengetahuan tersebut bukan hasil transfer guru secara langsung. Artinya bahwa pengetahuan itu tidak diperoleh siswa sebagai hasil penjelasan dari guru, tetapi pengetahuan itu diperoleh siswa melalui aktivitas

atau pemecahan masalah bersama dengan teman-teman sekelompok. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep atau prinsip tersebut, siswa diberikan tugas menyelesaikan aktivitas atau pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep atau prinsip tersebut dan perluasannya (pengayaannya). Aspek ketiga yang diperlukan direncanakan guru adalah perangkat pembelajaran dan peralatan (media) pendukung. Yang perlu dipersiapkan guru dalam hal ini adalah merencanakan dan menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku siswa, dan lembar kerja siswa (LKS). Dua komponen ini sangat berperan dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar dan bekerja pada kelompok masing-masing.

Buku siswa dan Lembar Kerja Siswa (LKS) bersifat saling melengkapi. *Pertama*, buku siswa dapat memuat uraian lengkap mengenai materi yang akan dipelajari. Untuk kondisi seperti ini, maka LKS memuat pemecahan masalah yang berfungsi untuk memperluas dan memperkuat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. *Kedua*, buku siswa hanya memuat garis besar materi tanpa memuat penjelasan detail atau pengertian terhadap konsep tertentu atau tidak memuat prinsip-prinsip (sifat-sifat, rumus, algoritma) tertentu. Untuk kondisi semacam ini, LKS memuat aktivitas-aktivitas yang dapat mengarahkan siswa untuk dapat mendefinisikan konsep tertentu, menemukan sifat-sifat, atau rumus tertentu. Selain menyiapkan perangkat pembelajaran tersebut, guru perlu juga menyiapkan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sementara dibahas. Media tersebut diharapkan kontekstual agar dapat berfungsi menunjang siswa dalam belajar. Misalnya, agar siswa dapat menemukan rumus volume limas, guru dapat menggunakan model limas dan model kerucut yang alas dan tingginya sama. Agar siswa dapat memahami jaring-jaring kubus atau menentukan berapa banyak jaring-jaring kubus, guru dapat menyediakan (atau memintakan siswa menyediakan) model-model kubus yang terbuat dari kertas atau karton, gunting atau silet.

Model resik memuat lima komponen penting, yakni (1) sintaks, (2) sistem sosial, (3) prinsip reaksi, (4) sistem pendukung, dan (5) dampak instruksional dan pengiring. Secara singkat kelima komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Tahmir, 2007).

a) Sintaks Model RESIK

Sintaks (*syntax*) menunjuk pada keseluruhan alur atau urutan kegiatan belajar mengajar. Sintaks menentukan jenis-jenis tindakan guru dan siswa yang diperlukan, urutannya dan tugas-tugas untuk siswa. Sintaks dideskripsikan dalam urutan aktivitas-aktivitas yang disebut fase; setiap model mempunyai alur fase berbeda. Sintaks model resik terdiri dari 6 (enam) fase, yakni (1) memotivasi siswa, (2) menyajikan informasi dan melibatkan siswa memahami masalah kontekstual, (3) mengorganisasi siswa kedalam kelompok belajar dan memberikan tugas kelompok, (4) membimbing kelompok bekerja dan belajar, (5) diskusi dan

negosiasi, dan (6) evaluasi dan penghargaan. Penempatan evaluasi pada fase terakhir tidak dimaksudkan harus selalu dilakukan pada akhir pembelajaran. Dalam model resik, penilaian dapat dilakukan di awal, pertengahan ataupun di akhir pembelajaran. Adapun rincian aktivitas guru dan siswa dapat dilihat pada Tabel 2.2.

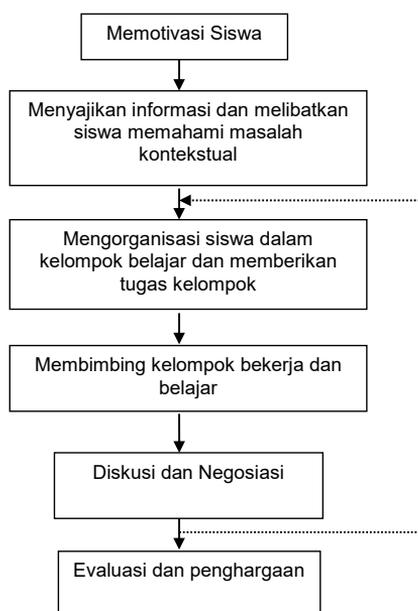
Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran RESIK

No	Fase	Aktivitas Guru dan Siswa
1	Memotivasi siswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru membuka pelajaran dan mengorganisasi kelas untuk belajar. Siswa mengambil tempat dalam kelompok masing-masing. b. Guru menyampaikan hasil kerja kelompok berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya. c. Guru menyampaikan kepada siswa tentang materi pokok, standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. d. Guru menyampaikan kepada siswa apa yang mereka akan lakukan dalam kerja kelompok: menyelesaikan masalah kontekstual pada LKS. e. Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan siswa sehari-hari.
2.	Menyajikan informasi dan melibatkan siswa memahami masalah kontekstual.	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru menyajikan informasi tentang materi yang dipelajari siswa dengan cara demonstrasi atau merujuk kepada bahan ajar dengan menggunakan masalah kontekstual sesuai materi pelajaran yang sedang dipelajari siswa. b. Meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. d. Jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, guru menjelaskan atau memberikan petunjuk seperlunya. (Karakteristik realistik yang muncul adalah menggunakan masalah kontekstual sebagai awal pembelajaran).
3	Mengorganisasi siswa kedalam kelompok belajar dan memberikan tugas kelompok	<ul style="list-style-type: none"> a. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. b. Guru membagikan LKS atau tugas yang akan diselesaikan siswa kepada masing-masing kelompok .

No	Fase	Aktivitas Guru dan Siswa
4	Membimbing kelompok bekerja dan belajar	<p>a. Siswa melakukan aktivitas yang telah ditentukan guru (mempelajari materi tertentu, menyelesaikan masalah kontekstual pada LKS, menyelesaikan masalah tertentu, melakukan investigasi) dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Pada langkah ini karakteristik pembelajaran matematika realistik yang muncul adalah menggunakan model.</p> <p>b. Guru berkeliling dan memberikan bantuan terbatas kepada setiap kelompok. Bantuan ini dapat berupa penjelasan secukupnya (tanpa memberikan jawaban terhadap masalah yang sementara dihadapi siswa), dapat pula memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa dan mengarahkan siswa untuk lebih jelas melihat masalah yang sebenarnya atau mengarahkan siswa kepada pemecahan masalah yang dihadapi.</p> <p>c. Setiap kelompok diminta untuk memeriksa kembali apa yang mereka telah lakukan atau yang mereka pelajari sebelum menuliskan jawaban kelompok.</p> <p>d. Guru memberikan penekanan, bahwa setiap anggota kelompok harus saling membantu agar materi yang dipelajari dipahami oleh semua anggota kelompoknya.</p>
5	Diskusi dan negosiasi	<p>a. Siswa melaporkan hasil penyelesaian masalah atau hasil dari aktivitas kelompok.</p> <p>b. Guru menentukan siswa tertentu atau kelompok tertentu untuk mempresentasikan hasil kerjanya.</p> <p>c. Guru memimpin diskusi. Peran guru di sini sangat menentukan lancarnya interaksi antara setiap kelompok, juga sangat menentukan berhasilnya proses negosiasi.</p> <p>d. Guru dapat mengajukan pertanyaan apakah, mengapa, dan bagaimana, sehingga lebih mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan.</p> <p>e. Guru meminta kepada setiap siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Karakteristik pembelajaran matematika realistik yang muncul pada langkah ini adalah penggunaan kontribusi siswa dan terdapat interaksi antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan guru.</p>

No	Fase	Aktivitas Guru dan Siswa
6	Evaluasi dan penghargaan	<p>a. Penilaian dapat dilakukan sebelum (<i>pre-test</i>), selama, dan setelah pembelajaran dilakukan.</p> <p>b. Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan.</p>

Penggunaan model resik, setelah fase kelima yakni diskusi dan negosiasi, jika masih tersedia waktu untuk mempelajari materi berikutnya, maka pembelajaran dapat kembali ke fase ketiga yakni membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dengan demikian pembelajaran dengan menggunakan model resik ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Alur Pembelajaran dengan Menggunakan Model RESIK

b) Sistem Sosial

Menurut Joyce dan Weil (2000), sistem sosial menyatakan peran dan hubungan siswa dan guru, dan jenis-jenis norma yang dianjurkan. Peranan kepemimpinan guru sangat berbeda dari satu model ke model lainnya. Dalam model resik, dikembangkan suasana demokratis. Interaksi antar siswa dalam melakukan aktivitas belajar melalui pendekatan realistik pada kelompok masing-masing mendapat penekanan penting dalam model ini. Demikian juga interaksi antar siswa dalam kelas pada fase diskusi dan negosiasi, mendapat penekanan penting. Guru berfungsi memfasilitasi agar interaksi antar siswa dalam semua aktivitas pembelajaran ini dapat berlangsung baik. Guru perlu pula mengorganisasi pembelajaran sebaik mungkin agar siswa tetap di dalam aktivitas atau tugas

belajar (*on-task*), dan memfasilitasi dan memotivasi siswa agar terjadi kerjasama secara kooperatif dan memungkinkan terjadinya konstruksi pengetahuan.

Prinsip-prinsip yang dikandung dalam model resik ini adalah: (1) kerjasama, (2) kebebasan menyampaikan pendapat, (3) tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok, dan (4) kesamaan derajat. Dalam setiap prinsip tersebut terkandung norma-norma tertentu. Misalnya dalam prinsip kerjasama, terkandung norma-norma saling membantu dan saling menghargai. Dalam prinsip kebebasan menyampaikan pendapat, terkandung norma menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan cara yang santun, dan sebagainya.

c) Prinsip Reaksi

Pada model resik, guru berperan sebagai fasilitator, dan moderator. Sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber-sumber belajar, mendorong siswa untuk belajar, dan memberikan bantuan bagi siswa untuk dapat belajar dan mengkonstruksi pemahamannya secara optimal. Sebagai moderator, guru memimpin diskusi kelas, mengatur mekanisme sehingga diskusi kelas berjalan lancar, dan mengarahkan diskusi sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Beberapa perilaku guru (prinsip-prinsip reaksi) yang diharapkan dalam model resik adalah: (1) memberikan perhatian pada penciptaan suasana demokratis dan membangun interaksi siswa yang kondusif dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas, (2) menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar yang realistik dan relevan yang dapat mendukung siswa melakukan aktivitas atau pemecahan masalah, (3) mengarahkan siswa sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas kelompok atau diskusi kelas. Guru perlu menghindarkan diri dari adanya kebiasaan transfer pengetahuan, (4) menekankan pentingnya bekerjasama secara kooperatif dalam kelompok masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk upaya meningkatkan keterampilan kooperatif siswa, (5) memberikan bantuan terbatas pada setiap siswa (individual atau kelompok) berupa penjelasan secukupnya tanpa memberikan jawaban atas masalah yang dipelajari (prinsip *scaffolding*), atau bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan yang terfokus yang berkaitan dengan realitas siswa agar siswa dapat menyadari akan hubungan konsep-konsep terkait yang sementara dikaji dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah, (6) menghargai pendapat siswa dan mendorong siswa untuk dapat bersikap lebih kritis dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dan (7) menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok siswa. Guru perlu menghindari keinginan untuk memposisikan diri sebagai sumber utama pengetahuan bagi siswa.

d) Sistem Pendukung

Sistem pendukung (*support system*) suatu model pembelajaran merupakan semua sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk menerapkan model tersebut.

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model resik diperlukan sejumlah bahan dan media pembelajaran. Untuk setiap pokok bahasan yang akan dibahas, guru perlu menyiapkan bahan ajar yang realistik bagi siswa (baik berupa buku siswa, *hand out*, dan sebagainya), lembar kegiatan siswa (LKS), perangkat evaluasi, dan media pembelajaran yang relevan.

e) Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring

Setiap model pembelajaran selalu diharapkan menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring. Menurut Ratumanan, dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dan mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan, misalnya “penguasaan terhadap materi A”. Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh siswa tanpa pengarahan langsung dari guru.

Pembelajaran dengan menggunakan model resik menempatkan siswa sebagai subyek dalam pembelajaran. Dalam model resik, guru tidak lagi berfungsi sebagai pemberi ilmu, tetapi lebih sebagai fasilitator. Guru menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran, mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok kecil, mendorong siswa untuk dapat belajar lebih terfokus dan optimal, mengarahkan diskusi siswa, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan realistik yang merangsang siswa untuk berpikir.

Dalam model resik, siswa tidak menerima informasi secara pasif, tetapi siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan. Model resik dirancang untuk memberikan kesempatan bagi siswa melakukan aktivitas atau pemecahan masalah realistik dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Pada saat melakukan aktivitas atau pemecahan masalah dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif, siswa saling berinteraksi, saling membantu dan saling melengkapi. Hal ini akan memungkinkan siswa untuk dapat memahami sendiri suatu konsep atau prinsip matematika dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Model resik juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan bekerjasama siswa. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model resik ini juga diharapkan dapat memunculkan dampak instruksional dan dampak pengiring. Rincian kedua dampak dimaksud adalah sebagai berikut.

(1) Dampak Instruksional

(a) Kemampuan Konstruksi Pengetahuan

Konstruksi pengetahuan merupakan hal penting dari aliran konstruktivisme. Menurut Martin konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan melalui hubungan saling mempengaruhi dari belajar sebelumnya dengan belajar baru. Dalam model resik siswa melakukan

aktivitas dalam kelompok-kelompok kecil, berinteraksi dan bernegosiasi yang mengarahkan pada pembentukan pengetahuan yang bersifat subyektif. Pengetahuan subyektif ini kemudian didiskusikan dalam kelompok besar (kelas), sehingga diperoleh pengetahuan bersama yang bersifat obyektif. Dengan aktivitas semacam ini secara rutin, kemampuan siswa dalam konstruksi pengetahuan secara mandiri akan semakin meningkat.

(b) Penguasaan Bahan Ajar

Dengan model resik, informasi (pengetahuan) dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui aktivitas belajar yang dilakukan di dalam kelompok-kelompok kecil. Pengetahuan yang dikonstruksi sendiri semacam ini akan lebih bermakna bagi siswa dan akan dapat bertahan lama dalam memori siswa. Dengan bekerja saling membantu, saling memberikan kontribusi pemikiran, dapat diharapkan bahan ajar yang dipelajari atau didiskusikan dalam kelompok dapat dipahami secara lebih baik, dibandingkan dengan bila dipelajari secara individual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setting kelas, siswa lebih cenderung bertanya kepada temannya daripada kepada guru. Model resik memungkinkan siswa lemah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas atau meminta penjelasan dari temannya yang lebih pandai. Siswa pandai terkondisikan untuk selalu memberikan bantuan-bantuan penjelasan kepada teman yang membutuhkan. Dalam kondisi semacam ini baik siswa lemah atau siswa pandai sama-sama memperoleh manfaat. Siswa lemah akan dapat memahami bahan ajar yang lebih baik, demikian pula siswa pandai akan meningkat penguasaan bahan ajarnya, karena untuk dapat memberikan bantuan penjelasan (tutorial) kepada temannya, tentunya dibutuhkan pemikiran lebih mendalam tentang hubungan antara konsep-konsep atau ide-ide yang terkandung dalam materi yang dijelaskan tersebut.

(c) Kemampuan Pemecahan Masalah

Dengan menggunakan model resik dalam setiap pembelajaran matematika, siswa dalam masing-masing kelompok kecil diberikan tugas melakukan aktivitas atau memecahkan masalah tertentu. Tugas yang diberikan ini dapat berupa serangkaian petunjuk melakukan aktivitas yang diarahkan untuk menemukan aturan-aturan tertentu, atau berupa soal-soal nonrutin yang berkaitan dengan keseharian siswa (kontekstual) yang harus diselesaikan kelompok. Dengan bekerjasama dalam kelompok, soal-soal nonrutin tersebut dapat diselesaikan secara lebih baik, bila dibandingkan dengan bekerja secara individual. Aktivitas semacam ini yang secara terus menerus dilakukan dalam setiap pembelajaran, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam hal pemecahan masalah.

(d) Kemampuan Berpikir Kritis

Selama ini pengajaran dengan model konvensional lebih menitikberatkan

pada perolehan pengetahuan konseptual dan prosedural, dan kurang memberikan perhatian pada pengembangan kemampuan berpikir. Dalam pembelajaran dengan menggunakan model resik, siswa dihadapkan dengan banyak masalah yang harus dipecahkan, siswa dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang berpikir siswa. Pertanyaan-pertanyaan seperti: mengapa, bagaimana dan sebagainya akan merangsang siswa untuk berpikir lebih keras. Dengan demikian, belajar dengan menggunakan model resik ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Berpikir merupakan proses yang melibatkan operasi (aktivitas) mental seperti induksi, deduksi, klasifikasi, dan penalaran. Berpikir merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasar pada inferensi atau pertimbangan yang seksama. Salah satu kemampuan berpikir yang dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran matematika dengan menggunakan model resik adalah kemampuan berpikir kritis. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran dengan model ini, siswa selalu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ”mengapa”, “bagaimana”, yang kontekstual, sehingga dapat merangsang dan menuntut berpikir siswa secara cermat dan komprehensif. Siswa tidak hanya diharapkan dapat menyelesaikan salah satu masalah, tetapi juga memahami langkah-langkah pemecahan masalah dan mengetahui mengapa memilih strategi pemecahan masalah tersebut.

Berpikir kritis merupakan suatu keterampilan berpikir yang bermanfaat dalam banyak situasi kehidupan. Menurut Ennis, berpikir kritis merupakan berpikir reflektif yang terfokus dan memutuskan apakah meyakini atau melakukan sesuatu (1996:123). Dari definisi menurut Ennis ini dapat diungkapkan beberapa hal penting. *Pertama*, berpikir kritis merupakan kegiatan reflektif. Sering tujuannya tidak untuk menyelesaikan masalah tetapi lebih pada pemahaman terbaik terhadap masalah. *Kedua*, berpikir kritis juga merupakan kegiatan yang terfokus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berpikir, tetapi dalam berpikir tentang sesuatu, kita ingin memahami sepenuhnya. *Ketiga*, tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi sedemikian sehingga pada akhirnya memungkinkan kita untuk membuat keputusan. *Keempat*, tidak serupa pemecahan masalah, konten dari berpikir kritis kita merupakan suatu keyakinan atau suatu alasan bagi keinginan kita untuk menyelesaikan sepenuhnya.

(e) Keterampilan Kooperatif

Keterampilan kooperatif merupakan suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan saat ini. Bagaimanapun keterampilan ini dibutuhkan setiap orang, karena kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan siswa setiap hari tidak dapat dipisahkan dengan orang lain, di rumah ia hidup dan berinteraksi dengan sesama anggota keluarga, di lingkungan ia hidup dan berinteraksi dengan tetangganya atau teman-temannya, di sekolah ia hidup dan berinteraksi dengan guru dan

teman-temannya. Kenyataan juga menunjukkan bahwa keterampilan kooperatif siswa saat ini terasa kurang. Arends mengemukakan bahwa banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Situasi ini dibuktikan dengan begitu seringnya terjadi pertikaian kecil antara individu sehingga dapat mengakibatkan tindak kekerasan, atau betapa sering orang menyatakan ketidakpuasan pada saat diminta untuk bekerja dalam situasi kooperatif.

Pembelajaran dengan menggunakan model resik memberikan kesempatan kepada siswa dengan berbagai latar belakang kemampuan dan kondisi sosial yang berbeda untuk bekerjasama, saling tergantung dan belajar saling menghargai satu dengan lainnya. Kondisi semacam ini memungkinkan berkembangnya keterampilan-keterampilan untuk bekerja sama yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Arends menyebut keterampilan-keterampilan ini sebagai keterampilan sosial. Keterampilan-keterampilan ini dapat pula disebut sebagai keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif merupakan keterampilan khusus yang diperlukan dan dapat dikembangkan melalui pembelajaran dengan menggunakan model resik. Keterampilan ini berfungsi untuk mengembangkan komunikasi antar anggota kelompok dan meningkatkan peran dan kerjasama dalam kelompok.

(f) Kemampuan Komunikasi Matematika

Komunikasi matematika merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran matematika. Komunikasi dalam matematika merupakan salah satu kemampuan dasar umum yang perlu diupayakan peningkatannya seperti halnya kemampuan dasar umum lainnya, yakni kemampuan penalaran dan kemampuan pemecahan masalah. Komunikasi matematika yang dimaksudkan di sini adalah peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan di mana terjadi penyampaian dan penerimaan pesan-pesan matematika di dalam suatu lingkungan kelas. Pesan-pesan matematika di sini berkaitan dengan materi matematika yang sementara dipelajari siswa dalam pembelajaran. Cara penyampaian atau pengalihan pesan ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model resik, siswa tidak hanya difasilitasi untuk dapat mengkonstruksikan pengetahuan dan memecahkan masalah, tetapi siswa juga diarahkan untuk dapat menjelaskan hasil konstruksi pengetahuan dan hasil pemecahan masalah yang diperolehnya. Sebaliknya siswa lain diharapkan dapat merespons dengan melakukan koreksi-koreksi dengan argumentasi logis terhadap hasil konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah tersebut. Dengan melakukan proses semacam ini secara terus menerus, dapat diharapkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa dapat meningkat.

(2) Dampak Pengiring

(a) Kemandirian atau Otonomi Dalam Belajar

Dalam pembelajaran dengan menggunakan model resik, siswa tidak menerima informasi (pengetahuan) secara pasif dari gurunya, tetapi siswa berupaya sendiri melalui aktivitas kelompok untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut. Kondisi semacam ini akan menumbuhkan kemandirian atau otonomi siswa dalam belajar. Siswa tidak lagi menjadi orang yang pasif menunggu transfer pengetahuan dari gurunya, tetapi akan lebih aktif mencari, mempelajari dan mengkonstruksi pengetahuan melalui kelompok-kelompok kecil.

(b) Sikap Positif terhadap Matematika

Dalam model resik, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran, baik dalam mempelajari bahan ajar, mengkonstruksi pengetahuan sendiri, maupun dalam mengerjakan aktivitas *hands-on* dan memecahkan masalah. Kondisi ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga kesan matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan menakutkan sedikit demi sedikit dapat diubah. Dengan demikian belajar matematika dengan menggunakan model resik juga akan dapat menumbuhkan sikap positif terhadap matematika.

Pendekatan Saintifik

Proses pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah (untuk pelaksanaan Kurikulum 2013) diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses beserta lampirannya. Dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tentang konsep dasar mengenai proses pembelajaran yaitu bahwa peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Sejalan dengan pandangan tersebut, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Selanjutnya, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Atas dasar konsep dasar tersebut dirumuskan sejumlah prinsip pembelajaran, antara lain: 1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; 4) dari pembelajaran berbasis konten

menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); 9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); 11) pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; 12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; dan 13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Sejalan dengan konsep dasar dan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Dalam Permendikbud No. 103 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas lima langkah kegiatan belajar yakni mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengumpulkan informasi/mencoba (*experimenting*), menalar atau mengasosiasi (*associating*), mengomunikasikan (*communicating*) yang dapat dilanjutkan dengan mencipta.

- a. **Mengamati.** Peserta didik menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Fenomena yang diamati pada mata pelajaran satu dan lainnya berbeda. Misalnya, untuk mata pelajaran IPA, Peserta didik mengamati pelangi, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Peserta didik mendengarkan percakapan, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Peserta didik membaca teks, untuk prakarya Peserta didik mencicipi iga bakar, dan untuk mata pelajaran IPS Peserta didik mengamati banjir. Siswa dapat mengamati fenomena secara langsung maupun melalui media audio visual. Hasil yang diharapkan dari langkah pembelajaran ini adalah Peserta didik menemukan masalah, yaitu *gap of knowledge* – apapun yang belum diketahui atau belum dapat lakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Pada langkah ini guru dapat membantu Peserta didik menginventarisasi segala sesuatu yang belum diketahui (*gap of knowledge*) tersebut. Agar kegiatan mengamati dapat berlangsung dengan baik, sebelum pembelajaran dimulai guru perlu menemukan/ mempersiapkan fenomena yang diamati Peserta didik dan merancang kegiatan pengamatan untuk Peserta didik menemukan masalah.

- b. **Menanya.** Peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban berupa pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan Peserta didik yang relevan dengan indikator-indikator KD. Guru Membantu Peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu/ingin diketahui agar dapat melakukan/menciptakan sesuatu.
- c. **Mengumpulkan informasi/mencoba.** Peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati obyek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran, dan sumber lain di antaranya buku referensi, kamus, ensiklopedia, media masa, atau serangkaian data statistik. Guru menyediakan sumber-sumber belajar, lembar kerja (*worksheet*), media, alat peraga/peralatan eksperimen, dan sebagainya. Guru juga membimbing dan mengarahkan Peserta didik untuk mengisi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai Peserta didik memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Peserta didik rumuskan.
- d. **Menalar/mengasosiasi.** Peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah ini guru mengarahkan agar Peserta didik dapat menghubungkan-hubungkan data/informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada langkah *menanya*.
- e. **Mengomunikasikan.** Peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan- pertanyaan mereka ke kelas secara lisan dan/atau tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini Peserta didik dapat juga memajang/memamerkan hasilnya di ruang kelas, atau mengunggah (*upload*) di blog yang dimiliki. Guru memberikan umpan balik, meluruskan, memberikan penguatan, serta memberikan penjelasan/informasi lebih luas. Guru membantu peserta didik untuk menentukan butir-butir penting dan simpulan yang akan dipresentasikan, baik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Melalui pendekatan pembelajaran saintifik dikembangkan kecakapan abad ke-21 meliputi literasi, kompetensi, pengembangan karakter.

Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*)

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka (*open-ended*) untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang jarang menggunakan masalah nyata atau menggunakan masalah nyata hanya di tahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah.

Tabel 2.3. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Langkah	Deskripsi
Langkah 1 Klarifikasi Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru menyajikan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Bentuknya bisa berupa gambar, teks, video, <i>vignettes</i>, fenomena riil, dan sebagainya. ● Peserta didik melakukan identifikasi terhadap fenomena yang ditampilkan guru untuk menemukan masalah dari fenomena yang ditampilkan. ● Peserta didik melakukan klarifikasi terhadap masalah yang ditemukan (cinta kebenaran)
Langkah 2 <i>Brainstorming</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Peserta didik mengidentifikasi masalah dan melakukan <i>brainstorming</i> dengan fasilitasi guru ● Guru memfasilitasi Peserta didik untuk mengklarifikasi fakta, konsep, prosedur dan kaidah dari masalah yang ditemukan. ● Peserta didik melakukan <i>brainstorming</i> dengan cara <i>sharing information</i>, klarifikasi informasi dan data tentang masalah yang ada, melakukan peer learning dan bekerjasama (<i>working together</i>) ● Peserta didik mendapatkan deskripsi dari masalah, apa saja yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan masalah, deskripsi konsep yang sudah dan belum diketahui, menemukan penyebab masalah, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah. ● Peserta didik mengembangkan alternatif penyelesaian masalah ● Peserta didik menyusun dan mengembangkan <i>action plan</i> untuk penyelesaian masalah. (kerja keras, kreatif, kerja sama)

Langkah	Deskripsi
Langkah 3 Pengumpulan Informasi dan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan penyelesaian masalah, perpustakaan, web, dan berbagai sumber data yang lain serta melakukan observasi. • Peserta didik secara mandiri mengolah hasil pengumpulan informasi/data untuk dipergunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah (kerja keras dan kreatif)
Langkah 4 Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi Penyelesaian Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik kembali melakukan brainstorming, klarifikasi informasi, konsep dan data terkait dengan permasalahan yang ada dan menemukan solusinya, melakukan <i>peer learning</i> dan bekerjasama (<i>working together</i>). • Peserta didik merumuskan dan menetapkan solusi (pemecahan masalah). • Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian masalah. (kerjasama, kreatif)
Langkah 5 Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil brainstormingnya tentang solusi yang dikemukakan untuk penyelesaian masalah. • Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. • Peserta didik mereviu, menganalisis, mengevaluasi dan refleksi terhadap pemecahan masalah yang ditawarkan beserta reasoningnya dalam diskusi kelas. • Peserta didik melakukan perbaikan berdasarkan hasil diskusi. (keberanian dan cinta kebenaran)
Langkah 6 Refleksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengemukakan ulasan terhadap pembelajaran yang dilakukan. • Guru dan Peserta didik memberikan apresiasi atas partisipasi semua pihak. • Guru dan Peserta didik melakukan merefeksi atas kontribusi setiap orang dalam proses pembelajaran. • Guru dan Peserta didik merayakan. (Menghargai)

Berikut adalah beberapa contoh masalah nyata yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah. “Dalam keadaan darurat seseorang harus diselamatkan melalui pintu jendela yang tingginya 4 m dengan menggunakan tangga. Dengan pertimbangan keselamatan, tangga tersebut harus ditempatkan minimum 1 m dari dasar bangunan. Berapa panjang tangga yang mungkin?”

Pembelajaran *Creative Problem Solving*

Menurut Mitchell dan Kowalik (Trisna, 2016) metode pembelajaran *creative problem solving* adalah suatu cara berpikir dan bertindak dalam memecahkan suatu permasalahan. Kreatif (*creative*) adalah suatu ide dasar yang bersifat asli

(orisinil), inovatif, efektif, dan kompleks untuk menghasilkan suatu solusi yang memiliki nilai dan relevansi. Masalah (*problem*) adalah kesenjangan antara situasi nyata dengan kondisi yang diinginkan, situasi yang memiliki tantangan, dan mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban. Pemecahan (*solving*) dalam hal ini pemecahan masalah adalah penemuan jawaban dari masalah yang dihadapi. Jadi *creative problem solving* adalah suatu proses, metode atau sistem untuk mendekati suatu masalah dengan cara yang efektif dan efisien.

Metode pembelajaran *creative problem solving* (pemecahan masalah secara kreatif) dalam penyelesaian problematik maksudnya adalah segala cara yang dikerahkan oleh seseorang dalam berpikir kreatif, dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Dalam implementasinya, metode *creative problem solving* dilakukan melalui solusi kreatif. *Creative problem solving* dibangun atas tiga macam komponen penting, yaitu: ketekunan, masalah dan tantangan. Metode *Creative problem solving* berusaha mengembangkan pemikiran divergen, berusaha mencapai berbagai alternatif dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, dalam implementasinya pun lebih banyak menempatkan para pendidik sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator belajar baik secara individu maupun secara berkelompok.

Metode pembelajaran *creative problem solving* merupakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Hal tersebut terjadi karena metode kreatif pembelajaran *creative problem solving* memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk memecahkan masalah dengan strateginya sendiri. Metode pembelajaran *creative problem solving* merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada masalah yang menekankan dalam keseimbangan antara pemikiran divergen dan pemikiran konvergen selain itu metode pembelajaran *creative problem solving* juga dapat meningkatkan aktifitas dan berpikir kreatif siswa serta berpikir kritis dalam proses pembelajarannya (Hariawan, 2017).

Metode yang dapat membangkitkan kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah sekaligus dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa adalah metode pembelajaran *creative problem solving* yang merupakan suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan kreativitas (Karen, 2003:1). Dengan metode ini diharapkan ketika siswa dihadapkan dengan suatu masalah, mereka dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Hal tersebut dapat dilakukan tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, akan tetapi keterampilan memecahkan masalah juga dapat memperluas proses berpikir.

Menurut Pepkin (Apri, 2012) metode *creatif problem solving* adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan

keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan suatu masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal, keterampilan memecahkan masalah dapat juga memperluas proses berpikir. Program pembelajaran *creative problem solving* memberikan pengaruh yang relevan terhadap keterampilan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa (Cetinkaya, 2013)

Metode *creative problem solving* merupakan representasi dimensi-dimensi proses yang alami, bukan suatu usaha yang dipaksakan. metode *creative problem solving* merupakan pendekatan yang dinamis, siswa menjadi lebih terampil sebab siswa mempunyai prosedur internal yang lebih tersusun dari awal. Ada banyak kegiatan yang melibatkan kreatifitas dalam pemecahan masalah seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang kreatif. Dengan metode *creative problem solving*, siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran, metode *creative problem solving* memperluas proses berpikir.

Dalam metode pembelajaran *creative problem solving* terdapat tahap-tahap yang secara operasional menggambarkan proses berpikir kreatif. Pada tahap pertama dan kedua merupakan langkah dalam sintesis ide, tahap ketiga dan keempat merupakan langkah dalam pembangkitan ide, sedang tahap kelima dan keenam merupakan langkah penerapan ide dalam mengajukan masalah. Dua metode tersebut dipilih untuk digunakan karena lebih operasional dan sesuai dengan proses berpikir dalam mengajukan masalah (Tatag, 2004)

Menurut Daties (2010) ada beberapa alasan memilih metode *creative problem solving* dalam pembelajaran yang selanjutnya dapat pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, metode *creative problem solving* termasuk kedalam metode pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik, dimana yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa (*student centered*) sehingga metode tersebut dianggap mampu mengaktifkan siswa.

Dengan demikian akan diperoleh hasil pembelajaran yang maksimum. Kedua, metode pembelajaran *creative problem solving* dapat digunakan pada siswa dengan kemampuan intelektual beragam, sehingga tidak perlu memisahkan antara anak yang cerdas dan anak yang memiliki kemampuan intelektual menengah ke bawah. Sehingga mereka tidak merasa “terpinggirkan”. Ketiga, metode *creative problem solving* tidak hanya terbatas pada tingkat pengenalan, pemahaman dan penerapan sebuah informasi, melainkan juga melatih siswa untuk dapat menganalisis suatu masalah dan memecahkannya. Keempat, metode pembelajaran *creative problem solving* mudah dipahami dan diterapkan dalam setiap jenjang pendidikan dan tiap materi pembelajaran (Putri, 2013).

Gamze., dkk (2008) mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan metode

creative problem solving secara efektif dapat meningkatkan prestasi belajar, kemampuan pemecahan masalah dan strategi penggunaannya. Penelitian yang dilakukan oleh Daties (2010) menyimpulkan bahwa metode pembelajaran *creative problem solving* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2011) menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran *creative problem solving* secara signifikan dapat lebih meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan pemecahan masalah siswa dibandingkan dengan penggunaan metode pembelajaran konvensional.

Metode *creative problem solving* menuntut siswa mendapat pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pembelajaran melalui kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah. Melalui kegiatan demonstrasi yang dilakukan semua siswa dapat melatih keterampilan siswa. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa sebagian siswa sangat setuju dengan pernyataan bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh siswa dalam metode *creative problem solving* dapat melatih keterampilan siswa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Prayogo (2011) siswa setuju bahwa pembelajaran dengan metode *creative problem solving* memfasilitasi siswa dalam menguasai konsep dan memecahkan masalah. Tahap-tahap dalam metode pembelajaran *creative problem solving* dapat memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri suatu konsep dan kerja sama siswa dalam kelompok. Dengan dikuasai konsep melalui konstruksi pengetahuan sendiri maka konsep tersebut akan bertahan lebih lama dalam struktur kognitif siswa.

Menurut Suyatno (2009: 66) menyatakan bahwa metode *creative problem solving* ini juga merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematis dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam menerapkan metode pembelajaran *creative problem solving* perlu didukung dengan kelebihan yang dimiliki oleh metode tersebut untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Adapun kelebihan metode *creative problem solving* menurut Djamarah dalam (Indra, 2014) antara lain: (a) metode pembelajaran *creative problem solving* dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja, (b) proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, dan bekerja kelak, suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia, (c) metode pembelajaran dengan *creative problem solving* merangsang pengembangan kemampuan berfikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecah.

Dalam menopang penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe *creative*

problem solving, perlu adanya sarana dan media dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Metode pembelajaran *creative problem solving* merupakan segala cara yang dikerahkan oleh siswa dalam berpikir kreatif dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif (Sujarwo, 2011: 178). Solusi yang diberikan untuk memecahkan masalah adalah solusi kreatif. Solusi kreatif dalam pemecahan masalah dilakukan melalui sikap dan pola pikir kreatif, banyak alternatif pemecahan masalah, ide baru dalam pemecahan masalah, terbuka dalam perbaikan, menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian menyampaikan pendapat, berpikir divergen, dan fleksibel dalam upaya pemecahan masalah. Metode pembelajaran *creative problem solving* didasari oleh ketekunan, masalah, dan tantangan yang dapat diimplementasikan dalam komponen pembelajaran (Ninu, 2016).

Metode pembelajaran pemecahan masalah dalam hal ini metode pembelajaran pemecahan masalah kreatif (*creative problem solving*) adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran pemecahan masalah dan keterampilan memecahkan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan memecahkan masalah tersebut. Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir, berpendapat bahwa pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah dapat merangsang keterampilan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis diperlukan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh keputusan yang cepat dan tepat.

Macam-macam Pembelajaran dengan *Problem Solving*

Salah satu pengembangan dari pembelajaran *problem solving* ini adalah metode pembelajaran *creative problem solving*. Pembelajaran *creative problem solving* merupakan suatu kegiatan yang didesain guru dalam rangka memberi tantangan kepada siswa melalui penugasan. Fungsi guru adalah memotivasi siswa agar mau menerima tantangan dan membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah. Masalah yang diberikan kepada siswa harus masalah yang pemecahannya terjangkau oleh kemampuan siswa.

Metode pembelajaran *creative problem solving* adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah, yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika dihadapkan dengan suatu pertanyaan/permasalahan, siswa dapat melakukan

keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir (Pepkin dalam Muslich M, 2007: 221).

Metode pembelajaran *creative problem solving* cocok digunakan dalam peningkatan kemampuan memecahkan masalah karena dalam metode pembelajaran ini pengalaman sebelumnya dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan masalah baru yang berbeda, disamping faktor minat siswa. Macam-macam pengembangan dari pembelajaran *problem solving* adalah metode pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah.

Langkah-langkah Pembelajaran *Creative Problem Solving*

Metode Pembelajaran *creative problem solving* adalah suatu metode pembelajaran yang berpusat pada keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan kreatifitas. Ketika dihadapkan dengan situasi pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir

Ada banyak kegiatan yang melibatkan kreatifitas dalam pemecahan masalah seperti riset dokumen, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan penulisan yang kreatif. Dengan metode *creative problem solving*, siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan pemikirannya. Berbeda dengan hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran, *creative problem solving* justru dapat memperluas proses berpikir.

Rini (2014) menjelaskan bahwa Langkah-langkah *creative problem solving* dalam pembelajaran: 1) Klarifikasi masalah, yaitu pemberian penjelasan kepada siswa tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian yang diharapkan; 2) Pengungkapan gagasan, yaitu siswa dibebaskan untuk mengungkapkan gagasan tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah; 3) Evaluasi dan seleksi, yaitu setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi yang cocok untuk menyelesaikan masalah; dan 4) Implementasi, yaitu siswa menentukan strategi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah, diharapkan dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar.

Secara umum fundamental dari pemecahan masalah kreatif adalah keseimbangan yang dinamis antara pemikiran divergen dan konvergen. Dalam

model pembelajaran *creative problem solving*, siswa dilatih untuk memikirkan berbagai macam solusi yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, mengumpulkannya, dan akhirnya menemukan satu fokus solusi yang tepat untuk diimplementasikan dalam memecahkan suatu masalah secara kreatif. Secara umum sintaks pembelajaran *creative problem solving* adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sintaks Pembelajaran *Creative Problem Solving*

Fase	Prinsip Reaksi
Klarifikasi Masalah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan penjelasan kepada siswa apabila mengalami kesulitan tentang masalah yang diajukan. ▪ Siswa mengklarifikasi masalah dan merumuskan masalah dalam kalimat sederhana. ▪ Guru membantu memberikan penjelasan kepada siswa apabila mengalami kesulitan tentang masalah yang diajukan agar siswa dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan.
Pengungkapan Pendapat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah. ▪ Guru mengarahkan agar siswa berdiskusi di dalam kelompoknya dan setiap anggota kelompok bebas mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah.
Evaluasi dan Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat yang cocok untuk menyelesaikan masalah. ▪ Siswa meninjau kembali pendapatnya dengan memberikan penjelasan dari setiap pendapat yang diungkapkan dengan demikian dapat dicoret strategi/cara/penyelesaian yang kurang relevan ▪ Memilih alternatif terbaik yang digunakan sebagai solusi. ▪ Siswa menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang kritis, selektif, dengan berpikir secara konvergen. ▪ Siswa memilih alternatif terbaik yang digunakan sebagai solusi.
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. ▪ Siswa mengimplementasikan pendapat yang dipilih untuk diterapkan sampai ditemukan pemecahan masalah yang diharapkan.

(Sumber: Pepkin, K. 2000)

Langkah tersebut memandu pada sebuah proses kreatif. Pada langkah pertama melibatkan suatu tahap pemikiran divergen yang menghasilkan sejumlah ide atau gagasan (fakta, definisi masalah, gagasan, kriteria evaluasi, strategi

implementasi), dan kemudian suatu tahap konvergen yang memilih hanya sebuah gagasan untuk eksplorasi lebih lanjut. Sementara itu, menurut Tarumingkeng dalam Apri (2012), orang-orang yang kreatif menggunakan informasi sebagai alat dan sumber untuk berpikir kreatif (membangkitkan ide baru). Kunci dalam *creative problem solving* adalah bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk pemecahan masalah. Dalam proses *creative problem solving* diperlukan *attitude* (sikap) mencari ide baru dan dalam proses itu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Perlu perubahan cara pandang (*perspective*) dan gunakan pengetahuan untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Langkah-langkah *creative problem solving* dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Objective finding*; Pada tahap pertama dari metode *creative problem solving* ini ialah mencari dan menemukan sasaran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang situasi termasuk tantangan, permasalahan, serta peluang.
- b. *Fact finding*; Dalam tahap kedua ini adalah mencari dan menemukan fakta serta menyelidiki semua informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang sasaran yang ingin diidentifikasi.
- c. *Problem finding*; Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perumusan masalah untuk melokalisasi masalah yang sebenarnya sehingga dibutuhkan solusi dalam masalah tersebut. Fakta yang sebenarnya memungkinkan ini dan dapat memberikan data-data pendukung.
- d. *Idea finding*; Tahap ini dilaksanakan dengan cara mencari semua solusi untuk setiap masalah sehingga menghasilkan sejumlah ide-ide yang dapat diajukan ke tahap berikutnya. Ide-ide akan bermunculan dan jangan terlebih dahulu mengeliminasi solusi-solusi yang mungkin sebelum solusi-solusi ini terlebih dahulu didiskusikan.
- e. *Solution finding*; Tahap *solution finding* merupakan tahap mencari dan menemukan penyelesaian, menampilkan kriteria yang dapat dipikirkan kemudian memilih yang terbaik diantaranya.
- f. *Acceptance finding*; Dalam tahap ini adalah menerapkan solusi yang dipilih menjadi langkah-langkah tindakan yang potensial.
- g. *Evaluation*; Pada tahap terakhir ini adalah uji solusi terhadap hasil yang diinginkan dan mengadakan revisi jika perlu.

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-based Learning*)

Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penekanan pembelajaran

terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan **produk** dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi/prakarya, dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata.

Tabel 2.5 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Proyek

Langkah-langkah	Deskripsi
Langkah -1 Penentuan proyek	Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema/topik proyek
Langkah -2 Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek	Guru memfasilitasi Peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolannya Kreatif
Langkah -3 Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek	Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya komitmen atas keputusan bersama
Langkah -4 Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru	Guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat kerja keras
Langkah -5 Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek	Guru memfasilitasi Peserta didik untuk mempresentasikan dan keberanian mempublikasikan hasil karya
Langkah -6 Evaluasi proses dan hasil proyek	Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek menjadi pembelajar sepanjang hayat

Pembelajaran *Inquiry/Discovery*

Dalam Permendikbud No.22 tahun 2016 dikatakan pembelajaran *inquiry* disebut bersama dengan *discovery*. Dalam Webster’s Collegiate Dictionary *inquiry* didefinisikan sebagai “bertanya tentang” atau “mencari informasi”. *Discovery* disebut sebagai “tindakan menemukan”. Jadi, pembelajaran ini memiliki dua proses utama. **Pertama**, melibatkan Peserta didik dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan (*to inquire*), dan **kedua**, Peserta didik menyingkap, menemukan (*to discover*) jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis (Sutman, et.al., 2008:x).

Inquiry/discovery merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukan sekedar sekumpulan fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan atau mengkonstruksi. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan (*inquiry*) agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri (*discovery*). Tujuan pertama *Inquiry/Discovery Learning* adalah agar peserta didik mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan *apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa*, dan sebagainya. Dengan kata lain, *Inquiry/Discovery Learning* bertujuan untuk membantu peserta didik berpikir secara analitis. Tujuan kedua adalah untuk mendorong peserta didik agar semakin berani dan kreatif berimajinasi. Dengan imajinasi peserta didik dibimbing untuk mengkreasi sesuatu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Penemuan ini dapat berupa perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang telah ada, maupun menciptakan ide, gagasan, atau alat yang belum ada (Anam, 2015:9).

Proses mengumpulkan data, mengamati, dan meringkas informasi, khususnya data numerik dalam *Inquiry/Discovery Learning*, efektif dalam merangsang diskusi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diinginkan. Peserta didik perlu mengalami bagaimana menarik simpulan ilmiah berdasarkan pengamatan atas fakta-fakta dan sekumpulan data yang diperoleh.

Lima Langkah dalam *Inquiry/Discovery Learning*

Pada dasarnya sintaks *Inquiry/Discovery Learning* meliputi lima langkah seperti nampak dalam Tabel 2.6 di bawah ini (Sutman, et.al.2008:52).

Tabel 2.6 Langkah-Langkah Pembelajaran *Inquiry/Discovery Learning*

Langkah-langkah	Deskripsi
1. Merumuskan pertanyaan	Merumuskan pertanyaan, masalah, atau topik yang akan diselidiki. menjadi pembelajar sepanjang hayat, ingin tahu
2. Merencanakan	Merencanakan prosedur atau langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. kerja keras
3. Mengumpulkan dan menganalisis data	Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta, maupun data, dilanjutkan dengan kegiatan menganalisisnya. kerja keras
4. Menarik simpulan	Menarik simpulan-simpulan (jawaban atau penjelasan ringkas) cinta kebenaran

Langkah-langkah	Deskripsi
5. Aplikasi dan Tindak lanjut	Menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk dicari jawabnya. menjadi pembelajar sepanjang hayat, ingin tahu

Menurut Sutman, lima langkah di atas merupakan langkah umum, yang bisa dibedakan menjadi lima level yang mencerminkan kadar atau derajat aktivitas peserta didik. Sutman mulai dengan level 0 yang mencerminkan derajat keterlibatan peserta didik yang rendah karena lima langkah di atas sepenuhnya dilakukan dan dikontrol oleh guru, bukan peserta didik. Berturut-turut, pada level 1 guru menyerahkan langkah pertama kepada peserta didik sampai dengan level 5, ketika kelima langkah di atas sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru (Sutman, *et.al.*, 2008:39-52).

Pendekatan “ICARE”

Dalam penyusunan perangkat pembelajaran tiap pelajaran untuk belajar aktif, digunakan satu kerangka yang sangat sederhana, yaitu disebut ICARE. Sistem ICARE mencakup lima elemen kunci suatu pengalaman belajar yang baik, yang dapat diterapkan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, sistem ICARE sangat baik untuk diterapkan dalam proses belajar di sekolah. ICARE adalah singkatan dari: *Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension*. Penggunaan sistem ICARE sangat memberi peluang kepada peserta didik untuk memiliki kesempatan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan. Namun juga harus diingat bahwasanya perangkat tersebut harus memenuhi aturan sesuai dengan standar proses yang terdapat dalam Permendiknas No 41 tahun 2007 dan Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut terdapat langkah-langkah pembelajaran yang memberikan ruang lebih besar kepada siswa untuk melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi maupun kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba dan mengomunikasikan. Di samping itu juga memasukkan pendidikan budaya karakter bangsa dan kewirausahaan. Berikut ini dijelaskan secara rinci kerangka ICARE. ICARE meliputi lima unsur kunci dari pengalaman pembelajaran anak-anak, remaja dan dewasa yaitu *Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension*. Penggunaan sistem ICARE untuk memastikan bahwa para peserta memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari.

I = Introduction (Pendahuluan)

Pada tahap pengalaman belajar ini guru atau fasilitator menetapkan materi pelajaran kepada peserta didik. Ini harus mencakup menyiapkan peserta didik

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, penjelasan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan materi serta penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

C = Connection (Koneksi)

Koneksi merupakan tahap pengkaitan antara pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Dalam banyak hal, proses belajar itu berurutan (*sequential*) dengan membangun suatu kompetensi di atas suatu kompetensi sebelumnya. Karena itu, semua pengalaman belajar yang baik harus dimulai dari apa yang peserta didik telah tahu dan dapat dilakukan serta dapat dibangun di atasnya. Pada tahap *connection* pembelajaran guru mencoba mengaitkan materi pembelajaran yang baru dengan pengalaman belajar sebelumnya. Guru dapat mencapainya dengan melakukan latihan *brainstorming* sederhana untuk mengenali apa yang telah diketahui peserta didik, dengan meminta peserta didik mengatakan kepada guru apa yang mereka ingat dari pembelajaran sebelumnya atau dengan mengembangkan suatu kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri. Dengan mengikuti hal ini guru menghubungkan peserta didik dengan materi yang baru. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tahap ini dilakukan tidak terlalu lama menghabiskan waktu. Paling lama waktu digunakan sekitar sepuluh menit.

A = Application (Penerapan)

Aplikasi merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Setelah peserta didik memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru melalui tahap *connection*, mereka perlu diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan itu. Bagian penerapan haruslah menjadi bagian pembelajaran yang paling lama tatkala peserta didik secara berpasangan atau berkelompok bekerja secara mandiri dibawah pengarahan guru untuk melengkapi suatu kegiatan dari kehidupan nyata atau memecahkan suatu masalah kehidupan nyata dengan menggunakan informasi dan keterampilan baru yang telah dicapai.

R = Reflection (Refleksi)

Refleksi merupakan tahap membuat ringkasan (*summary*) pembelajaran di mana peserta didik mendapat kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari bersama dengan guru untuk menilai pencapaian dirinya terhadap materi pelajaran. Refleski dapat dilakukan melalui diskusi kelompok dimana guru meminta peserta didik membuat presentasi atau menjelaskan apa yang telah dipelajari. Kegiatan ini pun dapat dilakukan melalui kegiatan menulis ringkasan dari apa yang telah dipelajari secara individual atau melalui kuis singkat dimana guru mengajukan pertanyaan berdasarkan materi pelajaran. Pada kegiatan ini guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik mengemukakan tentang apa yang mereka telah pelajari.

E = *Extension* (Perluasan)

Perluasan merupakan pengembangan lebih lanjut dari pembelajaran yang telah diterima oleh peserta didik dan harus dilakukan oleh mereka. Karena pembelajaran tertentu telah selesai bukan berarti bahwa semua yang telah dipelajari peserta didik otomatis dapat mereka pahami atau gunakan. Oleh karena itu, guru harus memberi kegiatan sebagai kelanjutannya. Tahap *extension* pembelajaran diterapkan melalui pemberian kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik sebagai tindak lanjut pembelajaran untuk memperkuat (*reinforce*) dan memperluas pembelajaran. Di sekolah kegiatan-kegiatan *extension* dapat dijadikan sebagai pekerjaan rumah (PR). Kegiatan-kegiatan *extension* dapat meliputi pemberian bahan bacaan tambahan dan tugas melakukan penelitian atau latihan.

Model Pembelajaran “SAVI”

SAVI singkatan dari Somatic, Auditori, Visual dan Intektual. Teori yang mendukung pembelajaran SAVI adalah *Accelerated Learning*, teori otak kanan/kiri; teori otak triune; pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinestetik); teori kecerdasan ganda; pendidikan (*holistic*) menyeluruh; belajar berdasarkan pengalaman; belajar dengan simbol. Pembelajaran SAVI menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda. Mengkaitkan sesuatu dengan hakikat realitas yang nonlinear, nonmekanis, kreatif dan hidup.

Dikarenakan pembelajaran SAVI sejalan dengan gerakan *Accelerated Learning* (AL), maka prinsipnya juga sejalan dengan AL yaitu: 1) pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, 2) pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi, 3) kerjasama membantu proses pembelajaran, 4) pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan, 5) belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik, 6) emosi positif sangat membantu pembelajaran, dan 7) otak menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Sesuai dengan singkatan dari SAVI sendiri yaitu Somatic, Auditori, Visual dan Intektual, maka karakteristiknya ada empat bagian yaitu:

a. Somatic

”Somatic” berasal dari bahasa Yunani yaitu tubuh – soma. Jika dikaitkan dengan belajar maka dapat diartikan belajar dengan bergerak dan berbuat. Sehingga pembelajaran somatic adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh (indera peraba, kinestetik, melibatkan fisik dan menggerakkan tubuh sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung).



b. Auditori

Belajar dengan berbicara dan mendengar. Pikiran kita lebih kuat daripada yang kita sadari, telinga kita terus menerus menangkap dan menyimpan informasi bahkan tanpa kita sadari. Ketika kita membuat suara sendiri dengan berbicara beberapa area penting di otak kita menjadi aktif. Hal ini dapat diartikan dalam pembelajaran siswa hendaknya mengajak siswa membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, menerjemahkan pengalaman siswa dengan suara. Mengajak mereka berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, membuat rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan pengalaman belajar, atau menciptakan makna-maknan pribadi bagi diri mereka sendiri.

c. Visual

Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dalam otak kita terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera yang lain. Setiap siswa yang menggunakan visualnya lebih mudah belajar jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seorang penceramah atau sebuah buku atau program computer. Secara khususnya pembelajar visual yang baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon dan sebagainya ketika belajar.

d. Intektual

Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan pembelajar yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Hal ini diperkuat dengan makna intelektual adalah bagian diri yang merenung, mencipta, dan memecahkan masalah. Pembelajaran SAVI dapat direncanakan dan kelompok dalam empat tahap:

Tabel 2.7 Langkah-langkah Pembelajaran Menggunakan Model “SAVI”

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
1.	<p>Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan) Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan sugesti positif ▪ Memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa ▪ Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna ▪ Membangkitkan rasa ingin tahu ▪ Menciptakan lingkungan fisik yang positif. ▪ Menciptakan lingkungan emosional yang positif ▪ Menciptakan lingkungan sosial yang positif ▪ Menenangkan rasa takut ▪ Menyingkirkan hambatan-hambatan belajar ▪ Banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah ▪ Merangsang rasa ingin tahu siswa ▪ Mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal.
2.	<p>Tahap Penyampaian (kegiatan inti). Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara menari, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra, dan cocok untuk semua gaya belajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan ▪ Pengamatan fenomena dunia nyata ▪ Pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh ▪ Presentasi interaktif ▪ Grafik dan sarana yang presentasi berwarna-warni ▪ Aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar ▪ Proyek belajar berdasar kemitraan dan berdasar tim ▪ Latihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok) ▪ Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual ▪ Pelatihan memecahkan masalah
3.	<p>Tahap Pelatihan (kegiatan inti) Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas pemrosesan siswa ▪ Usaha aktif atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali ▪ Simulasi dunia-nyata ▪ Permainan dalam belajar ▪ Pelatihan aksi pembelajaran ▪ Aktivitas pemecahan masalah ▪ Refleksi dan artikulasi individu ▪ Dialog berpasangan atau berkelompok ▪ Pengajaran dan tinjauan kolaboratif ▪ Aktivitas praktis membangun keterampilan

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi
4.	<p>Tahap penampilan hasil (kegiatan penutup) Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera ▪ Penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi ▪ Aktivitas penguatan penerapan ▪ Materi penguatan prsesi ▪ Pelatihan terus menerus ▪ Umpan balik dan evaluasi kinerja ▪ Aktivitas dukungan kawan ▪ Perubahan organisasi dan lingkungan yang mendukung

Model Resolusi Konflik (MPK)

Model resolusi konflik (MRK) merupakan suatu model pembelajaran yang didasari oleh suatu pandangan bahwa ada hubungan kausalitas antara fenomena sosial, budaya, dan kemampuan serta tanggungjawab sosial individu bagi kehidupan masyarakat secara siklus yang pada akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik dan mapan di tengah-tengah keharmonian (Montgomery, 2000).

Masyarakat dan kebudayaan (dimensi sosial) merupakan dua dimensi yang memiliki kaitan yang bersifat kausal namun mandiri. Kebudayaan tidak pernah berpisah dari masyarakat, sehingga untuk memahami kebudayaan sebagai suatu kesatuan konsep atau prinsip berarti memisahkan kebudayaan dari masyarakat tempat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan itu sendiri (Wincoff, 1988). Dalam konteks ini tampak bahwa kebudayaan (perasaan, cipta, dan karya) yang telah dipelajarinya pada bangku sekolah hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan riil peserta didik sehari-hari. Individu sebagai bagian integral dari masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk menemukan berbagai alternatif terhadap berbagai fenomena sosial yang ada dan berkembang di masyarakatnya.

Pemahaman yang memadai tentang kebudayaan dan seperangkat konflik yang ada di masyarakat merupakan sebuah kewajiban bagi kehidupan manusia, baik yang diperoleh di sekolah maupun dari interaksi sosial, akan dapat melatih peserta didik untuk bersikap dan berperilaku yang antisipatif terhadap dampak negatif yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh rasional, bahwa fenomena sosial dan kebudayaan dewasa ini telah memasuki hampir setiap aspek kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang pendidikan, untuk ini pendidikan hendaknya diposisikan dalam konteks sosial budaya, agar tidak terjadi benturan-benturan yang mengarah pada terjadinya turbulensi sosial, yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang berkepanjangan. *Dimensi konflik* yang dimaksud dalam konteks ini adalah dinamika sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia di masyarakat yang kadangkala melahirkan berbagai konflik yang dapat mengancam keutuhan dari masyarakat itn sendiri. Masyarakat dan seperangkat aturan hidup yang ada dan diadakan di tengah-tengah



masyarakat merupakan sumber dari pembelajaran civic.

Sebagai salah satu disiplin dalam tataran keilmuan dalam himpunan ilmu-ilmu sosial, *civic* pada hakikatnya adalah disiplin yang memfokuskan kajiannya pada nilai-nilai Pancasila, sosial-budaya bangsa Indonesia, hukum, politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan tata aturan bernegara, dengan berbagai fenomenanya, peserta didik diharapkan terampil dalam mencermati berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya dalam bingkai nilai, moral, prinsip, dalil, dan teori-teori pendidikan kewarganegaraan (*civic*), sehingga mereka mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebudayaan berperan dalam menjadikan kehidupan manusia dalam masyarakat lebih baik, baik dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, sehingga pengembangan kebudayaan secara substansial diarahkan pada upaya perbaikan piranti-piranti kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Model Resolusi Konflik (MRK) sebagai sebuah model pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu gerakan revolutif yang interdisipliner dalam pembelajaran civic yang dikembangkan untuk menstimulasi dan eksplorasi hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dalam balutan konflik yang multidimensi sehingga setiap orang berkewajiban memiliki pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan konflik yang ada di masyarakatnya bagi kesejahteraan umat manusia (NCSS, 2000).

Asumsi yang mendasari pengembangan dan aplikasi model resolusi konflik dalam konteks pembelajaran di dalam jenjang pendidikan formal adalah:

- a. Paham dan sadar (*literasi*) terhadap dinamika dan problema hidup merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang termasuk peserta didik dalam kehidupannya di masyarakat agar mereka mampu mengantisipasi sedini mungkin dampak dinamika kultural bagi masyarakatnya,
- b. Revolusi teknologi yang merupakan buah cipta kebudayaan, mengakibatkan perubahan-perubahan yang dramatis dalam cara hidup manusia sehari-hari, cara kerja, cara berpikir, cara merasakan, sebagaimana halnya dengan sistem kepercayaan dan nilai hidup yang mendasar,
- c. Inovasi-inovasi teknologi yang tiada terbendung dapat membawa ketakutan bagi umat manusia; di mana teknologi telah meracuni nilai-nilai original masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai benturan sosial yang merusak tatanan berkehidupan yang telah tumbuh dan tebina di masyarakat,
- d. Kini manusia memiliki hak, tanggungjawab dan kesempatan untuk berdebat dan membentuk jenis masyarakat di mana kita dan anak-anak kita hidup; kesempatan semacam ini dapat berhenti untuk berada di masa datang yang dekat dan tepat jika kita memiliki *conflict literation* yang *visible*,
- e. Orang yang tidak paham dan sadar terhadap konflik hidup dan hidup dalam konflik takut akan ketidaktahuannya dan dapat dengan mudah dimanipulasi serta tersesat, sementara orang yang paham dan sadar dengan konflik hidup dan tetap berpegang pada sistem nilai-etika yang baik mereaksi secara logis dan menilai situasi-situasi dengan ukuran bahwa: data + nilai = respon sosial dan moral secara etis serta tersosialisasikan,
- f. Kita sedang berada dalam proses menjadi dua masyarakat, yaitu humanis dan teknologis, di mana jurang di antara keduanya makin lebar; sehingga melalui model MRK diharapkan jurang tersebut tidak menjadi lebih lebar dan berbahaya, dimana setiap individu telah mahir dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut NCSS (2003), tujuan MRK pada dasarnya dimaksudkan membantu peserta didik untuk:

- a. Menyadari hubungan-hubungan yang kompleks yang ada di antara manusia dan masyarakat serta fenomena alamiah, khususnya konsekuensi-konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dan meluas dan kompleksnya konflik sosial lokal, regional, nasional, dan global.
- b. Memahami dan mengadaptasi secara lebih baik perubahan-perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari benturan sosial-budaya di

masyarakat, di mana keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan manusia merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan setiap insan di muka bumi, sehingga wajib hukumnya sekolah membelajarkan hal tersebut.

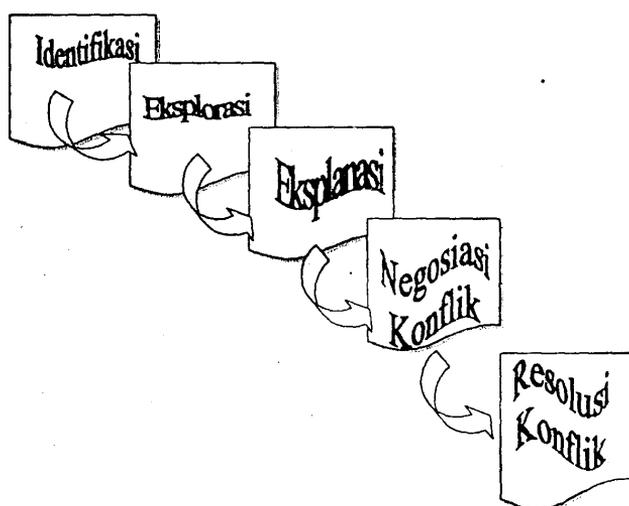
- c. Mengetahui dengan baik dan terampil dalam mengambil keputusan-keputusan sosial dan moral yang berkaitan dengan pemanfaatan unsur budaya dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut berkenaan dengan berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, transportasi, abrasi moral-budaya, nilai hidup, nilai-nilai transendental, dan pengembangan masyarakat,
- d. Secara realistis dapat memproyeksikan (memperhitungkan) masa depan alternatif dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatifnya berdasarkan nilai-nilai luhur kebudayaan, filosofi bangsa, dan konvensi nilai global.
- e. Dapat bekerja sesuai dengan masa depan yang diinginkan dan adil bagi semua manusia dengan dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan yang luhur serta dibekali dengan seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik-konflik sosial di masyarakat.

Di sisi lain, *National Commission of Social Studies (NCSS)* di USA mendefinisikan MRK sebagai “*the teaching and learning of Civic Education in the context of real societies*” (NCSS, 2000). NCSS mengajukan 10 (sepuluh) ciri model tersebut dalam konteks pembelajaran yakni:

- a. Peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah sosial-budaya kemasyarakatan di daerahnya masing-masing yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat.



- b. Pelibatan peserta didik secara aktif dalam mencari dan memformulasikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sosial masyarakatnya.
- c. Menggunakan media elektronik dan media masa lokal, regional, dan nasional untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan budaya di masyarakat.
- d. Memfokuskan pengaruh informasi tentang sosial-budaya kepada peserta didik.
- e. Perluasan batas dan waktu pembelajaran peserta didik yang melampaui batas-batas kelas dan lingkungan sekolah (*broad and deep instructional*)



Berdasarkan prosedur pembelajaran sebagaimana tampak dalam bagan di atas, maka dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn (*Civic Education*), langkah-langkah tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, tahap identifikasi, terdiri dari kegiatan: 1) menjelaskan tujuan pembelajaran sesuai dengan topik dan sub pokok bahasan yang telah diformulasikan dalam rencana pembelajaran, 2) identifikasi dan penggalian konsep awal siswa melalui tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas, khususnya yang berkaitan dengan isu atau masalah sosial-budaya terhadap kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dibahas atau disajikan, 3) memberikan contoh isu atau masalah untuk menunjukkan kepada peserta didik apa dan bagaimana menemukan isu atau masalah (konflik), 4) klarifikasi konsep dan nilai personal, khususnya yang berkaitan dengan posisi nilai peserta didik terhadap konflik sosial kemasyarakatan yang ada di masyarakat, dan 5) kegiatan tanya jawab untuk menemukan dan memformulasikan konflik secara bersama-sama dengan peserta didik, sambil melatih keterampilan berpikir mereka dalam

mengidentifikasi dan mendefinisikan konflik atau masalah sosial-kemasyarakatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

Kedua, tahap eksplorasi, yang terdiri dari kegiatan: 1) penyajian pokok-pokok materi pelajaran secara klasikal, termasuk di dalamnya mengidentifikasi konsep utama dan konflik sosial-budaya yang berkaitan dengan materi yang disajikan, 2) mengecek dan mengumpulkan data atau fakta yang tersedia dari berbagai sumber untuk mendukung pemecahan masalah yang akan dibahas, di mana guru bertindak sebagai fasilitator atau mediator pembelajaran, 3) melalui diskusi kelas, guru mengajak siswa menginventarisir kaitan antara berbagai pihak yang dipandang bertanggungjawab terhadap timbulnya masalah atau isu yang ada di masyarakat, dan 4) pengenalan cara atau prosedur menganalisis konflik/masalah termasuk konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Hal ini bertujuan untuk mengaitkan konflik/masalah sosial-budaya dengan konsep atau pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang sedang dibahas atau mengikuti pembelajaran.

Ketiga, tahap eksplanasi, yang terdiri dari kegiatan: 1) pada fase ini, dalam posisinya sebagai pembimbing atau fasilitator, guru mengarahkan peserta didik untuk merumuskan hipotesis tentang konflik/masalah yang ada, dan menemukan pihak atau lembaga yang paling bertanggungjawab atau berwenang untuk menangani konflik/masalah yang ada di masyarakat, 2) guru melakukan klarifikasi ulang terhadap konsep-konsep utama dari materi dan konflik/masalah sosial-budaya yang telah dibahas untuk memperkuat struktur kognitif peserta didik mengenai materi dan masalah yang telah dibahas, 3) guru membimbing peserta didik untuk membentuk tim kerja atau kelompok untuk membahas konflik/masalah sosial-budaya dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat, berdasarkan hipotesis yang telah diformulasikan, termasuk menjelaskan tugas/cara kerja kepada setiap tim kerja atau kelompok, dan 4) guru membimbing peserta didik untuk menguji hipotesis yang telah diformulasikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui diskusi kelompok dan/atau diskusi kelas.

Keempat, tahap negosiasi konflik, yang terdiri dari kegiatan: 1) pada fase ini, guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi peserta didik dalam membahas dan menguji hipotesis mengenai konflik/masalah dalam tim kerja atau kelompoknya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir dan keterampilan sosial peserta didik, 2) guru membimbing peserta didik dalam mencetuskan ide-ide, konsep, dan alternatif yang dimiliki untuk memecahkan konflik/masalah sosial-budaya di masyarakat, 3) membantu peserta didik dalam mengumpulkan data/informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap konflik/masalah yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peserta didik terhadap konflik/masalah sosial-budaya yang sedang dibahas, 4) penyajian laporan oleh masing-masing tim kerja dalam bentuk diskusi kelas, di mana guru bertindak

sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang aktif-kreatif, dan 5) penyimpulan hasil diskusi kelas oleh guru bersama-sama siswa secara demokratis.

Kelima, tahap resolusi konflik, yang terdiri dari kegiatan: 1) pada fase ini, peserta didik diberikan kesempatan yang leluasa untuk menentukan tindakan atau sikap yang akan dilakukan berkaitan konflik yang ada dan telah dibahas secara bersama-sama di kelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan keterampilan peserta didik terhadap pemecahan konflik/masalah sosial-budaya yang telah diputuskan, 2) membimbing dan mengawasi peserta didik dalam melakukan perumusan atau mengambil keputusan terhadap konflik yang telah dinegosiasikan, baik dalam kelompok maupun secara klasikal. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan melatih keterampilan serta ketertanggapan sosial-budaya peserta didik dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, 3) merumuskan secara definitif keputusan yang diambil berkaitan dengan konflik/masalah yang telah dibahas, serta merumuskan rekomendasi kepada berbagai pihak yang dipandang berkompeten menangani dan bertanggungjawab terhadap konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat (NCSS, 2000:12-22).



BAB III
***HIGHER ORDER
THINKING SKILLS
(HOTS) DALAM
IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013***



Pengertian *HOTS*

Soal-soal *HOTS* merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Soal-soal *HOTS* pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis *HOTS* tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal *recall*.

Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal *HOTS* mengukur dimensi metakognitif, tidak sekadar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Dimensi metakognitif menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep yang berbeda, menginterpretasikan, memecahkan masalah (*problem solving*), memilih strategi pemecahan masalah, menemukan (*discovery*) metode baru, berargumen (*reasoning*), dan mengambil keputusan yang tepat. Dimensi proses berpikir dalam Taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson & Krathwohl (2001), terdiri atas kemampuan: mengetahui (*knowing-C1*), memahami (*understanding-C2*), menerapkan (*aplying-C3*), menganalisis (*analyzing-C4*), mengevaluasi (*evaluating-C5*), dan mengkreasi (*creating-C6*).

Soal-soal *HOTS* pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis (*analyzing-C4*), mengevaluasi (*evaluating-C5*), dan mengkreasi (*creating-C6*). Pada pemilihan kata kerja operasional (KKO) untuk merumuskan indikator soal *HOTS*, hendaknya tidak terjebak pada pengelompokan KKO. Sebagai contoh kata kerja „menentukan“ pada Taksonomi Bloom ada pada ranah C2 dan C3. Dalam konteks penulisan soal-soal *HOTS*, kata kerja „menentukan“ bisa jadi ada pada ranah C5 (mengevaluasi) apabila untuk menentukan keputusan didahului dengan proses berpikir menganalisis informasi yang disajikan pada

stimulus lalu peserta didik diminta menentukan keputusan yang terbaik. Bahkan kata kerja “menentukan” bisa digolongkan C6 (mengkreasikan) bila pertanyaan menuntut kemampuan menyusun strategi pemecahan masalah baru. Jadi, ranah kata kerja operasional (KKO) sangat dipengaruhi oleh proses berpikir apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Pada penyusunan soal-soal *HOTS* umumnya menggunakan stimulus. Stimulus merupakan dasar untuk membuat pertanyaan. Dalam konteks *HOTS*, stimulus yang disajikan hendaknya bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari isu-isu global seperti masalah teknologi informasi, sains, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Stimulus juga dapat diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu. Kreativitas seorang guru sangat mempengaruhi kualitas dan variasi stimulus yang digunakan dalam penulisan soal *HOTS*.

Karakteristik *HOTS*

Soal-soal *HOTS* sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas dan Ujian Sekolah. Untuk menginspirasi guru menyusun soal-soal *HOTS* di tingkat satuan pendidikan, berikut ini dipaparkan karakteristik soal-soal *HOTS*.

1. Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi

The Australian Council for Educational Research (ACER) menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses: menganalisis, merefleksikan, memberikan argumen (alasan), menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukanlah kemampuan untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Dengan demikian, jawaban soal-soal *HOTS* tidak tersurat secara eksplisit dalam stimulus. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*), keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kemampuan berargumen (*reasoning*), dan kemampuan mengambil keputusan (*decision making*). Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik.

Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam *HOTS*, terdiri atas: a) kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar; kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda; dan b) menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya.

‘Difficulty’ is NOT same as higher order thinking. Tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebagai

contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum (*uncommon word*) mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk *higher order thinking skills*. Dengan demikian, soal-soal *HOTS* belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka proses pembelajarannya juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan berbasis aktivitas. Aktivitas dalam pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas dan berpikir kritis.

2. Berbasis Permasalahan Kontekstual

Soal-soal *HOTS* merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumihantukan dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pengertian tersebut termasuk pula bagaimana keterampilan peserta didik untuk menghubungkan (*relate*), menginterpretasikan (*interpret*), menerapkan (*apply*) dan mengintegrasikan (*integrate*) ilmu pengetahuan dalam pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata.

Berikut ini diuraikan lima karakteristik asesmen kontekstual, yang disingkat *REACT*; yaitu: (a) *relating*, asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata, (b) *experiencing*, asesmen yang ditekankan kepada penggalian (*exploration*), penemuan (*discovery*), dan penciptaan (*creation*); (c) *applying*, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata, (d) *communicating*, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah, dan (e) *transferring*, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru.

Ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik, adalah: (1). peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia; (2) tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata; dan (3) tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Berikut disajikan perbandingan asesmen tradisional dan asesmen kontekstual.

Tabel 3.1 Perbandingan Asesmen Tradisional dan Kontekstual

Asesmen Tradisional	Asesmen Kontekstual
Peserta didik cenderung memilih respons yang diberikan	Peserta didik mengekspresikan respons
Konteks dunia kelas (buatan)	Konteks dunia nyata (realistis)
Umumnya mengukur aspek ingatan (<i>recalling</i>)	Mengukur performansi tugas (berpikir tingkat tinggi)
Terpisah dengan pembelajaran	Terintegrasi dengan pembelajaran
Pembuktian tidak langsung, cenderung teoretis.	Pembuktian langsung melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dengan konteks nyata.

3. Menggunakan Bentuk Soal Beragam

Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes (soal-soal *HOTS*) sebagaimana yang digunakan dalam *PISA*, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Hal ini penting diperhatikan oleh guru agar penilaian yang dilakukan dapat menjamin prinsip objektif. Artinya hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Penilaian yang dilakukan secara objektif, dapat menjamin akuntabilitas penilaian.

Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal *HOTS* (yang digunakan pada model pengujian *PISA*), sebagai berikut.

a. Pilihan Ganda

Pada umumnya soal-soal *HOTS* menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (*stem*) dan pilihan jawaban (*option*). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh (*distractor*). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai bahannya/materi pelajarannya dengan baik. Jawaban yang diharapkan (kunci jawaban), umumnya tidak termuat secara eksplisit dalam stimulus atau bacaan. Peserta didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang terkait dengan stimulus/bacaan menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang dimiliki serta menggunakan logika/penalaran. Jawaban yang benar diberikan skor 1, dan jawaban yang salah diberikan skor 0.

b. Pilihan Ganda Kompleks (Benar/Salah, atau Ya/Tidak)

Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman



peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda biasa, soal-soal *HOTS* yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. Peserta didik diberikan beberapa pernyataan yang terkait dengan stilmulus/bacaan, lalu peserta didik diminta memilih benar/salah atau ya/tidak. Pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah agar diacak secara random, tidak sistematis mengikuti pola tertentu. Susunan yang terpola sistematis dapat memberi petunjuk kepada jawaban yang benar. Apabila peserta didik menjawab benar pada semua pernyataan yang diberikan diberikan skor 1 atau apabila terdapat kesalahan pada salah satu pernyataan maka diberi skor 0.

c. Isian Singkat atau Melengkapi

Soal isian singkat atau melengkapi adalah soal yang menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Karakteristik soal isian singkat atau melengkapi adalah: 1) bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam ratio butir soal, dan paling banyak dua bagian supaya tidak membingungkan siswa, 2) Jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Jawaban yang benar diberikan skor 1, dan jawaban yang salah diberikan skor 0.

d. Jawaban Singkat atau Pendek

Soal dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya

berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Karakteristik soal jawaban singkat adalah: 1) menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah; 2) pertanyaan atau perintah harus jelas, agar mendapat jawaban yang singkat; 3) panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa pada semua soal diusahakan relatif sama; dan 4) hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong siswa untuk sekadar mengingat atau menghafal apa yang tertulis dibuku. Setiap langkah/kata kunci yang dijawab benar diberikan skor 1, dan jawaban yang salah diberikan skor 0.

e. Uraian

Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan, kedalaman dan panjang jawaban, atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Dengan kata lain, ruang lingkup ini menunjukkan kriteria luas atau sempitnya masalah yang ditanyakan. Di samping itu, ruang lingkup tersebut harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Dengan adanya batasan sebagai ruang lingkup soal, kemungkinan terjadinya ketidakjelasan soal dapat dihindari. Ruang lingkup tersebut juga akan membantu mempermudah pembuatan kriteria atau pedoman penskoran.

Untuk melakukan penskoran, penulis soal dapat menggunakan rubrik atau pedoman penskoran. Setiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar oleh peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang salah diberi skor 0. Dalam sebuah soal kemungkinan banyaknya kata kunci atau langkah-langkah penyelesaian soal lebih dari satu. Sehingga skor untuk sebuah soal bentuk uraian dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar oleh peserta didik. Untuk Ujian Sekolah (US) bentuk soal *HOTS* yang disarankan cukup 2 saja, yaitu bentuk pilihan ganda dan uraian. Pemilihan bentuk soal itu disebabkan jumlah peserta US umumnya cukup banyak, sedangkan penskoran harus secepatnya dilakukan dan diumumkan hasilnya. Sehingga bentuk soal yang paling memungkinkan adalah soal bentuk pilihan ganda dan uraian. Sedangkan untuk penilaian harian, dapat disesuaikan dengan karakteristik KD dan kreativitas guru mata pelajaran. Pemilihan bentuk soal hendaknya dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian yaitu *assessment of learning*, *assessment for learning*, dan *assessment as learning*.

Masing-masing guru mata pelajaran hendaknya kreatif mengembangkan soal-soal *HOTS* sesuai dengan KI-KD yang memungkinkan dalam mata pelajaran yang diampunya. Wawasan guru terhadap isu-isu global, keterampilan memilih stimulus soal, serta kemampuan memilih kompetensi yang diuji, merupakan

aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh guru, agar dapat menghasilkan butir-butir soal yang bermutu.

Level Kognitif

Anderson & Krathwohl (2001) mengklasifikasikan dimensi proses berpikir manusia sebagai berikut.

Tabel 3.2 Dimensi Proses Berpikir

HOTS	Mengkreasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengkreasi ide/gagasan sendiri. <p>Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan.</p>
	Mengevaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil keputusan sendiri. <p>Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung.</p>
	Menganalisis	<ul style="list-style-type: none"> Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. <p>Kata kerja: membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji.</p>
MOTS	Mengaplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan informasi pada domain berbeda <p>Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan.</p>
	Memahami	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan ide/konsep. <p>Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan.</p>
LOTS	Mengetahui	<ul style="list-style-type: none"> Mengingat kembali. <p>Kata kerja: mengingat, mendaftarkan, mengulang, menirukan.</p>

Sumber: Anderson & Krathwohl (2001)

Terdapat beberapa kata kerja operasional (KKO) yang sama namun berada pada ranah yang berbeda. Perbedaan penafsiran ini sering muncul ketika guru menentukan ranah KKO yang akan digunakan dalam penulisan indikator soal. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, Puspendik (2015) mengklasifikasikannya menjadi 3 level kognitif sebagaimana digunakan dalam kisi-kisi Ujian Nasional sejak tahun pelajaran 2015/2016. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu: 1) pengetahuan dan pemahaman (level 1), 2) aplikasi (level 2), dan 3) penalaran (level 3). Berikut dipaparkan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut.

Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1)

Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui (C_1) dan memahami (C_2). Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Bisa jadi soal-soal pada level 1 merupakan soal kategori sukar, karena untuk menjawab soal tersebut peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) melakukan sesuatu. Namun soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal *HOTS*. Contoh KKO yang sering digunakan adalah: menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain.

Aplikasi (Level 2)

Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan (C_3). Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan: a) menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya; atau b) menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual (situasi lain). Bisa jadi soal-soal pada level 2 merupakan soal kategori sedang atau sukar, karena untuk menjawab soal tersebut peserta didik harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi/konsep, atau menyebutkan langkah-langkah (prosedur) melakukan sesuatu. Selanjutnya pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun soal-soal pada level 2 bukanlah merupakan soal-soal *HOTS*. Contoh KKO yang sering digunakan adalah: menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain.

Penalaran (Level 3)

Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi (*HOTS*), karena untuk menjawab soal-soal pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis (C_4), mengevaluasi (C_5), dan mengkreasi (C_6). Pada dimensi proses berpikir menganalisis (C_4) menuntut kemampuan peserta didik untuk menspesifikasi aspek-aspek/elemen, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, dan menemukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir mengevaluasi (C_5) menuntut kemampuan peserta didik untuk menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai,

menguji, membenarkan atau menyalahkan. Sedangkan pada dimensi proses berpikir mengkreasi (C_6) menuntut kemampuan peserta didik untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, menggubah. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan (evaluasi), memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontesktual yang tidak rutin. Kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain, merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 (penalaran). Kata kerja operasional (KKO) yang sering digunakan antara lain: menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan menggubah.

Langkah-Langkah Penyusunan Soal *HOTS*

Untuk menulis butir soal *HOTS*, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu dalam penulisan soal *HOTS*, dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal-soal *HOTS*.

1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal *HOTS*

Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal *HOTS*. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal *HOTS*. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal *HOTS*.

2. Menyusun kisi-kisi soal

Kisi-kisi penulisan soal-soal *HOTS* bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal *HOTS*. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam: (a) memilih KD yang dapat dibuat soal-soal *HOTS*, (b) memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, (c) merumuskan indikator soal, dan (d) menentukan level kognitif.

3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual

Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat.

4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal

Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal *HOTS*. Kaidah penulisan butir soal *HOTS*, agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.

5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban

Setiap butir soal *HOTS* yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.

PERAN SOAL *HOTS* DALAM UJIAN SEKOLAH (US)

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Hal itu berarti bahwa semua kegiatan yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan tentang US disiapkan oleh satuan pendidikan. Ujian Sekolah merupakan salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oleh karena itu Ujian Sekolah harus dipersiapkan dengan matang dan penyelenggaraannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar US dapat memberikan informasi yang bermakna, maka mutu Ujian Sekolah hendaknya terus ditingkatkan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada aspek perencanaan, Prosedur Operasional (POS) US dan bahan-bahan US perlu dipersiapkan dengan matang. Bahan US terdiri atas kisi-kisi dan naskah soal US. Naskah soal US disiapkan melalui langkah-langkah pengembangan butir soal sebagai berikut: (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penulisan butir soal, (3) analisis butir soal (kualitatif dan kuantitatif), dan (4) perakitan tes. Demikian pula pada aspek pelaksanaan, US dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pengawasan US sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

dalam POS-US dengan mengedepankan kejujuran dan integritas yang tinggi. Semua kegiatan US dilaporkan dengan tepat waktu kepada pemangku kepentingan.

Ujian Sekolah seringkali dipandang sebelah mata, karena Ujian Sekolah merupakan ujian internal satuan pendidikan. Penyelenggaraan US oleh sebagian pihak dianggap hal yang biasa, sehingga tidak dipersiapkan dengan matang. Padahal US harus dijaga wibawanya terkait dengan mutu penyelenggaraan US. Ditinjau dari mutu bahan US, soal-soal Ujian Sekolah hendaknya tidak hanya sekedar mengukur ranah hafalan, menyatakan kembali atau pengulangan semata. Ujian Sekolah juga diharapkan mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga mutu lulusan memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan naskah soal US perlu disisipkan soal-soal *HOTS*, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di lingkungan satuan pendidikan.

Soal-soal *HOTS* bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada Ujian Sekolah, guru dapat menyisipkan beberapa butir soal *HOTS*. Berikut dipaparkan beberapa peran soal-soal *HOTS* dalam meningkatkan mutu Ujian Sekolah.

1. Mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21

Ujian sekolah (US) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21 (*21st century skills*) yaitu: a) memiliki karakter yang baik (beriman dan taqwa, rasa ingin tahu, pantang menyerah, kepekaan sosial dan berbudaya, mampu beradaptasi, serta memiliki daya saing yang tinggi); b) memiliki sejumlah kompetensi (berpikir kritis dan kreatif, *problem solving*, kolaborasi, dan komunikasi); serta c) menguasai literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.

Penyajian soal-soal *HOTS* dalam Ujian Sekolah dapat melatih peserta didik untuk mengasah kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan kompetensi abad ke-21 di atas. Melalui penilaian berbasis pada soal-soal *HOTS*, keterampilan berpikir kritis (*creative thinking and doing*), kreativitas (*creativity*) dan rasa percaya diri (*learning self reliance*), akan dibangun melalui kegiatan latihan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari (*problem-solving*).

2. Memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah

Dalam Ujian Sekolah guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal *HOTS* secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Kreativitas guru dalam hal pemilihan stimulus yang berbasis

permasalahan daerah di lingkungan satuan pendidikan sangat penting. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dapat diangkat sebagai stimulus kontekstual. Dengan demikian stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal *HOTS* menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh peserta didik. Di samping itu, penyajian soal-soal *HOTS* dalam ujian sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan cinta terhadap potensi-potensi yang ada di daerahnya. Sehingga peserta didik merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul di daerahnya.

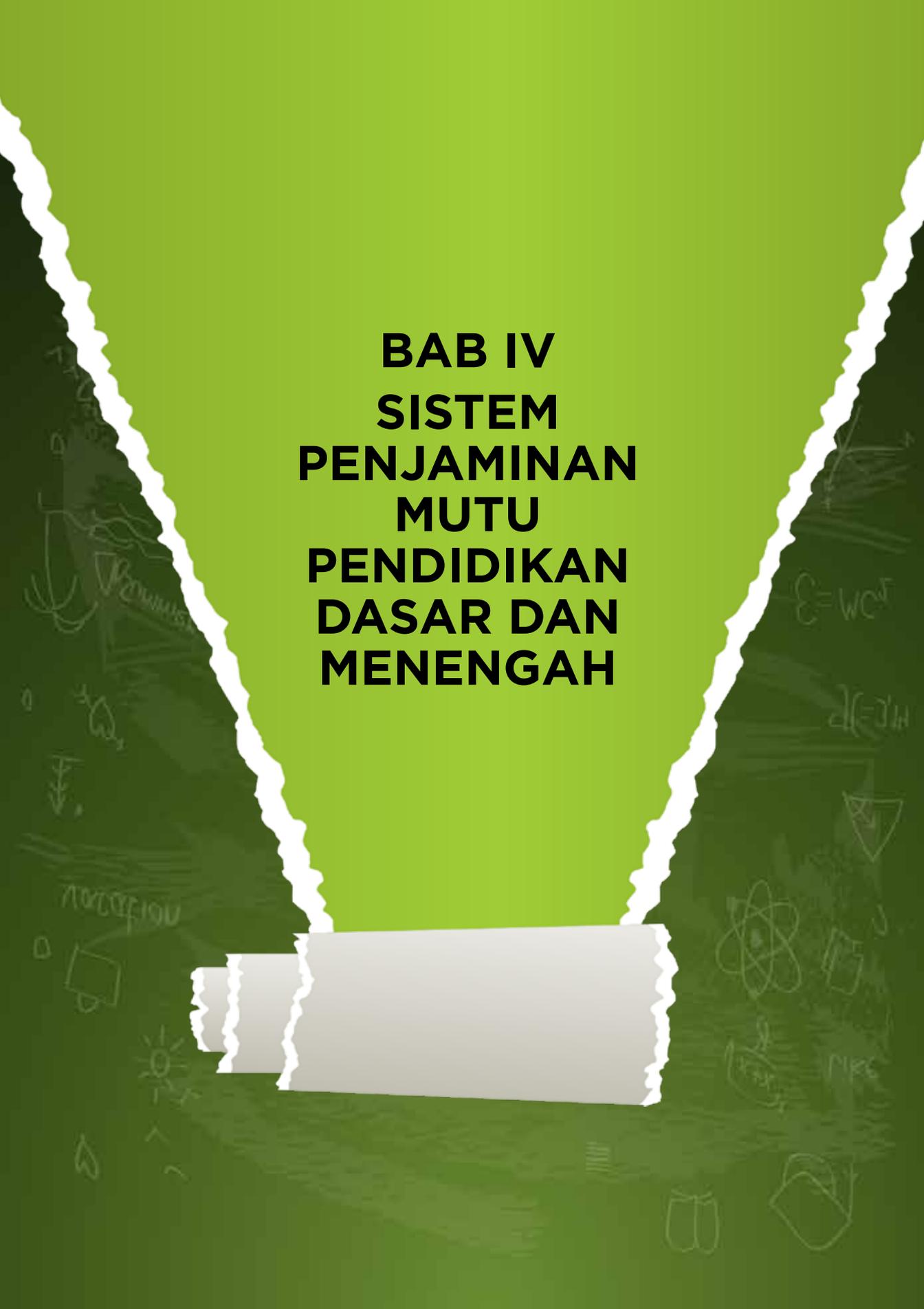
3. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik

Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas, agar terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Dengan demikian peserta didik merasakan bahwa materi pelajaran yang diperoleh di dalam kelas berguna dan dapat dijadikan bekal untuk terjun di masyarakat. Tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan stimulus kontekstual dan menarik dalam penyusunan soal-soal Ujian Sekolah, sehingga munculnya soal-soal US berbasis soal-soal *HOTS*, diharapkan dapat menambah motivasi belajar peserta didik.

4. Meningkatkan mutu soal Ujian Sekolah

Ditinjau dari hasil yang dicapai dalam US dan UN, terdapat 3 kategori sekolah yaitu: (a) sekolah unggul, apabila rerata nilai US lebih kecil daripada rerata UN; (b) sekolah biasa, apabila rerata nilai US tinggi diikuti dengan rerata nilai UN yang tinggi dan sebaliknya nilai rerata US rendah diikuti oleh rerata nilai UN juga rendah; dan (c) sekolah yang perlu dibina bila rerata nilai US lebih besar daripada rerata nilai UN.

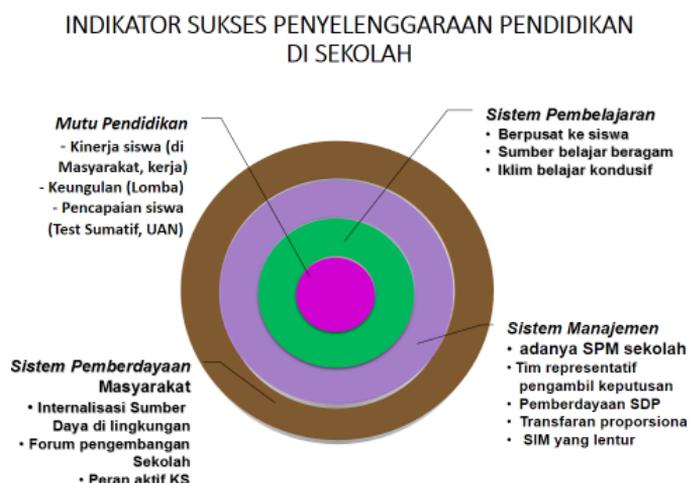
Masih banyak satuan pendidikan dalam kategori sekolah yang perlu dibina. Indikatornya adalah rerata nilai US lebih besar daripada rerata nilai UN. Ada kemungkinan soal-soal buatan guru level kognitifnya lebih rendah daripada soal-soal pada UN. Umumnya soal-soal US yang disusun oleh guru selama ini, kebanyakan hanya mengukur level 1 dan level 2 saja. Penyebab lainnya adalah belum disisipkannya soal-soal *HOTS* dalam US yang menyebabkan peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal-soal *HOTS*. Di sisi lain, dalam soal-soal UN peserta didik dituntut memiliki kemampuan mengerjakan soal-soal *HOTS*. Setiap tahun persentase soal-soal *HOTS* yang disisipkan dalam soal UN terus ditingkatkan. Sebagai contoh pada UN tahun pelajaran 2015/2016 kira-kira terdapat 20% soal-soal *HOTS*. Oleh karena itu, agar rerata nilai US tidak berbeda jauh dengan rerata nilai UN, maka dalam penyusunan soal-soal US agar disisipkan soal-soal *HOTS*.



BAB IV
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN
DASAR DAN
MENENGAH

Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan merupakan upaya sistematis untuk memenuhi standar mutu atau melampauinya sehingga segenap *stakeholder* pendidikan mendapatkan kepuasan. Satuan pendidikan bermutu, dapat dimaknai sebagai kapasitas program dan satuan pendidikan dalam memanfaatkan sebaik mungkin berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan optimal berikut menghasilkan *output* dan *outcomes* sesuai atau melampaui standar yang ditetapkan. Pencapaian mutu merupakan proses berkelanjutan dan terus-menerus yang dapat dicapai dengan hadirnya kesadaran bersama serta bekerjanya secara optimal para pelaku dalam program dan satuan pendidikan (Arcaro, 2007: 809). Indikator sukses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1 Indikator Sukses Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa indikator sukses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari mutu siswa dalam bidang akademik dan non akademik baik seperti memiliki kinerja yang baik di masyarakat maupun di sekolah, sikap spiritual dan sikap sosial, memiliki pengetahuan yang baik, terampil dalam menerapkan sikap dan pengetahuannya. Semua itu diakibatkan oleh faktor guru, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan berbagai metode dan sumber belajar yang beragam dan didukung oleh iklim belajar yang kondusif. Di sisi lain, juga didukung oleh sistem manajemen yang handal, seperti standar pelayanan minimal, sistem informasi manajemen yang lentur, transparansi, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Di samping itu, tak kalah pentingnya adalah sistem pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat di sekitar sekolah.

Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu, seperti dikatakan Rowley (1995) adalah *“all the policies, systems and process directed towards ensuring the maintenance and enhancement of the quality of educational provision. For example, course design, staff development, the collection and use of feedback from students, staff and employes”* [keseluruhan kebijakan, sistem dan proses yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan]. Sebagai contoh adalah rancangan kursus, pengembangan staf, serta pengumpulan dan pemanfaatan umpan balik dari siswa, staf dan karyawan). Secara lebih tegas, Piper (1993), menjelaskan penjaminan mutu pendidikan sebagai *“the total of those mechanism and procedures adopted to assure a given quality or the continued improvement of quality, which embodies the planning, defining, encouraging, assessing of quality”*. [Keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin tersedianya mutu atau berlanjutnya perbaikan mutu, yang meliputi perencanaan, pendefinisian, pendorong, dan penilaian mutu] (Suryadi dan Budimansyah, 2009: 197-202).

Dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh *stakeholders* memperoleh kepuasan (IPB, 2004: 1). Contoh lain standar manajemen mutu akademik diimplementasikan dengan berpedoman bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel untuk memenuhi standar permintaan dan kepuasan *stakeholders* (BPMA UI. 2007: 12).

Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu ialah terwujudnya budaya mutu (*quality culture*) dalam dunia pendidikan. Budaya mutu, terutama mutu akademik, mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena yang memiliki nilai tinggi baik

moral maupun sosial. Suatu dunia yang bergerak dalam proses pencarian dan penemuan kebenaran yang tiada henti berikut penciptaan sumberdaya manusia yang memiliki *life skill* yang membuatnya mampu membangun kehidupan yang lebih baik, maju, dan dinamik. Dengan demikian, dunia pendidikan, khususnya satuan pendidikan seharusnya tampil sebagai institusi yang berwibawa dan menjadi simbol kebenaran sekaligus kemajuan.

Sistem penjaminan mutu terbagi atas dua kategori yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal merupakan persiapan suksesnya penjaminan mutu eksternal maka standar internal dan eksternal perlu diharmonikan.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh satuan pendidikan sebagai upaya sadar untuk melakukan peningkatan mutu secara teratur dan menyeluruh, baik pada dimensi akademik maupun non akademik. SPMI merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan. SPMI ini direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh satuan pendidikan.

Setiap program dan/atau satuan pendidikan, lengkap dengan visi, misi, tujuan, dan program berikut tujuan-tujuan khususnya haruslah memiliki tanggung jawab publik (*public accountability*). Segala *input* yang diterima, proses yang berlangsung, dan *output* yang dihasilkan (juga *outcomes* yang ditimbulkan) harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama *stakeholders* pendidikan. Program dan/atau satuan pendidikan dituntut untuk bisa memberikan kepuasan kepada *stakeholders*-nya.

Program dan satuan pendidikan yang terjamin mutunya, harus selalu melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Di satu sisi, harus bergerak ke depan dan bersikap dinamis dengan cara terus berupaya mengembangkan mutu dirinya. Di sisi lain, instrumen pengembangan mutu dari lembaga penjaminan harus terus dilengkapi dan disempurnakan sesuai tuntutan dan perkembangan zaman secara konsisten hingga mencapai tingkat dan kualitas kinerja yang optimal.

Dalam proses penjaminan mutu di setiap program dan/atau satuan pendidikan atau sekumpulan satuan pendidikan, mutlak mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh badan/lembaga yang mengeluarkannya serta mendorong terpenuhinya standar tersebut secara bertahap dengan kemajuan-kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Standar yang sudah ditetapkan itu menjadi ukuran atau barometer bersama yang harus dipenuhi oleh setiap program dan/atau satuan pendidikan. Standar pendidikan bersifat dinamik, dan karena itu standar tersebut tentu akan mengalami perubahan dan penyempurnaan dari masa ke masa.

Komponen-komponen penjaminan mutu internal berada dalam lingkup tiga

dimensi utama yakni masukan-masukan (*inputs*), proses (*process*), dan keluaran (*output*), di mana pada masing-masing komponen memiliki sub-sub komponen yang rinci sehingga menggambarkan totalitas organisasi (program dana atau satuan pendidikan).

Komponen-komponen penjaminan mutu internal tersebut meliputi: (a) **Masukan**: (1) jatidiri; (2) integritas; (3) visi; (4) misi; (5) sasaran dan tujuan; (6) peserta didik; (7) pendidik dan tenaga kependidikan; (8) kurikulum; (9) prasaranan dan sarana; (10) pendanaan; (b) **Proses**: (1) tata pamong (*governance*); (2) manajemen akademik; (3) pembelajaran; (4) suasana akademik; (5) sistem informasi; (6) sistem jaminan mutu; (c) **Keluaran**: (1) lulusan; dan (2) pengabdian kepada Masyarakat; dan (d) Dimensi lain yang dapat ditambahkan adalah **Tindak Lanjut** dengan komponen: (1) sistem informasi; dan (2) sistem peningkatan dan pengendalian mutu.



Komponen-komponen tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup dari kegiatan penjaminan mutu internal, termasuk untuk evaluasi diri dan audit mutu internal. Fokus audit mutu internal atau evaluasi diri adalah standar mutu yang digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan (terutama standar mutu akademik) dan standar mutu dari lembaga akreditasi. Untuk itu, dokumen-dokumen yang mesti dihimpun dan disusun untuk kemudian dievaluasi dan dianalisis mencakup kebijakan akademik, standar akademik, dan peraturan akademik, dari sebuah program dan/atau satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan dan/atau program keahlian. Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan sistem yang dijalankan oleh lembaga di luar satuan

pendidikan seperti badan standardisasi, akreditasi, dan penjaminan mutu serta badan-badan lain, termasuk pemerintah untuk mengawasi, mengendalikan, dan memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah, badan standardisasi pendidikan, dan badan akreditasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

SPME dimulai dengan penetapan standar oleh badan standardisasi. Standar yang dikembangkan ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Selain menetapkan standar, badan standardisasi ini juga menyusun strategi peningkatan mutu baik oleh satuan pendidikan maupun lembaga terkait penjaminan mutu eksternal, serta mengevaluasi pemenuhan standar tersebut.

Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan tersebut, satuan pendidikan difasilitasi, diawasi, dan dievaluasi oleh pemerintah. Selain memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi pemenuhan standar mutu oleh satuan pendidikan, pemerintah juga melakukan pemetaan mutu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pemetaan mutu ini digunakan sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan mutu sesuai kewenangan masing-masing.

Komponen lain dari penjaminan mutu pendidikan eksternal adalah akreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal berikut menilai kelayakan program atau satuan pendidikan. Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk memberikan saran peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi/ audit eksternal dibutuhkan supaya mutu proses dan produk dari program dan/atau satuan pendidikan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat luas (*stakeholders* pendidikan).

Akreditasi juga bertujuan, antara lain, melindungi masyarakat dari kemungkinan penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hasil akreditasi dapat digunakan dan acuan oleh masyarakat dalam memilih satuan pendidikan, jurusan atau program studi yang dikehendaki. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, akreditasi dilakukan tanpa campur tangan pemerintah, ia dilakukan melalui suatu proses penilaian eksternal. Proses akreditasi bertumpu pada penilaian oleh kelompok pakar (*peer review*). Objek yang menjadi sasaran akreditasi terhadap satuan pendidikan adalah praktik-praktik dan tradisi akademik serta kelayakan suatu program studi atau jurusan, dan akreditasi institusi dari program dan/atau satuan pendidikan. Menurut Aschraft (1995), tiga aspek dalam sasaran akreditasi yakni akuntabilitas, audit, dan penilaian keseluruhan kinerja. Penilaian atau uji tuntas dilakukan terhadap kinerja program dan/atau satuan pendidikan secara keseluruhan berikut adanya pemberian umpan balik bagi perbaikan mutu berkelanjutan.

Antara penjaminan mutu internal (atau evaluasi diri dan audit mutu internal) dan penjaminan mutu eksternal (akreditasi atau audit mutu eksternal) terdapat hubungan fungsional, dan itu diletakkan dalam satu siklus penjaminan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement system*) yang dewasa ini banyak dikembangkan oleh para ahli manajemen mutu pendidikan.

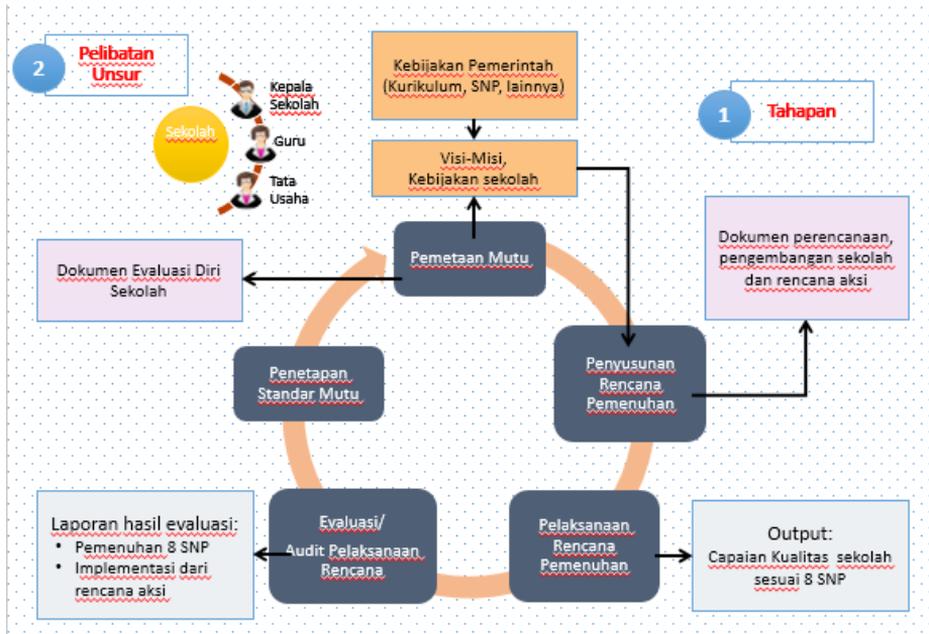
Jika kebijakan mutu yang dikembangkan selama ini berbasis pada konsep-konsep mutu partikular yang terserak dan terpisah antara yang satu dan yang lain, ke depan harus dikembalikan kepada pohon utamanya, yaitu sistem penjaminan mutu terpadu (*total quality assurance system*). Sistem ini perlu dijabarkan lebih lanjut secara sistematis dan terencana sehingga dapat dilaksanakan dalam tatakelola program dan/atau satuan pendidikan.

Penerapan ini perlu dipadukan menjadi satu siklus penjaminan mutu dengan sistem perbaikan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement system*) sehingga penjaminan mutu dapat sekaligus memperbaiki program, jurusan dan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Dua sistem dalam satu siklus menjadi titik awal atau titik berangkat sekaligus sebagai strategi kebijakan perbaikan program dan/atau satuan pendidikan di Indonesia. Dengan pola yang demikian, maka kebijakan yang dibuat dapat merangkum konsep-konsep mutu partikular yang terserak dan terpisah-pisah menjadi kebijakan mutu yang utuh, terpadu, dan terintegrasi. Semakin utuh dan terintegrasi suatu kebijakan, maka semakin baik dan mudah mengimplemen-tasikannya (Hanief Saha Ghafur, 2010: 89).

Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan

Mengacu kepada pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilakukan di beberapa negara, untuk memastikan mutu pendidikan di Indonesia maka di tingkat sekolah maupun wilayah tertentu (lokal maupun nasional) memiliki sistem penjaminan mutu yang mengintegrasikan unsur, kebijakan, program dan organisasi terkait dengan pendidikan sedemikian hingga semua langkah akan menuju pada tujuan yang sama yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang mudah terkontrol, terukur dan terkendali.

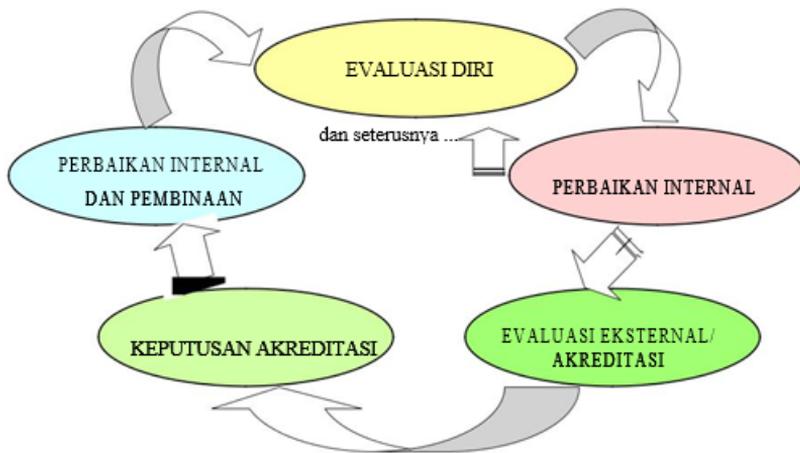
SPMI yang dilaksanakan di tingkat program dan/atau satuan pendidikan memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1) memetakan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional, (2) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah; (3) melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; (4) melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan (5) menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



Gambar 4.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Terintegrasi (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

Sedangkan SPME yang dijalankan oleh badan dan lembaga di luar satuan pendidikan memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: (1) memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional; (2) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan nasional; (3) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) mengevaluasi dan menetapkan standar nasional pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan (6) melakukan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan.

Di Indonesia, BAN-PT telah mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam siklus perbaikan mutu berkelanjutan dengan membangun keterhubungan antara faktor evaluasi diri, perbaikan internal, akreditasi, keputusan akreditasi, serta perbaikan dan pembinaan (BAN-PT. 2005: 6). Gambar berikut menunjukkan lingkaran siklus perbaikan mutu berkelanjutan tersebut.

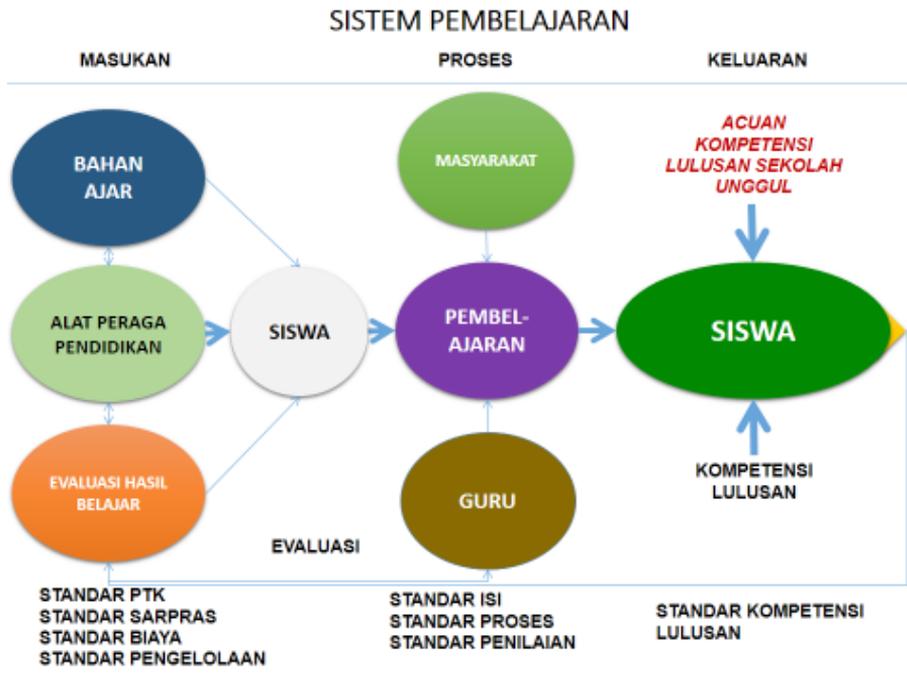


Gambar 4.3 Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Siklus Perbaikan Mutu Berkelanjutan

Secara lebih komprehensif, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 4.4 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

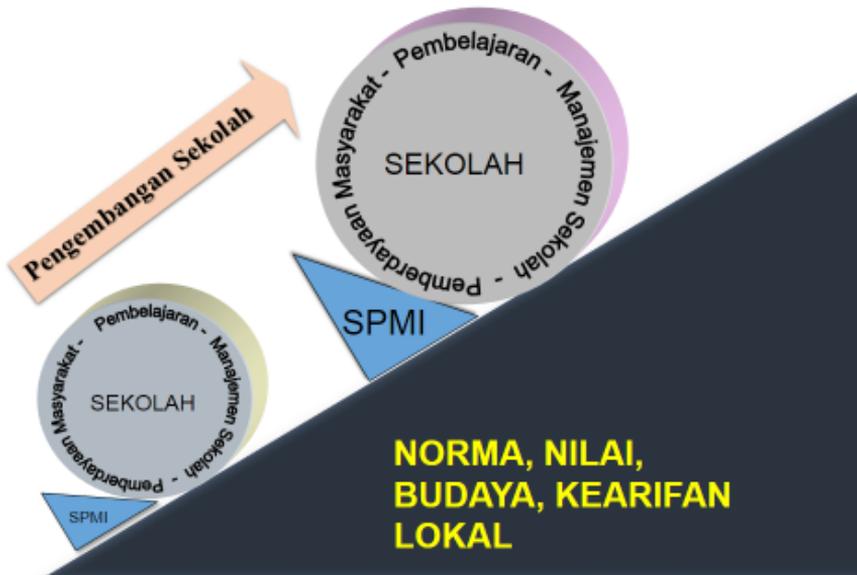


Gambar 4.5 Sistem Pembelajaran dalam Konteks Penjaminan Mutu Pendidikan



Gambar 4.6 Pengelolaan Sekolah dalam Konteks Penjaminan Mutu Pendidikan

SPMP – PENGEMBANGAN SEKOLAH (SPMI)



Gambar 4.7 Fungsi SPMI dalam Konteks Pengelolaan Sekolah

Berdasarkan Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7 tampak bahwa semua sistem di sekolah harus melaksanakan penjaminan mutu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, misalnya system pembelajaran dan system pengelolaan sekolah guna memperoleh kinerja sekolah yang optimal. Pada gambar 4.7 tampak bahwa sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada satuan pendidikan sangat berperan dalam pengelolaan sekolah agar satuan pendidikan mencapai standar yang telah ditetapkan. SPMI berperan mengantarkan sekolah untuk mencapai standar nasional bahkan melampaui standar nasional.

Membangun Budaya Mutu Pendidikan

Pencapaian dan pembangunan mutu pendidikan memang tidak hanya ditentukan oleh variabel-variabel yang bersifat *soft*, melainkan juga variabel-variabel yang bersifat *hard* pun turut memberikan kontribusi. Menurut Sallis (Edward Sallis, 2010: 30-31), mutu dalam pendidikan dapat dibangun dari beraneka ragam sumber seperti sarana gedung yang bagus, pendidik yang terteladani, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang mencerminkan kompetensi nyata, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orangtua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap peserta didik, kurikulum yang memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Untuk itu, membangun mutu pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan seharusnya pula turut mempertimbangan faktor *soft* dan *hard* sekaligus. Sesungguhnya, faktor yang satu tidaklah jauh lebih penting dari faktor yang lain. Semua faktor atau variabel yang relevan tentu memiliki kontribusi dan peran yang sama pentingnya dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada kesejatan mutu. Di sinilah pentingnya membangun budaya mutu pada setiap satuan pendidikan.

Budaya mutu merupakan suatu kesadaran yang hadir sebagai tradisi di mana mutu pendidikan merupakan proses pencapaian yang tiada henti, terus-menerus (berkelanjutan). Mutu menjadi impian bersama sehingga seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan diletakkan sebagai upaya mencapai tingkat mutu terbaik. Dalam rangka itu, di satu sisi, satuan pendidikan membiasakan diri (membangun tradisi) untuk melakukan penjaminan mutu (evaluasi diri) secara periodik dan teratur dalam rangka menjaga dan menjamin mutunya secara internal. Di sisi lain, lembaga penjaminan mutu eksternal bekerja sebagai kekuatan yang mewakili masyarakat untuk mengontrol mutu pendidikan dan memberi jaminan terpercaya mengenai tingkat mutu satuan pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan mutlak ada dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan budaya mutu di satuan pendidikan. Karena itu ia harus ditopang eksistensinya dengan komitmen, kebijakan, serta keputusan politik yang kuat. Komitmen, kebijakan, dan keputusan politik yang kuat setidaknya harus hadir dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini dipandang perlu karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat amanat dari konstitusi dan Undang Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk membangun pendidikan bermutu bagi setiap warga negara di seantero negeri.

Peraturan ini diletakkan sebagai payung hukum bagi rancang-bangun dan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini sekaligus menjadi aturan pelaksana yang bersifat spesifik dari tuntutan sejumlah klausul mengenai keharusan penjaminan mutu pendidikan yang diisyaratkan oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

Memang, pada tahun 2009 pernah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Tetapi, Permen ini mengandung banyak kelemahan. Klausul-klausul di dalamnya cenderung bersifat abstrak, dan indikator-indikator masih kurang jelas sehingga terasa sulit diterapkan. Cakupan Peraturan Menteri tersebut sangat luas mencakup semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang karakteristiknya sangat beragam.

Lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait pendidikan

membuat beberapa pasal menjadi tidak relevan. Belum lagi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terjadi berkali-kali sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga membuat peraturan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan ini semakin sulit diterapkan. Untuk itu, perlu dilakukan konstruksi ulang terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih sederhana, terfokus dengan klausul-klausul yang lebih kongkrit, dan indikator-indikator yang jelas. Mengingat aturan terkait sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diganti dengan peraturan yang baru, maka peraturan yang diusulkan khusus menyangkut pendidikan dasar dan menengah, sehingga judul peraturan ini menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tentu saja penerbitan peraturan menteri yang baru ini tidak serta merta menghapus keseluruhan pasal dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009. Masih ada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan lain yang masih memerlukan payung hukum menyangkut sistem penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu peraturan menteri yang baru ini hanya menghapus pasal-pasal terkait dengan pendidikan dasar dan menengah.

Penjaminan Mutu Melalui Sekolah Model

a. Definisi Sekolah Model

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.

b. Kriteria Sekolah Model

Pemilihan sekolah yang akan dibina untuk dijadikan sekolah model memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

a) Sekolah belum memenuhi SNP.

Pemetaan mutu yang dilakukan oleh LPMP terhadap sekolah tersebut dapat digunakan sebagai data dasar penetapan pencapaian sekolah terhadap SNP. Data hasil pemetaan tersebut diberikan kepada sekolah untuk digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan ke depan.

b) Seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen sekolah. Pembinaan akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan sekolah yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orangtua dan siswa. Sekolah akan dibina untuk melibatkan pemangku kepentingan di luar sekolah seperti lurah/kepala desa, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

c) Adanya dukungan dari pemerintah daerah.

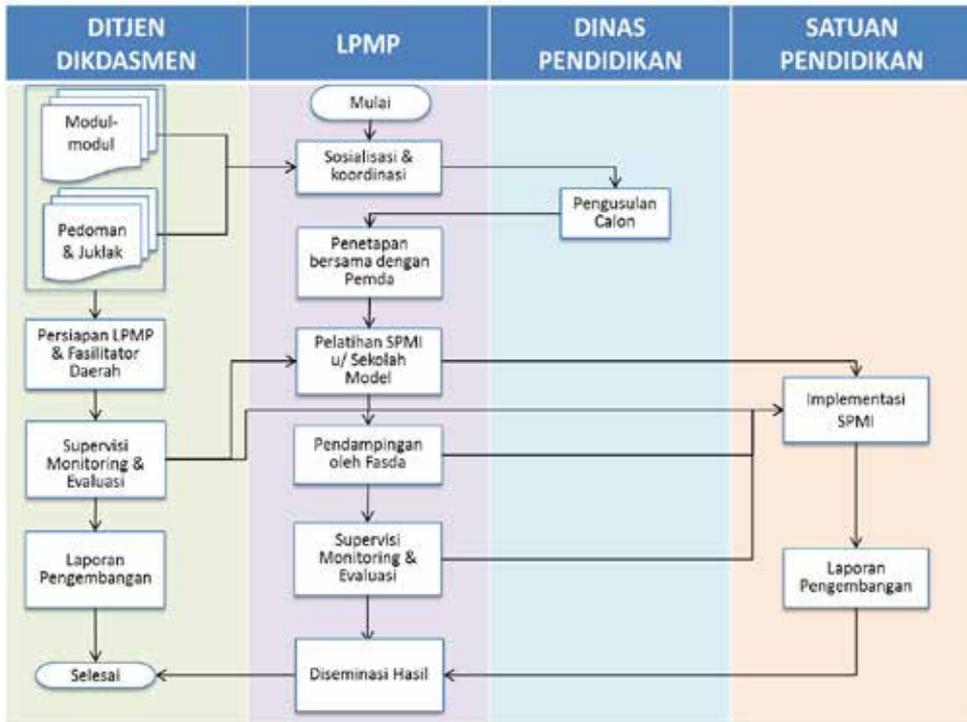
Pengelolaan sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, sehingga dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan saat LPMP melakukan pembinaan terhadap sekolah tersebut, karena setelah sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sekolah akan berada dalam pembinaan pemerintah daerah.

Sekolah model akan dibina oleh LPMP dibantu oleh fasilitator daerah.

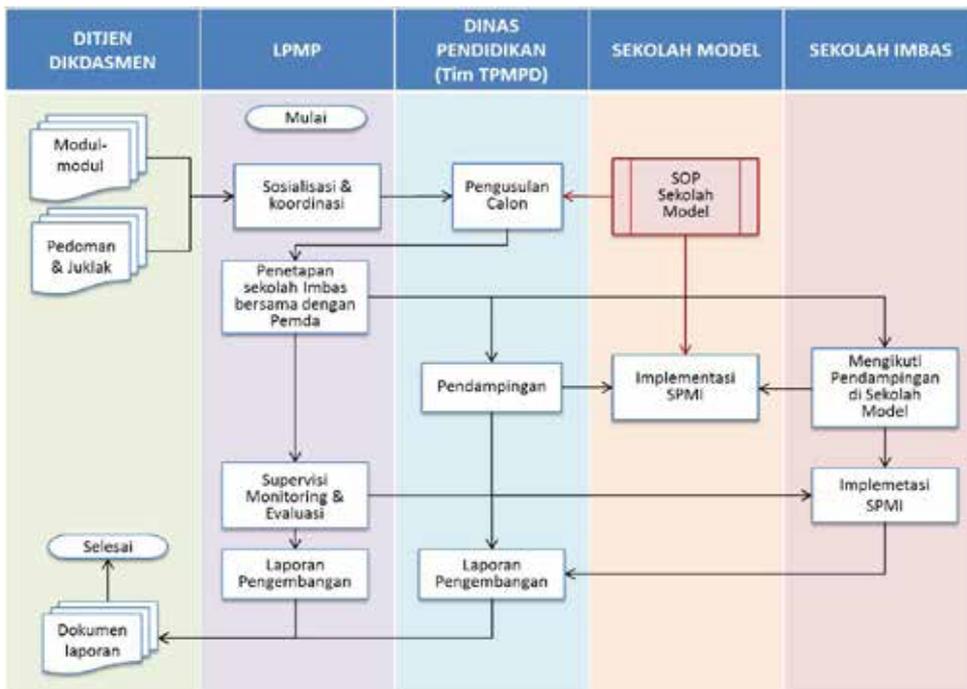
Pembinaan yang diterima oleh sekolah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, supervisi serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan tersebut dilakukan oleh LPMP hingga sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Kemandirian sekolah diukur oleh LPMP pada kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai instrumen yang disediakan.

Prosedur Pengembangan Sekolah Model

Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan ditunjukkan pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Prosedur yang disajikan menunjukkan adanya pembagian peranan dalam setiap tahapan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya. Petunjuk teknis ini akan menjelaskan prosedur yang menjadi tanggungjawab LPMP. Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan yang dilaksanakan oleh LPMP terdiri dari beberapa kegiatan.



Gambar 4.8 Prosedur Pengembangan Sekolah Model



Gambar 4.9 Prosedur Pengimbasan oleh Sekolah Model

Persiapan Pengembangan Sekolah Model

a. Sosialisasi dan Koordinasi

Tujuan kegiatan sosialisasi dan koordinasi adalah untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah terkait penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan modul yang telah disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan pusat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dilakukan oleh LPMP. LPMP dapat mengikuti strategi berikut dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah:

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh LPMP dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten dan kota) untuk mensosialisasikan tentang penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. Materi kegiatan sosialisasi dan koordinasi meliputi: (1) pemahaman umum sistem penjaminan mutu pendidikan. Materi ini menjelaskan bahwa telah dirancang suatu sistem untuk menjamin mutu pendidikan dan bagaimana sistem penjaminan mutu tersebut dijalankan, (2) peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Materi ini menjelaskan bagaimana bentuk peranan pemerintah daerah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dan perlu dibentuk tim penjaminan mutu daerah oleh pemerintah daerah, tim ini nantinya berkoordinasi dengan LPMP dalam rangka sinergisitas mutu pendidikan daerah masing-masing, (3) pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah (SPMI). Materi ini menjelaskan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh sekolah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa sekolah merupakan pilar utama penjaminan mutu pendidikan dan bagaimana siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah dilakukan, (3) pengenalan konsep sekolah model dan pengimbasannya. Materi ini menjelaskan bagaimana konsep pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan yang akan dilakukan oleh LPMP sebagai upaya pemerintah dalam rangka pemberian layanan yang bermutu.

Materi tersebut dapat disampaikan selama \pm 2 hari penuh waktu dengan metode penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif dalam bentuk rapat koordinasi. Peserta pemerintah daerah diharapkan meneruskan informasi kepada pemangku kepentingan daerah agar dapat mendukung penjaminan mutu pendidikan serta kepada sekolah-sekolah untuk menginformasikan adanya program pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan.

2. Sosialisasi yang dilakukan melalui media informasi dan teknologi seperti pengunggahan informasi dalam bentuk poster infografis pengembangan sekolah model dan pola pengimbasannya pada website. Poster ini juga dapat

dicetak dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk diperbanyak dan disebarakan kepada sekolah.

3. Melakukan pendekatan personal dengan pejabat tertinggi pemerintah daerah secara intens seperti gubernur, bupati, walikota, ketua DPRD dan lainnya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

LPMP harus menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan. Hasil koordinasi dapat berupa: (a) pernyataan dukungan dari pemerintah daerah, (b) kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di daerahnya, (c) komitmen penyediaan anggaran peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah, (d) pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan daerah yang independen untuk membantu pemerintah daerah dalam menjamin mutu pendidikan pada daerah masing-masing (provinsi/kabupaten/kota), (e) rekomendasi fasilitator daerah untuk diperbantukan dalam menerapkan sekolah model dan pengimbasannya.

b. Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Pengusulan calon sekolah untuk dikembangkan menjadi sekolah model dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tanggungjawab pengelolanya. Calon sekolah yang akan dibina untuk menjadi sekolah model harus memenuhi kriteria minimal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Calon sekolah model dan imbas dapat mengacu kriteria yang disajikan pada Tabel 4.1, kriteria ini untuk memberikan gambaran operasional perbedaan kriteria dalam pengusulan sekolah model dengan sekolah imbasnya.

Pemerintah kabupaten/kota selaku pengelola pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mengusulkan calon sekolah, dimana komposisi antara jumlah SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi selaku pengelola pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan calon sekolah, dimana komposisi antara jumlah SMA dan SMK diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Selain memberikan usulan sekolah model, pemerintah daerah juga mengusulkan sekolah yang akan diimbaskan oleh masing-masing sekolah model. Jumlah sekolah imbas untuk setiap sekolah model adalah 5 sekolah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pemilihan sekolah model: (a) sekolah-sekolah imbas memiliki akses (terutama transportasi) untuk berkomunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan sekolah model mereka, (b) sekolah-sekolah imbas pada jenjang SD, SMP dan SMA dapat ditentukan berdasarkan jarak terdekat, sedangkan pada jenjang SMK dapat dipertimbangkan pula berdasarkan paket kejuruan yang dimiliki.

Tabel 4.1 Kriteria Pengusulan Calon Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Indikator	Kriteria Sekolah Model				Kriteria Sekolah Imbas			
	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
Akreditasi	A / B dan belum memenuhi SNP				≤ B dan belum memenuhi SNP			
Kurikulum	Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional				Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional (diutamakan)			
Lokasi	16 sekolah per kabupaten/kota (tidak boleh berada dalam gugus/kluster yang sama)				dalam gugus/kluster yg sama dengan sekolah model			
Jumlah rombel	Min. 12 Rombel		Min. 9 rombel		-			
Komitmen Sekolah	Wajib							
Komitmen pemda	Wajib							

Daftar usulan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada LPMP paling lambat pada bulan ketiga.

c. Penetapan Sekolah Model dan Sekolah Imbas

Pengusulan daftar sekolah model beserta sekolah imbasnya ditindaklanjuti oleh LPMP dengan dibantu oleh tim dari pemerintah daerah. Proses tindak lanjut oleh LPMP berupa verifikasi dan validasi. Proses ini dapat dilakukan dengan kunjungan sekolah, pencocokan dokumen sekolah dengan data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah untuk mengukur kondisi awal sekolah, *Focus Group Discussion* dengan seluruh komponen dari calon sekolah untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka. Hasil verifikasi dan validasi LPMP dilaporkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengusulkan daftar baru jika terdapat sekolah yang tidak dapat memenuhi proses verifikasi dan validasi yang kemudian akan ditindaklanjuti kembali oleh LPMP. Proses ini dapat berlangsung paling lambat pada pertengahan bulan ke-4. Jika pada bulan keempat pemerintah daerah belum mampu memenuhi kuota dan kriteria tersebut, LPMP dapat menetapkan daftar terakhir untuk ditetapkan bersama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat mengusulkan sekolah model di luar kuota yang diberikan oleh LPMP dengan kesepakatan bahwa sekolah di luar kuota akan didukung dan dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri dan dibina oleh fasilitator daerah. LPMP memfasilitasi dengan melatih fasilitator daerah yang diusulkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan sekolah model secara mandiri.

d. Penyiapan dan Seleksi Fasilitator Daerah

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sekolah model dan pengimbasan meliputi pelatihan, implementasi dan pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, LPMP perlu menyiapkan fasilitator daerah yang menguasai sepenuhnya terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, implementasi SPMI, pengembangan sekolah model, dan pola pengimbasannya. Fasilitator daerah memiliki bertugas untuk melakukan serangkaian kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya pada daerah masing-masing.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan rekomendasi calon fasilitator daerah. Pengusulan calon fasilitator daerah mengacu pada kriteria yang disajikan pada Tabel 4.2. Calon fasilitator daerah akan mengikuti beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkan sebagai fasilitator daerah. Proses seleksi dilakukan untuk menjamin fasilitator daerah yang akan berperan dalam pelaksanaan memiliki kapasitas yang kompeten dan terstandar.

Tabel 4.2. Kriteria Calon Fasilitator Daerah Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya

Indikator	Kriteria
Pendidikan	Minimal S2
Usia	Minimal 35 tahun
Bidang ilmu	<ul style="list-style-type: none">• Ilmu kependidikan• Manajemen/ekonomi/teknik /statistic
Pengalaman kerja di Bidang pendidikan/penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none">• Minimal 5 tahun• Diutamakan widyaiswara/tenaga fungsional lainnya di LPMP/dosen/pengawas/mantan kepala sekolah Berprestasi
Keterampilan minimal	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman SNP• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik• Menguasai TIK• Menguasai pembelajaran integrative

Beberapa tahapan yang harus diikuti antara lain: (1) pengajuan berkas: (a) berkas diajukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) oleh LPMP dan/atau oleh dinas pendidikan melalui LPMP, (b) setiap pemangku kepentingan dapat mengajukan lebih dari satu calon, dan (c) Kelengkapan dokumen yaitu sebagai berikut: Daftar riwayat hidup *Curriculum Vitae* (CV), Surat pengusulan sebagai calon fasilitator daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala LPMP, Surat pernyataan kesediaan calon fasilitator daerah untuk menjalankan seluruh rangkaian kegiatan. 2) seleksi administrasi; evaluasi dilakukan oleh LPMP, Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala LPMP untuk mendapatkan pengesahan, Hasil evaluasi ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 3) Pengumuman calon

fasilitator daerah; LPMP mengumumkan secara tertulis kepada calon fasilitator daerah, LPMP mengundang calon fasilitator daerah untuk mengikuti pelatihan. Tahapan 1 hingga 3 dilakukan selama 2 minggu. Selama proses seleksi pada tahapan tersebut, LPMP menyiapkan kebutuhan pelatihan yang akan menjadi tahapan seleksi selanjutnya. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain materi, modul, narasumber/fasilitator nasional, peralatan, waktu, jadwal, tempat, jumlah peserta sesuai hasil seleksi administrasi serta rincian biaya yang dibutuhkan. 4) pelatihan calon fasilitator daerah; pelatihan dilaksanakan oleh LPMP kepada peserta yang diundang sesuai hasil seleksi pada tahapan sebelumnya, pelatihan yang diikuti oleh calon fasilitator daerah tidak otomatis meluluskan calon fasilitator sebagai fasilitator daerah, pelatihan bertujuan memberikan keterampilan memfasilitasi kepada calon fasilitator daerah sehingga mampu melaksanakan fasilitasi pada pelatihan penjaminan mutu untuk sekolah.

Pelatihan calon fasilitator daerah dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan yaitu: (a) peserta memahami dan dapat menjelaskan SPMI, (b) peserta memahami mekanisme pelaksanaan siklus dalam SPMI, (c) peserta dapat berperan sebagai fasilitator dalam rangkaian kegiatan pengembangan sekolah model. Kerangka acuan kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah adalah: Waktu Pelatihan: 5 hari (\pm 40 jam), *Batch* (lingkup area), 1 region (kelompok), jumlah peserta: maksimal 15 orang tiap kelas, metode: 25% paparan dan 75% diskusi/praktik, Evaluasi: *Pra Test* dan *Post Test*, dan Peralatan: projector, *flip chart*, akses internet, laptop dan lainnya. Jadwal dan pembagian fasilitator daerah berdasarkan kelompok sekolah model akan disiapkan oleh LPMP berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam penentuan jadwal dan pembagian fasilitator, mempertimbangkan kalender akademik sekolah, kapasitas fasilitator dan lainnya. Selain itu, LPMP juga menggandakan modul dan pedoman yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan nantinya untuk dibagikan kepada sekolah model saat pelatihan dan dipelajari sekaligus dipraktekkan pada implementasinya.

Pelaksanaan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan

a. Pelatihan SPMI Untuk Sekolah Model

Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan fasilitator daerah atau tim penjaminan mutu pendidikan dengan pola “*whole school approach*”. Pelatihan SPMI dirancang sefleksibel mungkin baik dari sisi materi maupun metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan tidak hanya tersampainya substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Materi pelatihan SPMI diambil dari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu

pendidikan pada satuan pendidikan yang disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara substansi ruang lingkup pelatihan meliputi: (a) pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, (b) pemahaman tentang penerapan penjaminan mutu internal sekolah, (c) pendalaman tentang bagaimana menerapkan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru, (d) penguatan tentang bagaimana menjalankan pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, (e) penguatan tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran, (f) pembentukan tim penjaminan mutu sekolah sebagai penanggungjawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah, dan (g) pendalaman bagaimana melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain.

b. Implementasi SPMI

Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan sebagai berikut.

Tahap pertama adalah memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Kegiatan ini penting untuk melibatkan seluruh anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah untuk mendapatkan informasi dan evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal ini penting karena visi, misi dan tujuan merupakan pusat pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk memenuhi harapan sekolah. Sebuah organisasi berupa tim penjamin mutu pendidikan perlu dibentuk untuk mengelola sistem penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional. *Tahap kedua* adalah membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur. Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.

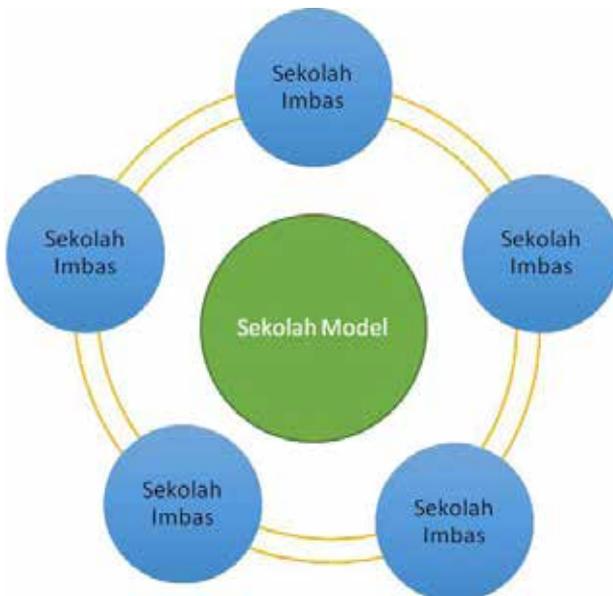
Tahap ketiga adalah pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah. Pedoman ini akan memandu anggota sekolah bagaimana menerapkan proses pembelajaran (mengembangkan materi dan pendekatan proses pembelajaran), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar bagaimana menerapkan pembelajaran interaktif dan integratif melalui pendekatan ilmiah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Pedoman ini memberikan arahan bagaimana untuk memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku perubahan anggota sekolah, dukungan *stakeholder* dan keterlibatan masyarakat. *Tahap kelima* adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan. Sekolah dapat mempelajari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang telah diberikan dan dilatihkan dalam pelatihan SPMI dalam mengimplemen-tasikan SPMI.

c. Pendampingan Sekolah

Supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah membutuhkan pendampingan dari fasilitator. Pendampingan diimplementasikan di setiap sekolah model secara bergantian. Fasilitator daerah mengunjungi sekolah model. Jadwal pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara fasilitator dengan sekolah model selama masih berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

d. Pengimbasan



Gambar 4.10 Pengimbasan Sekolah Model

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan pengimbasan. Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah model. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan pendampingan yang berlangsung di sekolah model. Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah imbas. Anggota tim penjaminan mutu sekolah model diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam mengimplementasikan SPMI seperti yang diterapkan pada sekolah model.

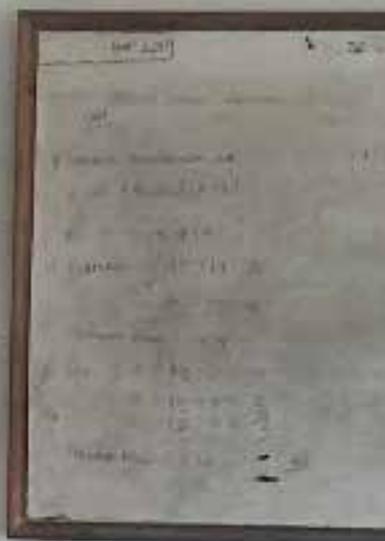
e. Monitoring dan Evaluasi

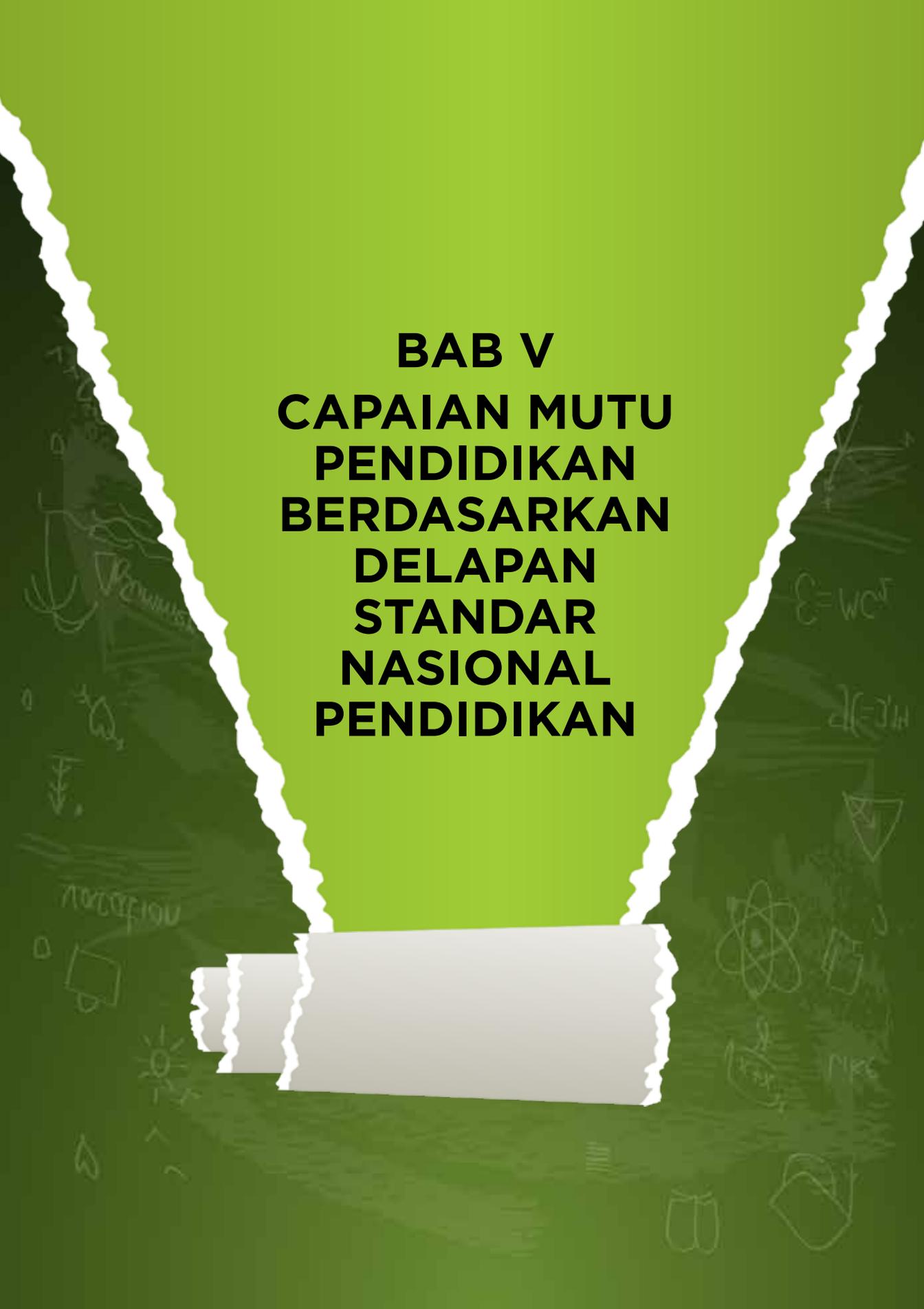
Monitoring implementasi sekolah model dilakukan 2 (dua) kali yaitu satu bulan dan tiga bulan setelah pelaksanaan pelatihan. Monitoring bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah sesuai dengan maksud, tujuan dengan hasil yang akan dicapai. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan menggunakan instrumen yang telah disediakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh fasilitator dengan melibatkan komponen sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan fasilitator kepada LPMP agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat terdokumentasi ke dalam sistem. Setiap semester pelaksanaan sekolah model, LPMP melakukan kegiatan diseminasi hasil pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya. Pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dirancang untuk mewujudkan terciptanya layanan pendidikan yang bermutu di seluruh sekolah di Indonesia pada tahun 2019.

Upaya Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan saja tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah untuk ikut bergerak mendorong sekolah melaksanakan penjaminan mutu sekolah secara mandiri hingga terciptanya budaya mutu di sekolah-sekolah. Petunjuk pelaksanaan sekolah model dan pengimbasan ini disusun untuk dijalankan oleh LPMP. Pemerintah daerah dapat mempelajari petunjuk pelaksanaan ini dalam rangka pelaksanaan sekolah model secara mandiri dengan fasilitasi dari LPMP. Petunjuk pelaksanaan ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dapat dilakukan secara optimal.

DATA ADMINISTRASI KELAS

No	Nama Siswa	Nilai	Uraian	Uraian	Uraian
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					





BAB V
CAPAIAN MUTU
PENDIDIKAN
BERDASARKAN
DELAPAN
STANDAR
NASIONAL
PENDIDIKAN

Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2) kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan *output* berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diagregasi dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline* data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar

Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional

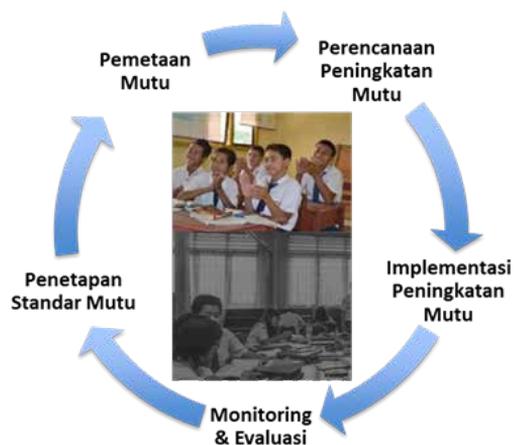
Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas. Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi.
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.

Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar disamping.

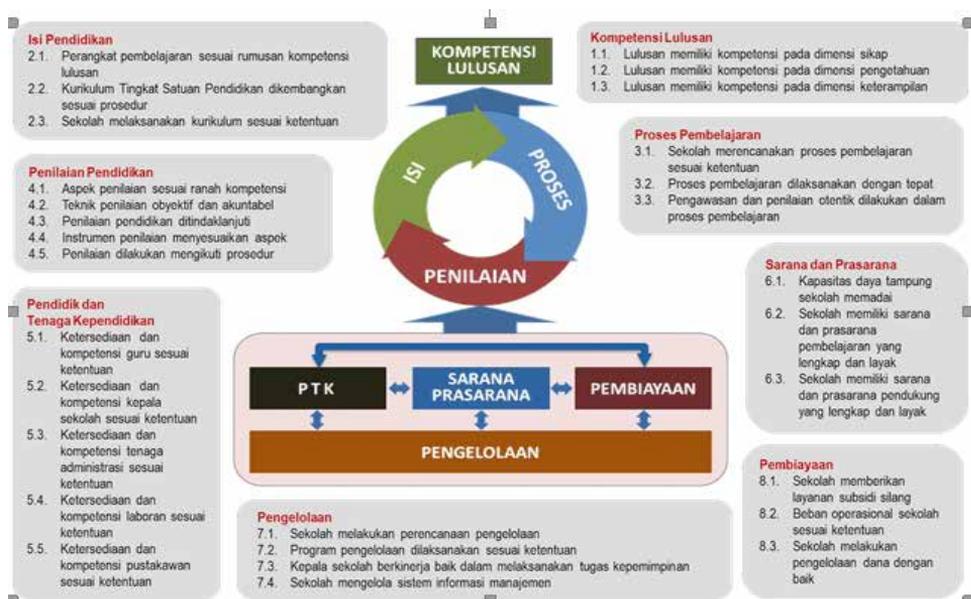


Gambar 5.1 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indicator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.2 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP



Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan.

Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 43 indikator dan 195 sub indikator, yaitu:

Tabel 5.1 Ruang Lingkup Instrumen PMP Tahun 2017

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur.
				1.1.4	Memiliki perilaku yang mencerminkan peduli
				1.1.5	Memiliki perilaku yang mencerminkan percaya diri
				1.1.6	Memiliki perilaku yang mencerminkan bertanggung jawab
				1.1.7	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.8	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
				1.1.9	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.10	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
		1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
2	Standar Isi	2.1	Muatan sesuai dengan rancangan Kurnas	2.1.1	Mengandung muatan nasional
				2.1.2	Pengembangan materi sesuai prinsip-prinsip KTSP
				2.1.3	Pengembangan kompetensi dasar muatan local
		2.2	Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup luasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan	2.2.1	Daftar mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai SNP
				2.2.2	Jam pelajaran per minggu sesuai SNP
				2.2.3	Beban pelajaran per semester sesuai SNP
		2.3	KTSP Sesuai Kurikulum Nasional	2.3.1	Memiliki perangkat pembelajaran KTSP
				2.3.2	Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
				2.3.3	Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP
		3.	Standar Proses	3.1	Proses pembelajaran sesuai SNP
3.1.2	Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar				
3.1.3	Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah				
3.1.4	Pembelajaran berbasis kompetensi				
3.1.5	Pembelajaran terpadu				
3.1.6	Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi				
3.1.7	Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif				
3.1.8	Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar				

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
					sepanjang hayat
				3.1.9	Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas
				3.1.10	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
				3.1.11	Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik
				3.1.12	Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran dilakukan mulai awal semester hingga akhir proses pembelajaran
		3.2	Perencanaan proses Pembelajaran sesuai SNP	3.2.1	Guru membuat RPP
				3.2.2	RPP dievaluasi oleh kepala sekolah
				3.2.3	Isi RPP sesuai kurnas
				3.2.4	Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan.
				3.2.5	Kualitas dokumen RPP sesuai Kurnas.
4.	Standar penilaian pendidikan	4.1	Proses penilaian dilakukan dengan objektif dan terpadu	4.1.1	Mengacu pada kesesuaian KI KD dalam Kurikulum
				4.1.2	Kesesuaian antara indikator materi dan soal
		4.2	Sekolah menerapkan penilaian yang akuntabel	4.2.1	Perangkat yang terdiri dari prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan.
				4.2.2	Penggunaan teknik sesuai dimensi kompetensi yang dinilai.
		4.3	Penilaian dilakukan dengan transparan	4.3.1	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				4.3.2	Dokumen bisa diakses oleh pihak terkait
		4.4	Edukatif-mendidik dan memotivasi siswa dan guru	4.4.1	Redaksi instrumen mendidik
				4.4.2	Digunakan sebagai dasar evaluasi dan ditindaklanjuti dengan remedial atau pengayaan siswa serta perbaikan proses pembelajaran
5.	Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan	5.1	Jumlah & kualifikasi Guru sesuai SNP	5.1.1	Seluruh guru minimal S1/D4
				5.1.2	Rasio guru kelas dan rombel = 1 guru kelas
				5.1.3	Minimal sekolah memiliki satu guru per mata pelajaran
		5.2	Kualifikasi Kepala Sekolah sesuai SNP	5.2.1	Kualifikasi Kepsek minimal S1/D4
				5.2.2	Maksimal waktu diangkat 56 tahun
				5.2.3	Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
				5.2.4	Memiliki pangkat serendahrendahnya III/c atau setara
		5.3	Ketersediaan Kepala Tenaga Administrasi	5.3.1	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2	Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat.
				5.3.3	Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah
		5.4	Pelaksanaan Urusan Administrasi	5.4.1	Memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi minimal 1
				5.4.2	Lulusan SMA/MA/ SMK/MAK
		5.5	Ketersediaan Kepala Perpustakaan Sekolah	5.5.1	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan
				5.5.2	Berpendidikan minimal lulusan S1/D4 (untuk pendidik) atau D2 (untuk non pendidik)
				5.5.3	Memiliki sertifikat kompetensi

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
					pengelolaan perpustakaan
				5.5.4	Masa kerja 3 tahun (pendidik) atau 4 tahun (non pendidik)
		5.6	Tenaga Perpustakaan sekolah	5.6.1	Memiliki tenaga perpustakaan minimal 1
				5.6.2	Lulusan SMA/MA/ SMK/MAK
		5.7	Ketersediaan tenaga laboratorium	5.7.1	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi
				5.7.2	Berpendidikan minimal lulusan S1/D4 (untuk pendidik) atau D3 (untuk non pendidik)
				5.7.3	Memiliki sertifikat kepala laboratorium
				5.7.4	Masa Kerja 3 tahun (pendidik) atau 5 tahun (non pendidik)
		5.8	Tenaga Teknisi Laboran	5.8.1	Memiliki tenaga pustakawan minimal 1
				5.8.2	Lulusan D2 terkait laboratorium
		5.9	Tenaga Laboran	5.9.1	Memiliki tenaga pustakawan minimal 1
				5.9.2	Lulusan D1 terkait laboratorium
		5.10	Kompetensi guru sesuai SNP	5.10.1	Guru memiliki sertifikat pendidik
				5.10.2	Kompetensi pedagogic minimal baik.
				5.10.3	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.10.4	Kompetensi professional minimal baik
		5.11	Kompetensi Kepala Sekolah sesuai SNP	5.11.1	Kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik
				5.11.2	Kepala sekolah memiliki sertifikat kepala sekolah
				5.11.3	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.11.4	Kompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				5.11.5	Kompetensi kewirausahaan minimal baik.
				5.11.6	Kompetensi supervisi minimal baik
				5.11.7	Kompetensi sosial minimal baik.
		5.12	Kompetensi kepala administrasi sesuai SNP	5.12.1	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.12.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.12.3	Kompetensi teknis minimal baik.
				5.12.4	Kompetensi manjerial meinimal baik.
		5.13	Kompetensi pelaksana urusan administrasi sesuai SNP	5.13.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.13.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.13.3	Kompetensi teknis minimal baik.
		5.14	Kompetensi kepala perpustakaan sesuai SNP	5.14.1	Kompetensi manajerial minimal baik
				5.14.2	Kompetensi pengelolaan informasi minimal baik.
				5.14.3	Kompetensi kependidikan minimal baik
				5.14.4	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.14.5	Kompetensi sosial minimal baik
				5.14.6	Kompetensi pengembangan profesi minaml baik.
		5.15	Kompetensi tenaga perpustakaan sesuai SNP	5.15.1	Kompetensi pengelolaan informasi minimal baik.
				5.15.2	Kompetensi kependidikan minimal baik
				5.15.3	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.15.4	Kompetensi sosial minimal baik

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				5.15.5	Kompetensi pengembangan profesi minimal baik.
		5.16	Kompetensi Kepala Laboratorium sesuai SNP	5.16.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.16.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.16.3	Kompetensi manajerial minimal baik
				5.16.4	Kompetensi profesional minimal baik
		5.17	Kompetensi Teknisi Laboran sesuai SNP	5.17.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.17.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.17.3	Kompetensi administrasi minimal baik
				5.17.4	Kompetensi profesional minimal baik
		5.18	Kompetensi laboran sesuai SNP	5.18.1	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.18.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.18.3	Kompetensi administratif minimal baik.
				5.18.4	Kompetensi professional minimal baik.
6	Standar sarana dan prasarana	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah sesuai SNP	6.1.1	Kapasitas rombongan belajar sesuai standar
				6.1.2	Rasio siswa per rombel sesuai standar
				6.1.3	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.4	Kondisi dan lokasi lahan sekolah sesuai dengan SNP
				6.1.5	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.6	Kondisi dan lokasi bangunan sekolah sesuai dengan SNP

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		6.2	Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran	6.2.1	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3	Memiliki ruang perpustakaan sesuai Standar
				6.2.4	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8	Memiliki laboratorium computer sesuai standar
				6.2.9	Memiliki laboratorium Bahasa sesuai dengan standar
				6.2.10	Memiliki ruang praktik gambar teknik sesuai standar (SMK)
		6.3	Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana Pendukung	6.3.1	Memiliki ruang pimpinan sesuai Standar
				6.3.2	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar.
				6.3.8	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		6.4	Kondisi sarana dan prasarana pembelajaran	6.4.1	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.4.2	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.4.3	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.4.4	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.4.5	Kondisi laboratorium biologi layak Pakai
				6.4.6	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.4.7	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.4.8	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.4.9	Kondisi laboratorium bahasa layak Pakai
				6.4.10	Kondisi ruang praktik gambar teknik layak pakai (SMK)
		6.5	Kondisi sarana dan prasarana pendukung	6.5.1	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.5.2	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.5.3	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.5.4	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.5.5	Kondisi jamban sesuai standar
				6.5.6	Kondisi gudang layak pakai
				6.5.7	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.5.8	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.5.9	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.5.10	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar pengelolaan	7.1	Perencanaan program dilaksanakan sesuai standard	7.1.1	Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator	
			yang melibatkan pemangku kepentingan		sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah	
				7.1.2	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar	
				7.1.3	Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah	
		7.2	Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan		7.2.1	Kelengkapan pedoman pengelolaan sekolah
					7.2.2	Penerimaan Siswa berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel
					7.2.3	Penyediaan layanan konseling, ekstra kokurikuler, pembinaan prestasi dan pelacakan alumni
					7.2.4	Pengembangkan program peningkatan kapasitas SDM
					7.2.5	Pembentukan suasana, iklim, dan Lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan
					7.2.6	Pelibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah/ madrasah dalam mengelola pendidikan
					7.2.7	Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik
7.3	Sekolah melaksanakan pengawasan dan	7.3.1	Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan			

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
			evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala		ke seluruh pemangku kepentingan
				7.3.2	Pemantauan pengelolaan sekolah/ madrasah dilakukan oleh komite sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan
				7.3.3	Supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah dan pengawas sekolah/ madrasah
				7.3.4	Sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
				7.3.5	Sekolah melakukan evaluasi & tindak lanjut hasil pengawasan
		7.4	Kepala sekolah berkinerja baik	7.4.1	Kepribadian dan Sosial
				7.4.2	Kepemimpinan
				7.4.3	Pengembangan Sekolah/Madrasah
				7.4.4	Pengelolaan Sumber Daya
				7.4.5	Kewirausahaan
				7.4.6	Supervisi
		7.5	Sekolah mengelola system informasi sekolah	7.5.1	Sekolah memiliki SIM
8	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi	8.1.1	Setiap siswa yang tidak mampu tidak dipungut biaya pendidikan
				8.1.2	Sekolah memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		8.2	Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi total jumlah siswa)	8.2.1	Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi total jumlah siswa)
		8.3	Pengelolaan dana yang masuk ke sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses, dapat diaudit)	8.3.1	alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/ Yayasan/sumber Lainnya
				8.3.2	Sekolah memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3	Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan

Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2017 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat per 6 Desember 2017 yang mencapai 90% yang meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan. Data yang digunakan dalam pengolahan peta capaian SNP Provinsi Bali ini adalah data sekolah yang terkirim lengkap untuk semua jenis responden dan diterima di server pusat per 30 November 2017. Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor < 2,04
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,06$
4. Menuju SNP level 4 : $5,06 \leq \text{skor} < 6,66$
5. SNP : $6,66 \leq \text{skor} \leq 7,00$

X JB 2

SMK N 1 TEMBUKU



WALAU PUN
WARNA BEDA
TAPI SATU
JIWA

...
...
...

...

...

...

...

...

...

...



**BAB VI
MONITORING
DAN
EVALUASI
SEKOLAH
MODEL**

Tempat dan Waktu

Monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah model yang meliputi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan pada tahun 2017 di laksanakan pada seluruh sekolah binaan LPMP Provinsi yang berjumlah 140 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulan Nopember 2016 yang melibatkan manajemen LPMP, widyaiswara, dan staf fungsional umum LPMP Bali.

Teknik Penentuan Responden

Monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah model yang meliputi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan melibatkan responden sebanyak 140 sekolah (sebagai unit analisis) dengan teknik FGD (*focus group discussion*) yang melibatkan guru, kepala sekolah, pengawas, dan komite sekolah. Sekolah yang ditetapkan sebagai responden dengan kriteria telah menjadi sekolah model binaan LPMP Bali tahun 2017. Rincian responden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Rincian Responden Monitoring dan Evaluasi

NO	Kabupaten	Jenjang				Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	Buleleng	10	5	4	4	23
2	Jembrana	5	3	2	1	11
3	Tabanan	12	4	1	1	18
4	Badung	10	3	3	0	16
5	Gianyar	8	3	2	3	16
6	Klungkung	7	2	1	1	11
7	Bangli	6	3	1	1	11
8	Karangasem	10	4	1	0	15
9	Denpasar	10	4	4	1	19
	Jumlah	78	31	19	12	140



Metode Pengumpulan Data dan Instrumen

a. Metode Pengumpulan Data

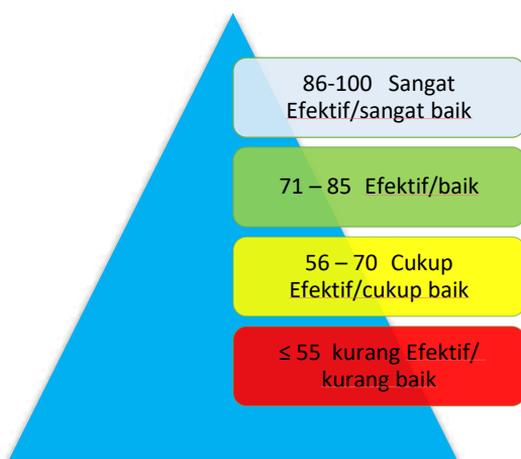
Data yang dikumpulkan dalam Monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah model yang meliputi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI), implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan pada tahun 2017 di Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif terkait program penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan pada tahun 2017. Pengumpulan data penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan tahun 2017 menggunakan ceklis dengan metode observasi dan wawancara terbuka dan tertutup.

b. Instrumen

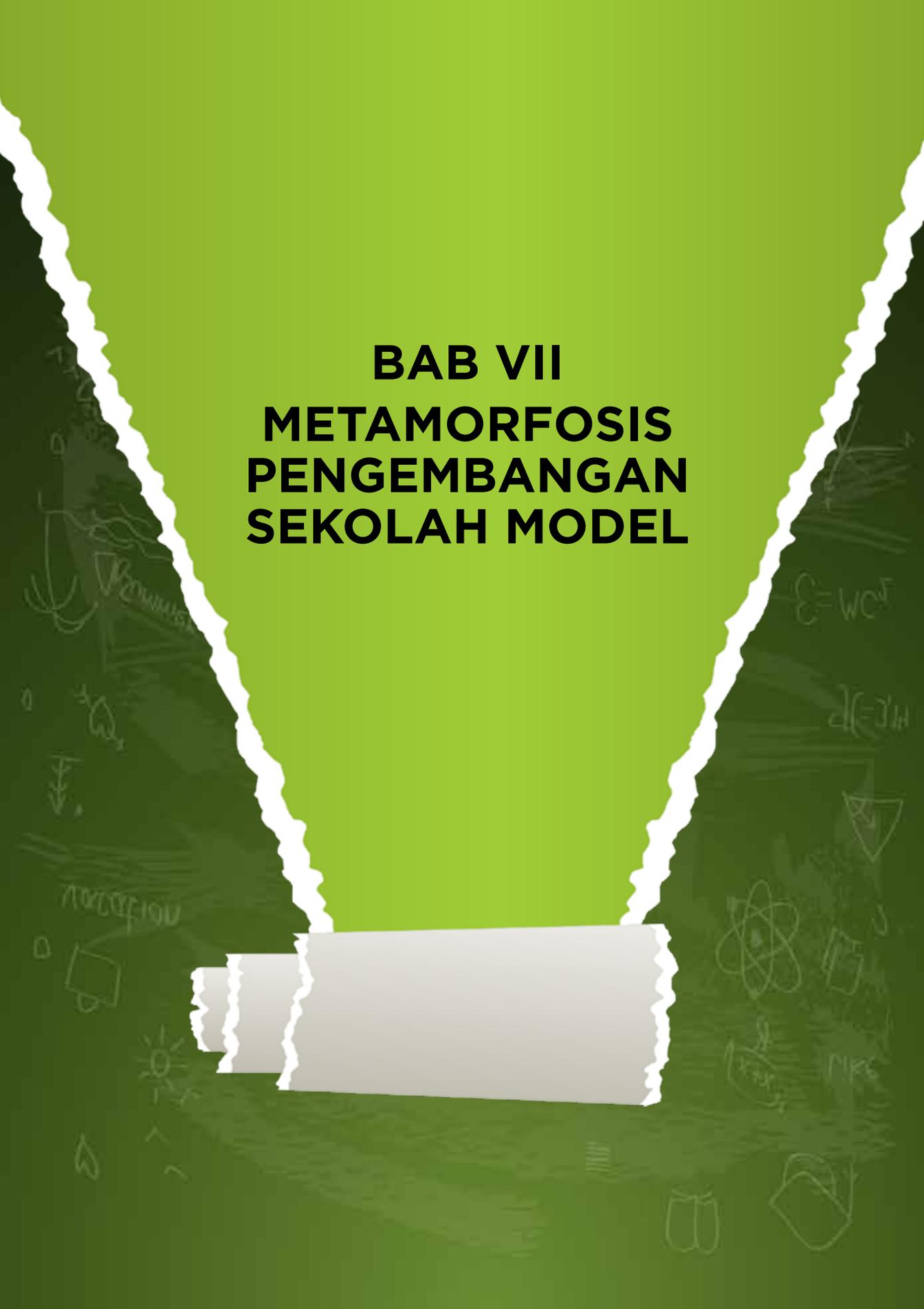
Monitoring dan evaluasi monitoring pengembangan sekolah model yang meliputi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI), implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan di Provinsi Bali bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program SPMI, implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan. Adapun gambaran itu didapat dengan memberikan instrumen untuk menjangkau fakta atau data serta melakukan pengamatan dan wawancara untuk mendukung data yang diperoleh. Hasil analisis juga dilengkapi dengan analisis kendala serta solusi yang ditawarkan.

c. Analisis Data

Data hasil pengumpulan data monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah model yang meliputi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI), implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan bagi sekolah model di Provinsi Bali Tahun 2017 dalam bentuk skala interval yang diperoleh langsung dari responden sebagai data primer dan utama. Data kualitatif dijadikan pelengkap data kuantitatif. Data diskor dengan skor komposit sesuai dengan jenis pertanyaan pada suatu butir tergantung kualitas pertanyaan. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dalam bentuk persentase, artinya semua data pada butir instrumen dirubah ke skor 100. Efektivitas pelaksanaan program sistem penjaminan mutu internal (SPMI), implementasi kurikulum 2013 dan capaian mutu pendidikan menggunakan kategorisasi sebagai berikut.



Gambar 6.1 Klasifikasi Efektivitas Pelaksanaan Program



BAB VII
METAMORFOSIS
PENGEMBANGAN
SEKOLAH MODEL

Praktek SPMI Bagi Sekolah Model

Program SPMI yang dilakukan oleh LPMP Bali Tahun 2017 meliputi proses pendampingan, dampak pendampingan, implementasi SPMI, dan hasil implementasi SPMI. Keempat bagian ini, dalam kajian ini dimasukkan dalam dimensi. Efektivitas program SPMI di potret dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dalam bentuk ceklis disertai bukti fisik. Penyeoran instrumen dilakukan dengan pedoman penyeoran yang bersifat komposit. Semua butir instrumen memiliki bobot yang sama, sehingga hasil penyeorannya diubah menjadi skor standar 100.

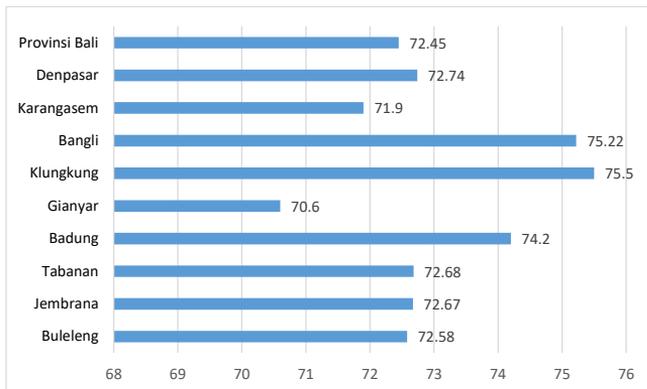
Efektivitas program SPMI diklasifikasikan menjadi empat, yakni sangat efektif (86 - 100), efektif (71 – 85), cukup efektif (56 – 70), dan kurang efektif (kurang dari sama dengan 55). Hasil analisis efektivitas program SPMI untuk masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi disajikan dalam bentuk tabel dan grafik seperti terlihat dalam bagian berikut.

Tabel 7.1 Efektivitas Program SPMI di Provinsi Bali Secara Keseluruhan

No.	Kabupaten/Kota	Efektivitas Program SPMI (%)	Keterangan
1.	Buleleng	72.58	Efektif
2.	Jembrana	72.67	Efektif
3.	Tabanan	72.68	Efektif
4.	Badung	74.20	Efektif
5.	Gianyar	70.60	Cukup Efektif
6.	Klungkung	75.50	Efektif
7.	Bangli	75.22	Efektif
8.	Karangasem	71.90	Efektif
9.	Denpasar	72.74	Efektif
10.	Provinsi Bali	72.45	Efektif

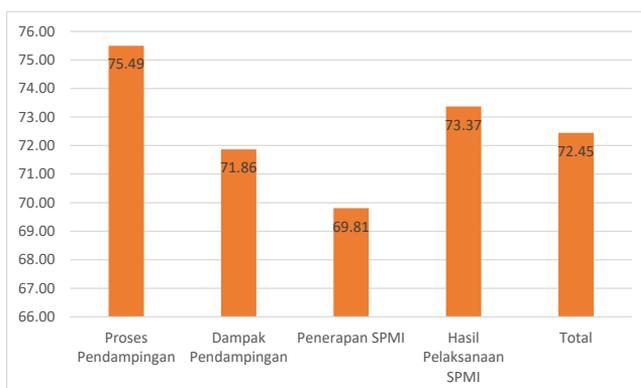
(Sumber: Analisis Instrumen)

Untuk lebih jelasnya tentang efektivitas pelaksanaan program SPMI bagi sekolah model di provinsi Bali untuk masing-masing Kabupaten/Kota disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 7.1 Grafik Efektivitas Program SPMI Masing-Masing Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas program SPMI di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 72,45% dengan klasifikasi efektif. Rincian klasifikasi pelaksanaan program SPMI masing-masing Kabupaten adalah: Kabupaten Buleleng sebesar 72,58% (efektif), Kabupaten Jembrana sebesar 72,67% (efektif), Kabupaten Tabanan 72,68% (efektif), Kabupaten Badung 74,20% (efektif), Kabupaten Gianyar 70,60% (cukup efektif), kabupaten Klungkung 75,22% (efektif), Kabupaten Bangli 75,22% (efektif), Kabupaten Karangasem 71,90% (efektif), dan Kota Denpasar 72,74% (efektif). Ini menunjukkan bahwa program SPMI yang dilakukan LPMP tahun 2017 tergolong efektif. Efektivitas program SPMI masing-masing dimensi di Provinsi Bali digambarkan sebagai berikut.



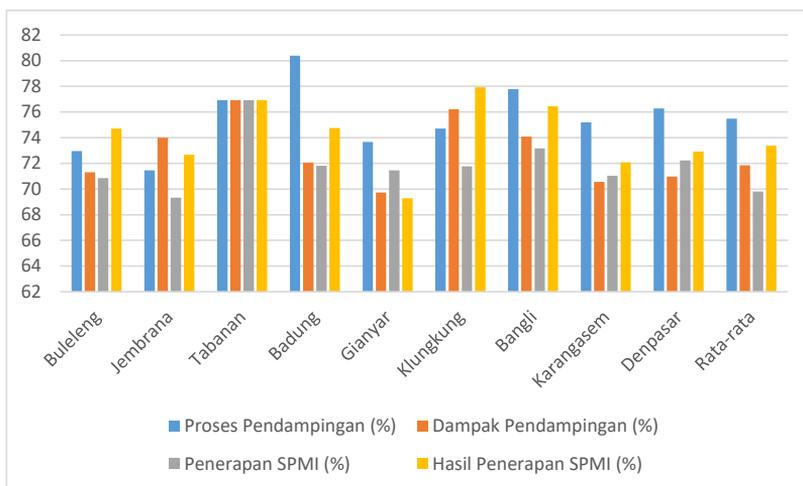
Gambar 7.2 Grafik Efektivitas Program SPMI Masing-masing Dimensi di Provinsi Bali Tahun 2017

Pengukuran efektivitas program SPMI bagi sekolah model di Provinsi Bali melibatkan empat dimensi /aspek, yaitu: 1) proses pendampingan, 2) dampak pendampingan, 3) implementasi SPMI, dan 4) hasil implementasi SPMI. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program SPMI dilihat dari masing-masing dimensi/aspek pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 7.2 Efektivitas Program SPMI untuk Masing-masing Dimensi/Aspek

Kab/Kota	Dimensi			
	Proses Pendampingan (%)	Dampak Pendampingan (%)	Penerapan SPMI (%)	Hasil Penerapan SPMI (%)
Buleleng	72.95	71.30	70.86	74.71
Jembrana	71.46	74.01	69.32	72.67
Tabanan	76.93	76.93	76.93	76.93
Badung	80.38	72.07	71.81	74.75
Gianyar	73.67	69.73	71.45	69.28
Klungkung	74.71	76.21	71.77	77.93
Bangli	77.78	74.08	73.16	76.44
Karangasem	75.20	70.56	71.03	72.08
Denpasar	76.27	70.97	72.22	72.92
Rata-rata	75.49	71.86	69.81	73.37
Keterangan	Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Efektif

Untuk lebih jelasnya, gambaran umum tabel di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, seperti tampak pada gambar berikut.

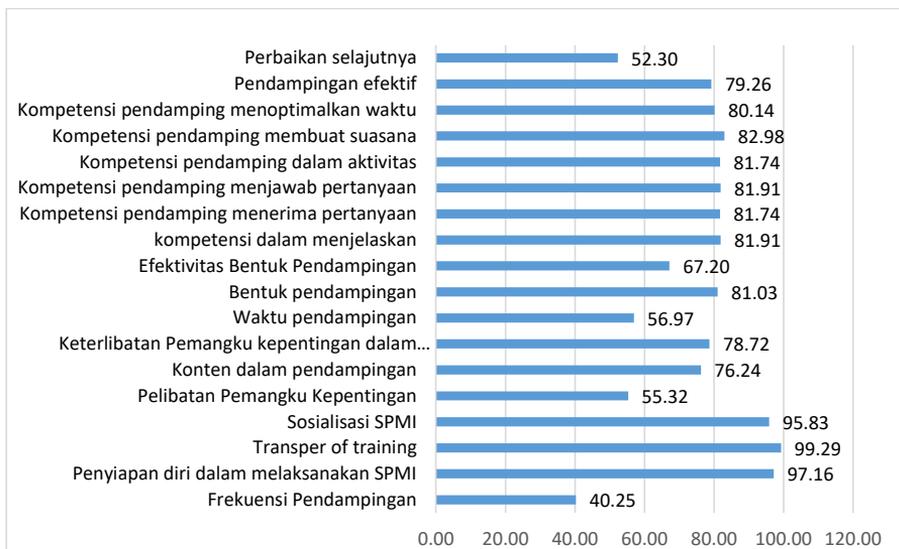


Gambar 7.3 Grafik Efektivitas Program SPMI untuk Masing-masing Dimensi pada Masing-masing Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada dimensi proses pendampingan, dampak pendampingan, serta hasil implementasi menunjukkan bahwa SPMI sudah berjalan efektif, namun pada dimensi penerapan tingkat efektivitasnya cukup baik. Klasifikasi ini terjadi karena waktu implementasi sangat terbatas, sehingga hal-hal yang bersifat perlu penajaman belum bisa dilaksanakan dengan baik. Tingkat pengetahuan peserta tentang SPMI sudah dikuasai oleh pendamping, namun pada tahap implementasi belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Untuk lebih jelas tentang efektivitas pelaksanaan program SPMI masing-masing dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Proses Pendampingan

Proses pendampingan program SPMI dipotret menggunakan 18 butir instrumen ang tersebar dari nomor butir 1 sampai butir 18. Dari butir ini kemudian disekor, selanjutnya diubah menjadi skor standar 100. Hasil analisis dimensi proses pendampingan dapat digambarkan sebagai berikut.

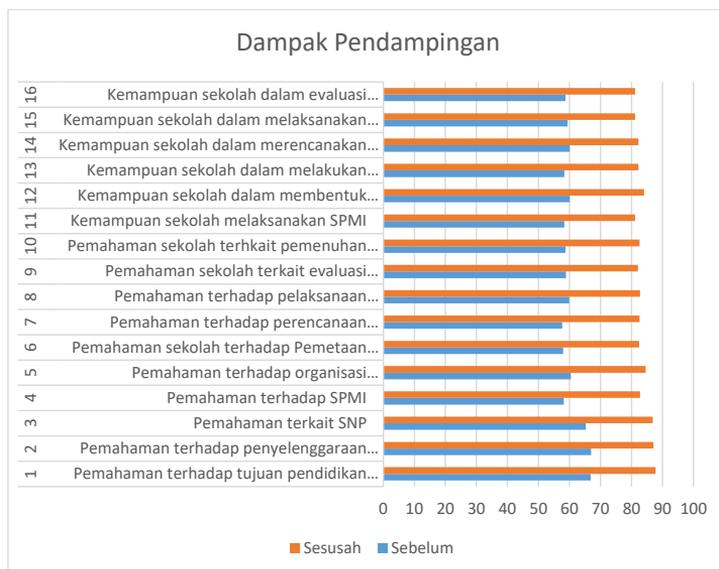


Gambar 7.4 Proses Pendampingan Program SPMI

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa terjadi varians yang cukup besar antara butir yang satu dengan butir yang lain pada dimensi proses pendampingan. Proses pendampingan memiliki rentang skor dari 40,25% sampai 99,29%. Frekuensi pendampingan relatif rendah karena terbentur dengan anggaran. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penerapan SPMI juga belum maksimal dilakukan, demikian pula waktu pendampingan juga terbatas. Selain itu indikator-indikator yang lain sudah cukup efektif.

Dampak Pendampingan

Dampak pendampingan diukur menggunakan instrumen sebanyak 16 butir yang tersebar dari nomor butir 16 sampai dengan 34. Penyekoran sama dengan dimensi yang lain. Hasil analisis implementasi SPMI pada dimensi dampak pendampingan disajikan pada gambar berikut.

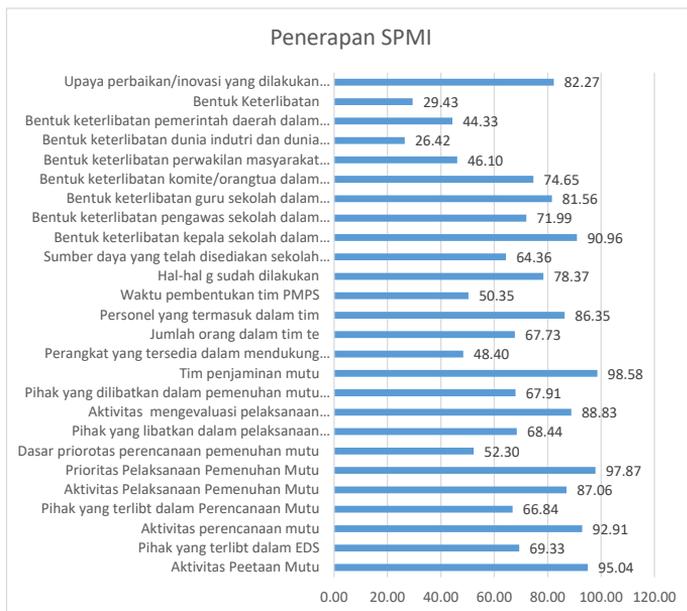


Gambar 7.5 Dampak Pendampingan Program SPMI

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa terjadi varians yang relative sama antara butir yang satu dengan butir yang lain pada dimensi dampak pendampingan. Dampak pendampingan; sebelum dan sesudah pendampingan berdampak signifikan untuk semua butir. Dengan demikian, menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas berdampak signifikan sebelum dan sesudah pendampingan.

Implementasi SPMI di Sekolah

Implementasi SPMI di sekolah diukur menggunakan instrumen sebanyak 19 butir yang tersebar dari nomor butir 35 sampai dengan 60. Penyekoran sama dengan dimensi yang lain. Hasil analisis implementasi SPMI pada dimensi penerapan SPMI di satuan pendidikan disajikan pada gambar berikut.

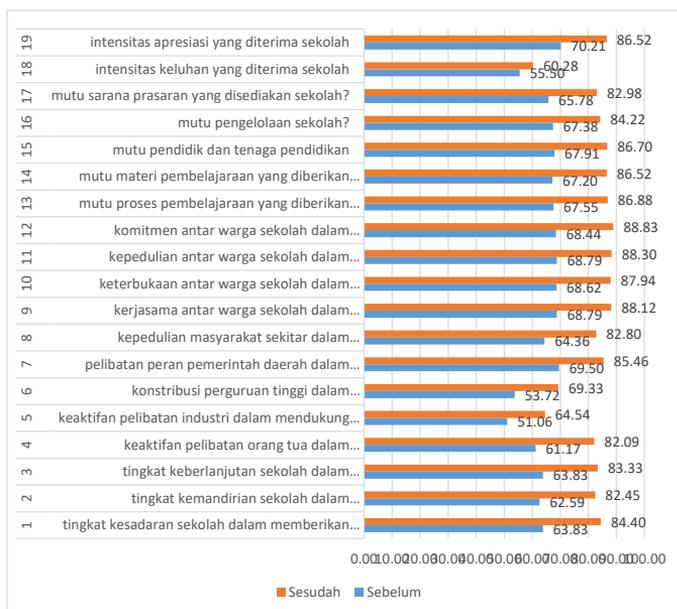


Gambar 7.6 Implementasi SPMI pada Satuan Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa terjadi varians yang relatif tinggi antara butir yang satu dengan butir yang lain pada dimensi pada implementasi SPMI. Aktivitas pemetaan, akativitas perencanaan mutu, priorotas pelaksanaan pemenuhan mutu, tim penjamimnan mutu dan bentuk keterlibatan kepala sekolah tergolong sudah efektif. Indikator yang belum efektif berkisaran keterlibatan pihak luar. Dengan demikian, menunjukkan bahwa implementasi SPMI pada satuan pendidiakn yang dilakukan sekolah model masih beragam dilihat dari tingkat efektivitasnya. Bentuk keterlibatan *stake holders* dalam implementasi SPMI tingkat efektivitasnya paling rendah. Untuk itu keterlibatan *stake holders* perlu ditingkatkan partisipasinya.

Hasil Implementasi SPMI di Sekolah

Hasil implementasi SPMI di sekolah diukur menggunakan instrumen sebanyak 26 butir yang tersebar dari nomor butir 61 sampai dengan 79. Penyekoran sama dengan dimensi yang lain. Hasil analisis implementasi SPMI pada dimensi hasil penerapan SPMI di satuan pendidikan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 7.7 Hasil Implementasi SPMI pada Satuan Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa terjadi varians yang relatif sama antara butir yang satu dengan butir yang lain pada dimensi hasil implementasi SPMI pada satuan pendidikan. Hasil implementasi SPMI pada satuan pendidikan tergolong efektif sekitar 73,79%; sebelum dan sesudah berdampak signifikan untuk semua butir. Namun, dari beberapa butir juga ada yang belum efektif yakni kontribusi perguruan tinggi dan keterlibatan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil implementasi SPMI pada satuan pendidikan baru pada kepentingan internal saja.

Secara rinci efektivitas program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) seluruh sekolah model di Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Efektivitas Program SPMI Sekolah Model Secara Kesekuruhan

No	Instansi	Kab/Kota	Capain (%)	Kategori
1	SDN 1 Bondalem	Buleleng	69.05	Cukup efektif
2	SDN 1 Dencarik	Buleleng	66.74	Cukup efektif
3	SD N 1 Sangsit	Buleleng	75.52	Efektif
4	SD Negeri 2 Penuktukan	Buleleng	65.36	Cukup efektif
5	SDN 3 Bubunan	Buleleng	66.51	Cukup efektif
6	SDN 3 Sambangan	Buleleng	71.36	Efektif
7	SD N 4 Banyuasri	Buleleng	84.06	Efektif
8	SDN 4 Kampung Baru	Buleleng	74.60	Efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capain (%)	Kategori
9	SD N 4 Tamblang	Buleleng	76.44	Efektif
10	SD N 2 Patas	Buleleng	72.52	Efektif
11	SMPN 1 Banjar	Buleleng	72.06	Efektif
12	SMPN 1 Kubutambahan	Buleleng	69.28	Cukup efektif
13	SMPN 1 Sawan	Buleleng	63.97	Cukup efektif
14	SMPN 2 Singaraja	Buleleng	75.06	Efektif
15	SMPN 4 Singaraja	Buleleng	81.52	Efektif
16	SMAN Bali Mandara	Buleleng	79.21	Efektif
17	SMAN 1 Gerokgak	Buleleng	73.90	Efektif
18	SMAN 1 Banjar	Buleleng	71.59	Efektif
19	SMAN 3 Singaraja	Buleleng	71.82	Efektif
20	SMK TI Bali Global	Buleleng	72.52	Efektif
21	SMK Pariwisata Triatmajaya	Buleleng	74.36	Efektif
22	SMKN 2 Seririt	Buleleng	74.60	Efektif
23	SMKN 1 Kubutambahan	Buleleng	63.97	Cukup efektif
24	SD Negeri 1 Dangin Tukadaya	Jembrana	71.13	Efektif
25	SDN 1 Kaliakah	Jembrana	71.13	Efektif
26	SDN 1 Pekutatan	Jembrana	78.98	Efektif
27	SD N 2 Baluk	Jembrana	57.51	Cukup efektif
28	SDN 2 Tegalcangkring	Jembrana	72.52	Efektif
29	SMPN 3 Mendoyo	Jembrana	60.74	Cukup efektif
30	SMPN 3 Melaya	Jembrana	76.21	Efektif
31	SMPN 4 Negara	Jembrana	81.06	Efektif
32	SMAN 2 NEGARA	Jembrana	78.06	Efektif
33	SMA N 2 MENDOYO	Jembrana	65.82	Cukup efektif
34	SMKN 3 Mendoyo	Jembrana	72.29	Efektif
35	SDN 5 Kediri	Tabanan	68.13	Cukup efektif
36	SDN 1 Mekarsari	Tabanan	63.51	Cukup efektif
37	SD N 1 Mundeh	Tabanan	77.83	Efektif
38	SDN 2 Bajera	Tabanan	72.98	Efektif
39	SDN 2 Cau Belayu	Tabanan	65.36	Cukup efektif
40	SDN 7 Banjar Anyar	Tabanan	65.13	Cukup efektif
41	SDN 1 Pandak Gede	Tabanan	60.51	Cukup efektif
42	SDN I Biaung	Tabanan	84.53	Efektif
43	SDN 1 Kelating	Tabanan	75.06	Efektif
44	SDN 2 Sudimara	Tabanan	74.83	Efektif
45	SDN1 Denbantas	Tabanan	72.98	Efektif
46	SDN2 Jegu	Tabanan	63.74	Cukup efektif
47	SMPN 1 Penebel	Tabanan	76.21	Efektif

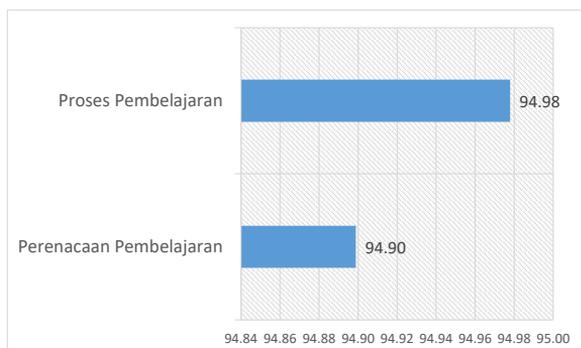
No	Instansi	Kab/Kota	Capain (%)	Kategori
48	SMPN 1 Baturiti	Tabanan	79.45	Efektif
49	SMPN 2 Tabanan	Tabanan	74.13	Efektif
50	SMPN 2 Selemadeg Timur	Tabanan	59.82	Cukup efektif
51	SMAN 1 Penebel	Tabanan	85.68	Sangat efektif
52	SMKN 3 Tabanan	Tabanan	67.44	Cukup efektif
53	SDN 4 Jimbaran	Badung	81.76	Efektif
54	SDN 2 Tuban	Badung	72.75	Efektif
55	SDN 2 Tibubeneng	Badung	85.68	Sangat efektif
56	SD No. 3 Kerobokan	Badung	70.44	Cukup efektif
57	SD No. 1 Kuta	Badung	72.75	Efektif
58	SD Negeri 3 Mengwi	Badung	65.59	Cukup efektif
59	SD No 3 Darmasaba	Badung	72.52	Efektif
60	SD No.11 Jimbaran	Badung	81.99	Efektif
61	SD No. 1 Blahkiuh	Badung	67.67	Cukup efektif
62	SDN 2 Kapal	Badung	69.05	Cukup efektif
63	SMPN 1 Mengwi	Badung	64.67	Cukup efektif
64	SMPN 2 Kuta	Badung	63.28	Cukup efektif
65	SMP N 2 Mengwi	Badung	72.75	Efektif
66	SMA N 1 Mengwi	Badung	74.13	Efektif
67	SMAN 1 Kuta	Badung	72.29	Efektif
68	SMAN 1 Kuta Selatan	Badung	77.83	Efektif
69	SDN 1 Ubud	Gianyar	59.58	Cukup efektif
70	SDN 12 Melinggih kelod	Gianyar	76.67	Efektif
71	SDN 3 Kedewatan	Gianyar	65.82	Cukup efektif
72	SDN 3 Buruan	Gianyar	71.59	Efektif
73	SDN 4 Manukaya	Gianyar	68.13	Cukup efektif
74	SDN 3 Tegallalang	Gianyar	76.91	Efektif
75	SDN I Lebih	Gianyar	65.82	Cukup efektif
76	SDN 1 Pejeng	Gianyar	69.98	Cukup efektif
77	SMPN 2 Gianyar	Gianyar	76.91	Efektif
78	SMP N 1 Ubud	Gianyar	77.37	Efektif
79	SMPN 1 Blahbatuh	Gianyar	77.60	Efektif
80	SMAN 1 Tegallalang	Gianyar	71.13	Efektif
81	SMA N 1 Gianyar	Gianyar	65.57	Cukup efektif
82	SMKN 1 Tegalalang	Gianyar	81.06	Efektif
83	SMK PGRI 1 Gianyar	Gianyar	64.67	Cukup efektif
84	SMK Pariwisata Putra Bangsa	Gianyar	65.36	Cukup efektif
85	SDN 1 Takmung	Klungkung	67.67	Cukup efektif
86	SDN 2 Semarapura Tengah	Klungkung	78.52	Efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capain (%)	Kategori
87	SDN 1 Akah	Klungkung	79.68	Efektif
88	SDN 3 Banjarangkan	Klungkung	71.82	Efektif
89	SDN 3 Kusamba	Klungkung	77.37	Efektif
90	SDN 1 Paksewali	Klungkung	68.82	Cukup efektif
91	SDN 1 Batununggul	Klungkung	75.75	Efektif
92	SMPN 1 Banjarangkan	Klungkung	74.13	Efektif
93	SMPN 1 Nusa Penida	Klungkung	60.74	Cukup efektif
94	SMAN 1 Semarapura	Klungkung	79.45	Efektif
95	SMKN 1 Nusa Penida	Klungkung	87.30	Sangat efektif
96	SD N 1 Sulahan	Bangli	67.44	Cukup efektif
97	SDN 1 Tamanbali	Bangli	64.43	Cukup efektif
98	SDN 2 Kubu	Bangli	79.68	Efektif
99	SDN 3 Tembuku	Bangli	68.82	Cukup efektif
100	SDN Manikliyu	Bangli	79.91	Efektif
101	SDN 1 Batur	Bangli	82.22	Efektif
102	SMPN 1 Susut	Bangli	84.06	Efektif
103	SMPN 3 Tembuku	Bangli	66.97	Cukup efektif
104	SMPN 3 Bangli	Bangli	78.06	Efektif
105	SMA 1 Susut	Bangli	71.82	Efektif
106	SMKN 1 Tembuku	Bangli	73.67	Efektif
107	SDN Bongaya	Karangasem	60.05	Cukup efektif
108	SDN 4 Padangkerta	Karangasem	87.30	Sangat efektif
109	SDN 5 Karangasem	Karangasem	81.99	Efektif
110	SDN 1 Besakih	Karangasem	73.90	Efektif
111	SDN 1 Ulakan	Karangasem	68.13	Cukup efektif
112	SD N 6 Karangasem	Karangasem	87.30	Sangat efektif
113	SDN 1 Sidemen	Karangasem	71.82	Cukup efektif
114	SDN 1 Pertama	Karangasem	81.99	Efektif
115	SDN 4 Subagan	Karangasem	87.30	Sangat efektif
116	SDN 1 Tulamben	Karangasem	60.05	Cukup efektif
117	SMPN 1 Manggis	Karangasem	60.74	Cukup efektif
118	SMP N 1 Amlapura	Karangasem	71.82	Efektif
119	SMPN 1 Abang	Karangasem	77.83	Efektif
120	SMAN 1 Bebandem	Karangasem	81.99	Efektif
121	SMPN 1 Kubu	Karangasem	75.75	Efektif
122	SDN 29 Dangin Puri	Denpasar	66.28	Cukup efektif
123	SDN 2 Ssetan	Densel	75.29	Efektif
124	SDN 1 Sumerta	Denpasar	79.45	Efektif
125	SDN 7 KESIMAN	DENPASAR	77.14	Efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capain (%)	Kategori
126	SDN 8 Dauh Puri	Denpasar	80.60	Efektif
127	SDN 9 Ssetan	Denpasar	59.35	Cukup efektif
128	SDN. 18 Pemecutan	Denpasar	68.13	Cukup efektif
129	SDN 17 Dauh Puri	Denpasar	71.82	Efektif
130	SD Negeri 7 Dauh Puri	Denpasar	64.90	Cukup efektif
131	SDN 7 Pedungan	Denpasar	66.74	Cukup efektif
132	SMPN 4 Denpasar	Denpasar	72.75	Efektif
133	SMPN 10 Denpasar	Denpasar	69.98	Cukup efektif
134	SMP 3 Denpasar	Denpasar	71.59	Efektif
135	SMPN 8 Denpasar	Denpasar	72.52	Efektif
136	SMAN 5 Denpasar	Denpasar	71.13	Efektif
137	SMA N 8 Denpasar	Denpasar	73.90	Efektif
138	SMAN 2 Denpasar	Denpasar	67.21	Cukup efektif
139	SMAN 7 Denpasar	Denpasar	73.21	Efektif
140	SMK Pariwisata Harapan	Denpasar	76.44	Efektif

Implementasi Kurikulum 2013 bagi Sekolah Model

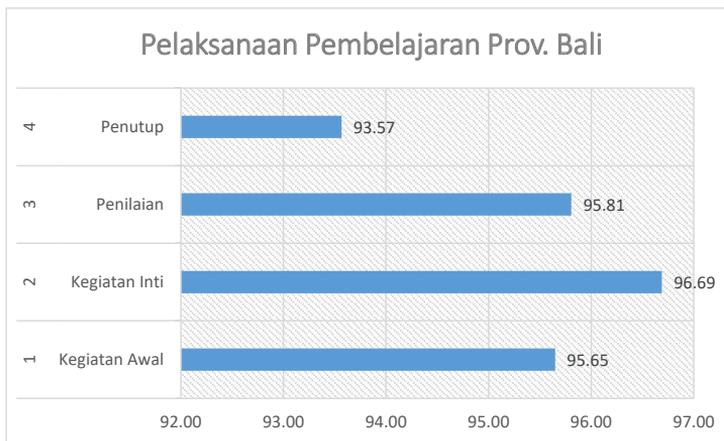
Kurikulum 2013 telah diimplementasikan di sekolah model pada tahun 2017 pada berbagai kegiatan di sekolah meliputi yaitu: (a) perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP); dan (b) pelaksanaan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan penutup pembelajaran. Dari dua hal tersebut di atas yang menjadi fokus kegiatan monitoring dan evaluasi. Implementasi kurikulum 2013 pada sekolah model di Provinsi Bali tergolong sangat efektif dengan persentase sebesar 94.54%. untuk lebih jelasnya, disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 7.8 Gambaran Umum Implementasi Kurikulum 2013 dilihat dari Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa implementasi kurikulum 2013 pada sekolah model dilihat dari perencanaan pembelajaran tergolong sangat efektif (94,90%), demikian pula pelaksanaan pembelajaran tergolong sangat efektif berkisaran 94,98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan persiapan pembelajaran dengan menyusun RPP sesuai dengan implementasi kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran melibatkan empat aspek, yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti, penilaian, dan kegiatan penutup. Gambaran efektivitas pelaksanaan pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7.9 Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013 Semua Jenjang di Provinsi Bali Tahun 2017

Dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, penilaian dan kegiatan penutup tergolong dalam kategori sangat efektif. Hal ini ditunjukkan dengan persentase bahwa pada pelaksanaan kegiatan awal efektivitasnya sebesar berkisar 95,65%, kegiatan inti sebesar 96,69%, penilaian sebesar 95,81%, dan kegiatan penutup 93,57%. ini menunjukkan bahwa pengkondisian peserta didik di kegiatan awal pembelajaran dilaksanakan melalui pengkondisian suasana belajar yang menyenangkan, menyampaikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu penerapan pendekatan saintifik telah diimplemen-tasikan pada kegiatan inti pembelajaran melalui kegiatan yang mengajak siswa untuk mengamati, mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya, memberikan latihan terbimbing melalui tugas-tugas berkelompok, memotivasi siswa mengasosiasi, serta melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di akhir pembelajaran siswa diajak untuk melakukan refleksi dan evaluasi, serta tindak lanjut pembelajaran. Ada beberapa

catatan yang perlu mendapat perhatian seperti a) pengkondisian suasana belajar yang menyenangkan; b) mendorong peserta didik untuk bertanya, berpendapat dan penguatan hasil kegiatan kelompok siswa; dan c) melakukan refleksi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

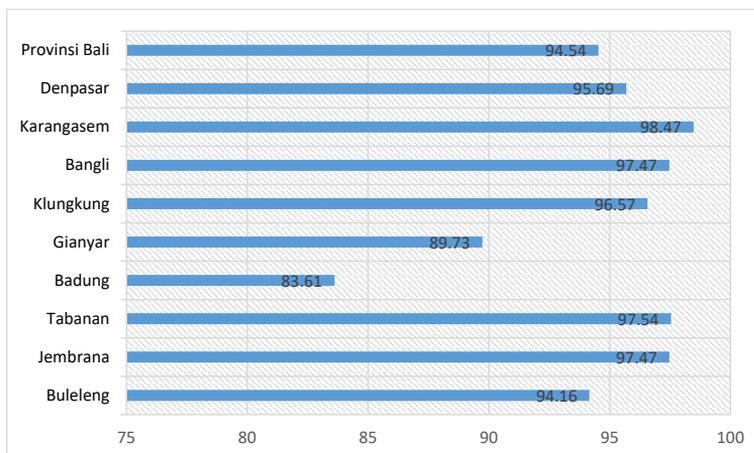
Efektivitas implementasi kurikulum 2013 dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 untuk Masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2017

No.	Kabupaten/Kota	Efektivitas Impelementasi Kurikulum 2013 (%)	Keterangan
1.	Buleleng	94,16	Sangat efektif
2.	Jembrana	97,47	Sangat efektif
3.	Tabanan	97,54	Sangat efektif
4.	Badung	83,61	Efektif
5.	Gianyar	89,73	Sangat efektif
6.	Klungkung	96,57	Sangat efektif
7.	Bangli	97,47	Sangat efektif
8.	Karangasem	98,47	Sangat efektif
9.	Denpasar	95.69	Sangat efektif
10.	Provinsi Bali	94.54	Sangat efektif

(Sumber: Analisis Instrumen)

Untuk lebih jelasnya gambaran efektivitas implementasi kurikulum 2013 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7.10 Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas implementasi kurikulum 2013 di provinsi Bali sekitar 94,54%. Bila dibandingkan antara efektivitas implementasi kurikulum 2013 masing-masing kabupaten dan provinsi tampak bahwa kabupaten badung efektivitasnya paling rendah yakni sekitar 83,61%, kemudian diikuti oleh kabupaten Gianyar sebesar 89,73%. Capaian efektivitas tertinggi adalah kabupaten karangasem sebesar 98,47%.

Secara rinci efektivitas implementasi kurikulum 2013 tahun 2017 seluruh sekolah model di Provinsi Bali disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.5 Efektivitas Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Model Secara Kesekuruhan

No	Instansi	Kab/Kota	Capaian (%)	Kategori
1	SDN 1 Bondalem	Buleleng	98.36	Sangat efektif
2	SDN 1 Dencarik	Buleleng	98.36	Sangat efektif
3	SDN 1 Sangsit	Buleleng	100.00	Sangat efektif
4	SDN 2 Penuktukan	Buleleng	95.08	Sangat efektif
5	SDN 3 Bubunan	Buleleng	98.36	Sangat efektif
6	SDN 3 Sambangan	Buleleng	100.00	Sangat efektif
7	SDN 4 Banyuasri	Buleleng	100.00	Sangat efektif
8	SDN 4 Kampung Baru	Buleleng	98.36	Sangat efektif
9	SDN 4 Tamblang	Buleleng	100.00	Sangat efektif
10	SDN 2 Patas	Buleleng	98.36	Sangat efektif
11	SMPN 1 Banjar	Buleleng	100.00	Sangat efektif
12	SMPN 1 Kubutambahan	Buleleng	96.72	Sangat efektif
13	SMPN 1 Sawan	Buleleng	100.00	Sangat efektif
14	SMPN 2 Singaraja	Buleleng	100.00	Sangat efektif
15	SMPN 4 Singaraja	Buleleng	100.00	Sangat efektif
16	SMAN Bali Mandara	Buleleng	91.80	Sangat efektif
17	SMAN 1 Gerokgak	Buleleng	83.61	Efektif
18	SMAN 1 Banjar	Buleleng	96.72	Sangat efektif
19	SMAN 3 Singaraja	Buleleng	93.44	Sangat efektif
20	SMK TI Bali Global	Buleleng	83.61	Sangat efektif
21	SMK Pariwisata Triatmajaya	Buleleng	72.13	Efektif
22	SMKN 2 Seririt	Buleleng	65.57	Cukup efektif
23	SMKN 1 Kubutambahan	Buleleng	95.08	Sangat efektif
24	SD Negeri 1 Dangin Tukadaya	Jembrana	100.00	Sangat efektif
25	SDN 1 Kaliakah	Jembrana	100.00	Sangat efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capaian (%)	Kategori
26	SDN 1 Pekutatan	Jembrana	100.00	Sangat efektif
27	SD N 2 Baluk	Jembrana	100.00	Sangat efektif
28	SDN 2 Tegalcangkring	Jembrana	98.36	Sangat efektif
29	SMPN 3 Mendoyo	Jembrana	98.36	Sangat efektif
30	SMPN 3 Melaya	Jembrana	100.00	Sangat efektif
31	SMPN 4 Negara	Jembrana	100.00	Sangat efektif
32	SMAN 2 Negara	Jembrana	100.00	Sangat efektif
33	SMAN 2 Mendoyo	Jembrana	88.52	Sangat efektif
34	SMKN 3 Negara	Jembrana	86.89	Sangat efektif
35	SDN 5 Kediri	Tabanan	98.36	Sangat efektif
36	SDN 1 Mekarsari	Tabanan	96.72	Sangat efektif
37	SD N 1 Mundeh	Tabanan	90.16	Sangat efektif
38	SDN 2 Bajera	Tabanan	98.36	Sangat efektif
39	SDN 2 Cau Belayu	Tabanan	98.36	Sangat efektif
40	SDN 7 Banjar Anyar	Tabanan	95.08	Sangat efektif
41	SDN 1 Pandak Gede	Tabanan	100.00	Sangat efektif
42	SD N 1 Biaung	Tabanan	100.00	Sangat efektif
43	SD 1 Kelating	Tabanan	100.00	Sangat efektif
44	SDN2 Sudimara	Tabanan	100.00	Sangat efektif
45	SDN1 Denbantas	Tabanan	100.00	Sangat efektif
46	SDN2 Jegu	Tabanan	96.72	Sangat efektif
47	SMPN 1 Penebel	Tabanan	98.36	Sangat efektif
48	SMPN 1 Baturiti	Tabanan	100.00	Sangat efektif
49	SMPN 2 Tabanan	Tabanan	100.00	Sangat efektif
50	SMPN 2 Selemadeg Timur	Tabanan	100.00	Sangat efektif
51	SMAN 1 Penebel	Tabanan	100.00	Sangat efektif
52	SMKN 3 Tabanan	Tabanan	83.61	Efektif
53	SD No 4 Jimbaran	Badung	100.00	Sangat efektif
54	SDN 2 Tuban	Badung	98.36	Sangat efektif
55	SDN 2 Tibubeneng	Badung	100.00	Sangat efektif
56	SD No. 3 Kerobokan	Badung	96.72	Sangat efektif
57	SD No. 1 Kuta	Badung	100.00	Sangat efektif
58	SD N 3 Mengwi	Badung	100.00	Sangat efektif
59	SD No. 3 Darmasaba	Badung	63.93	Cukup efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capaian (%)	Kategori
60	SD No.11 Jimbaran	Badung	100.00	Sangat efektif
61	SD No. 1 Blahkiuh	Badung	93.44	Sangat efektif
62	SDN 2 Kapal	Badung	100.00	Sangat efektif
63	SMPN 1 Mengwi	Badung	65.57	Cukup efektif
64	SMPN 2 Kuta	Badung	78.69	Efektif
65	SMP N 2 Mengwi	Badung	57.38	Cukup efektif
66	SMAN 1 Mengwi	Badung	100.00	Sangat efektif
67	SMAN 1 Kuta	Badung	68.85	Cukup efektif
68	SMAN 1 Kuta Selatan	Badung	96.72	Sangat efektif
69	SDN 1 Ubud	Gianyar	100.00	Sangat efektif
70	SDN 12 Melinggih kelod	Gianyar	100.00	Sangat efektif
71	SDN 3 Kedewatan	Gianyar	96.72	Sangat efektif
72	SDN 3 Buruan	Gianyar	100.00	Sangat efektif
73	SDN 4 Manukaya	Gianyar	73.77	Efektif
74	SDN 3 Tegallalang	Gianyar	96.72	Sangat efektif
75	SD N 1 Lebih	Gianyar	91.80	Sangat efektif
76	SDN 1 Pejeng	Gianyar	98.36	Sangat efektif
77	SMPN 2 Gianyar	Gianyar	91.80	Sangat efektif
78	SMP N 1 Ubud	Gianyar	96.72	Sangat efektif
79	SMPN 1 Blahbatuh	Gianyar	100.00	Sangat efektif
80	SMAN 1 Tegallalang	Gianyar	88.52	Sangat efektif
81	SMKN 1 Tegallalang	Gianyar	100.00	Sangat efektif
82	SMK PGRI 1 Gianyar	Gianyar	52.46	Tidak efektif
83	SMK Pariwisata Putra Bangsa	Gianyar	59.02	Cukup efektif
84	SDN 1 Takmung	Klungkung	98.36	Sangat efektif
85	SDN 2 Semarapura Tengah	Klungkung	91.80	Sangat efektif
86	SDN 1 Akah	Klungkung	100.00	Sangat efektif
87	SDN 3 Banjarangkan	Klungkung	98.36	Sangat efektif
88	SDN 3 Kusamba	Klungkung	100.00	Sangat efektif
89	SDN 1 Paksewali	Klungkung	77.05	Efektif
90	SDN 1 Batununggul	Klungkung	98.36	Sangat efektif
91	SMPN 1 Banjarangkan	Klungkung	100.00	Sangat efektif
92	SMPN 1 Nusa Penida	Klungkung	98.36	Sangat efektif
93	SMAN 1 Semarapura	Klungkung	100.00	Sangat efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capaian (%)	Kategori
94	SMKN 1 Nusa Penida	Klungkung	100.00	Sangat efektif
95	SD N 1 Sulahan	Bangli	90.16	Sangat efektif
96	SDN 1 Tamanbali	Bangli	100.00	Sangat efektif
97	SDN 2 Kubu	Bangli	100.00	Sangat efektif
98	SDN 3 Tembuku	Bangli	91.80	Sangat efektif
99	SD N Manikliyu	Bangli	100.00	Sangat efektif
100	SDN 1 Batur	Bangli	96.72	Sangat efektif
101	SMPN 1 Susut	Bangli	100.00	Sangat efektif
102	SMPN 3 Tembuku	Bangli	98.36	Sangat efektif
103	SMPN 3 Bangli	Bangli	96.72	Sangat efektif
104	SMAN 1 Susut	Bangli	98.36	Sangat efektif
105	SMKN 1 Tembuku	Bangli	100.00	Sangat efektif
106	SDN Bongaya	Karangasem	100.00	Sangat efektif
107	SDN 4 Padangkerta	Karangasem	100.00	Sangat efektif
108	SDN 5 Karangasem	Karangasem	100.00	Sangat efektif
109	SDN 1 Besakih	Karangasem	100.00	Sangat efektif
110	SDN 1 Ulakan	Karangasem	96.72	Sangat efektif
111	SD N 6 Karangasem	Karangasem	93.44	Sangat efektif
112	SDN 1 Sidemen	Karangasem	96.72	Sangat efektif
113	SDN 1 Pertima	Karangasem	95.08	Sangat efektif
114	SDN 4 Subagan	Karangasem	100.00	Sangat efektif
115	SDN 1 Tulamben	Karangasem	100.00	Sangat efektif
116	SMPN 1 Manggis	Karangasem	100.00	Sangat efektif
117	SMP N 1 Amlapura	Karangasem	100.00	Sangat efektif
118	SMPN 1 Abang	Karangasem	95.08	Sangat efektif
119	SMPN 2 Abang	Karangasem	100.00	Sangat efektif
120	SMAN 1 Bebandem	Karangasem	100.00	Sangat efektif
121	SMPN 1 Kubu	Karangasem	96.72	Sangat efektif
122	SD N 29 Dangin Puri	Denpasar	91.80	Sangat efektif
123	SDN 2 Sasetan	Denpasar	100.00	Sangat efektif
124	SDN 1 Sumerta	Denpasar	100.00	Sangat efektif
125	SDN 7 Kesiman	Denpasar	100.00	Sangat efektif
126	SDN 8 Dauh Puri	Denpasar	98.36	Sangat efektif
127	SDN 9 Sasetan	Denpasar	96.72	Sangat efektif

No	Instansi	Kab/Kota	Capaian (%)	Kategori
128	SDN.18 Pemecutan	Denpasar	100.00	Sangat efektif
129	SDN 17 Dauh Puri	Denpasar	100.00	Sangat efektif
130	SD Negeri 7 Dauh Puri	Denpasar	98.36	Sangat efektif
131	SD N 7 Pedungan	Denpasar	100.00	Sangat efektif
132	SMPN 10 Denpasar	Denpasar	98.36	Sangat efektif
133	SMPN 4 Denpasar	Denpasar	91.80	Sangat efektif
134	SMPN 3 Denpasar	Denpasar	100.00	Sangat efektif
135	SMPN 8 Denpasar	Denpasar	100.00	Sangat efektif
136	SMAN 5 Denpasar	Denpasar	86.89	Sangat efektif
137	SMAN 8 Denpasar	Denpasar	98.36	Sangat efektif
138	SMA 7 Denpasar	Denpasar	59.02	Cukup efektif
139	SMAN 2 Denpasar	Denpasar	98.36	Sangat efektif
140	SMK Pariwisata Harapan	Denpasar	100.00	Sangat efektif

Capaian Mutu Pendidikan Sekolah Model

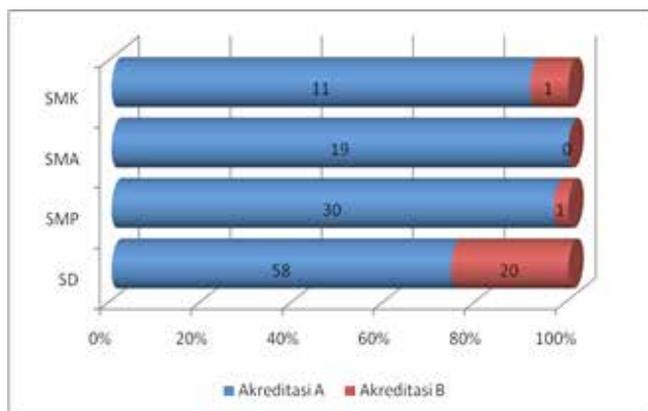
1. Akreditasi Sekolah/Madrasah

Akreditasi sekolah/ madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah/madrasah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah/madrasah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah/madrasah, tetapi sekolah/madrasah dievaluasi berdasarkan delapan standar nasional pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan yang diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah/madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Hasil akreditasi untuk sekolah model di Provinsi Bali disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 7.6 Hasil Akreditasi Sekolah Model

JENJANG	AKREDITASI	
	A	B
SD	58	20
SMP	30	1
SMA	19	0
SMK	11	1

Untuk lebih jelasnya tentang hasil akreditasi sekolah model untuk masing-masing jenjang disajikan seperti tabel berikut.



Grafik 7.11 Persentase Akreditasi Sekolah Model

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, 84,29% sekolah mencapai akreditasi A dan 15,71% sekolah mencapai akreditasi B. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sekolah yang sudah terakreditasi A atau dengan kategori sangat baik sebanyak 74,36%. dan yang sudah terakreditasi B atau kategori Baik sebanyak 25,64%. Gambaran yang rinci tentang capaian akreditasi sekolah model disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.7 Capaian Akreditasi Masing-masing Sekolah Model

No	Instansi	Kab/Kota	Akreditasi
1	SDN 1 Bondalem	Buleleng	A
2	SDN 1 Dencarik	Buleleng	B
3	SD N 1 Sangsit	Buleleng	A
4	SD Negeri 2 Penuktukan	Buleleng	B
5	SDN 3 Bubunan	Buleleng	A
6	SDN 3 Sambangan	Buleleng	A
7	SD N 4 Banyuasri	Buleleng	A

No	Instansi	Kab/Kota	Akreditasi
8	SDN 4 Kampung Baru	Buleleng	A
9	SD N 4 Tamblang	Buleleng	A
10	SD N 2 Patas	Buleleng	B
11	SMPN 1 Banjar	Buleleng	B
12	SMPN 1 Kubutambahan	Buleleng	A
13	SMPN 1 Sawan	Buleleng	A
14	SMPN 2 Singaraja	Buleleng	A
15	SMPN 4 Singaraja	Buleleng	A
16	SMAN Bali Mandara	Buleleng	A
17	SMAN 1 Gerokgak	Buleleng	A
18	SMAN 1 Banjar	Buleleng	A
19	SMAN 3 Singaraja	Buleleng	A
20	SMK TI Bali Global	Buleleng	B
21	SMK Pariwisata Triatmajaya	Buleleng	A
22	SMKN 2 Seririt	Buleleng	A
23	SMKN 1 Kubutambahan	Buleleng	A
24	SD Negeri 1 Dangin Tukadaya	Jembrana	B
25	SDN 1 Kaliakah	Jembrana	A
26	SDN 1 Pekutatan	Jembrana	B
27	SD N 2 Baluk	Jembrana	B
28	SDN 2 Tegalcangkring	Jembrana	A
29	SMPN 3 Mendoyo	Jembrana	A
30	SMPN 3 Melaya	Jembrana	A
31	SMPN 4 Negara	Jembrana	A
32	SMAN 2 NEGARA	Jembrana	A
33	SMA N 2 MENDOYO	Jembrana	A
34	SMKN 3 Negara	Jembrana	A
35	SDN 5 Kediri	Tabanan	A
36	SDN 1 Mekarsari	Tabanan	A
37	SD N 1 Mundeh	Tabanan	B
38	SDN 2 Bajera	Tabanan	A
39	SDN 2 Cau Belayu	Tabanan	A
40	SDN 7 Banjar Anyar	Tabanan	B
41	SDN 1 PANDAK GEDE	Tabanan	A

No	Instansi	Kab/Kota	Akreditasi
42	SDN I Biaung	Tabanan	B
43	SDN 1 Kelating	Tabanan	A
44	SDN 2 Sudimara	Tabanan	A
45	SDN1 Denbantas	Tabanan	A
46	SDN2 Jegu	Tabanan	A
47	SMPN 1 Penebel	Tabanan	A
48	SMPN 1 Baturiti	Tabanan	A
49	SMPN 2 Tabanan	Tabanan	A
50	SMPN 2 Selemadeg Timur	Tabanan	A
51	SMAN 1 Penebel	Tabanan	A
52	SMKN 3 Tabanan	Tabanan	A
53	SDN 4 Jimbaran	Badung	A
54	SDN 2 Tuban	Badung	A
55	SDN 2 Tibubeneng	Badung	A
56	SD No. 3 KEROBOKAN	Badung	A
57	SD No. 1 KUTA	Badung	A
58	SD Negeri 3 Mengwi	Badung	A
59	SD No 3 Darmasaba	Badung	A
60	SD No.11 Jimbaran	Badung	A
61	SD No. 1 Blahkiuh	Badung	A
62	SDN 2 Kapal	Badung	A
63	SMPN 1 Mengwi	Badung	A
64	SMPN 2 Kuta	Badung	A
65	SMP N 2 Mengwi	Badung	A
66	SMA N 1 MENGWI	Badung	A
67	SMAN 1 KUTA	Badung	A
68	SMAN 1 KUTA SELATAN	Badung	A
69	SDN 1 Ubud	Gianyar	A
70	SDN 1 Melinggih kelod	Gianyar	A
71	SDN 3 Kedewatan	Gianyar	B
72	SDN 3 Buruan	Gianyar	B
73	SDN 4 Manukaya	Gianyar	B
74	SDN 3 Tegallalang	Gianyar	A
75	SDN I Lebih	Gianyar	A
76	SDN 1 Pejeng	Gianyar	A
77	SMPN 2 Gianyar	Gianyar	A
78	SMP N 1 Ubud	Gianyar	A

No	Instansi	Kab/Kota	Akreditasi
79	SMPN 1 Blahbatuh	Gianyar	A
80	SMAN 1 Tegallalang	Gianyar	A
81	SMA N 1 Gianyar	Gianyar	A
82	SMKN 1 Tegallalang	Gianyar	A
83	SMK PGRI 1 Gianyar	Gianyar	A
84	SMK Pariwisata Putra Bangsa	Gianyar	A
85	SDN 1 Takmung	Klungkung	A
86	SDN 2 Semarapura Tengah	Klungkung	A
87	SDN 1 Akah	Klungkung	A
88	SDN 3 Banjarangkan	Klungkung	A
89	SDN 3 Kusamba	Klungkung	A
90	SDN 1 Paksewali	Klungkung	A
91	SDN 1 Batununggul	Klungkung	A
92	SMPN 1 Banjarangkan	Klungkung	A
93	SMPN 1 Nusa Penida	Klungkung	A
94	SMAN 1 Semarapura	Klungkung	A
95	SMKN 1 Nusa Penida	Klungkung	A
96	SD N 1 Sulahan	Bangli	A
97	SDN 1 Tamanbali	Bangli	A
98	SDN 2 Kubu	Bangli	A
99	SDN 3 Tembuku	Bangli	A
100	SDN Manikliyu	Bangli	A
101	SDN 1 Batur	Bangli	A
102	SMPN 1 Susut	Bangli	A
103	SMPN 3 Tembuku	Bangli	A
104	SMPN 3 Bangli	Bangli	A
105	SMA 1 Susut	Bangli	A
106	SMKN 1 Tembuku	Bangli	A
107	SDN Bongaya	Karangasem	B
108	SDN 4 Padangkerta	Karangasem	B
109	SDN 5 Karangasem	Karangasem	A
110	SDN 1 Besakih	Karangasem	B
111	SDN 1 Ulakan	Karangasem	A
112	SD N 6 Karangasem	Karangasem	A
113	SDN 1 Sidemen	Karangasem	B
114	SDN 1 Pertama	Karangasem	B
115	SDN 4 Subagan	Karangasem	B

No	Instansi	Kab/Kota	Akreditasi
116	SDN 1 Tulamben	Karangasem	B
117	SMPN 1 Manggis	Karangasem	A
118	SMP N 1 Amlapura	Karangasem	A
119	SMPN 1 Abang	Karangasem	A
120	SMAN 1 Bebandem	Karangasem	A
121	SMPN 1 Kubu	Karangasem	A
122	SDN 29 Dangin Puri	Denpasar	A
123	SDN 2 Sesetan	Denpasar	A
124	SDN 1 Sumerta	Denpasar	A
125	SDN 7 Kesiman	Denpasar	A
126	SDN 8 Dauh Puri	Denpasar	A
127	SDN 9 Sesetan	Denpasar	A
128	SDN. 18 Pemecutan	Denpasar	A
129	SDN 17 Dauh Puri	Denpasar	A
130	SD Negeri 7 Dauh Puri	Denpasar	A
131	SDN 7 Pedungan	Denpasar	B
132	SMPN 4 Denpasar	Denpasar	A
133	SMPN 10 Denpasar	Denpasar	A
134	SMP 3 Denpasar	Denpasar	A
135	SMPN 8 Denpasar	Denpasar	A
136	SMAN 5 Denpasar	Denpasar	A
137	SMA N 8 Denpasar	Denpasar	A
138	SMAN 2 Denpasar	Denpasar	A
139	SMAN 7 Denpasar	Denpasar	A
140	SMK Pariwisata Harapan	Denpasar	A

Hasil akreditasi pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi. Proses pencapaian hasil akreditasi melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

2. Rapor Mutu Sekolah Model

Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Bali untuk sekolah model Tahun 2017 melalui pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 7.8 Skor Capaian SNP Sekolah Model Tahun 2017

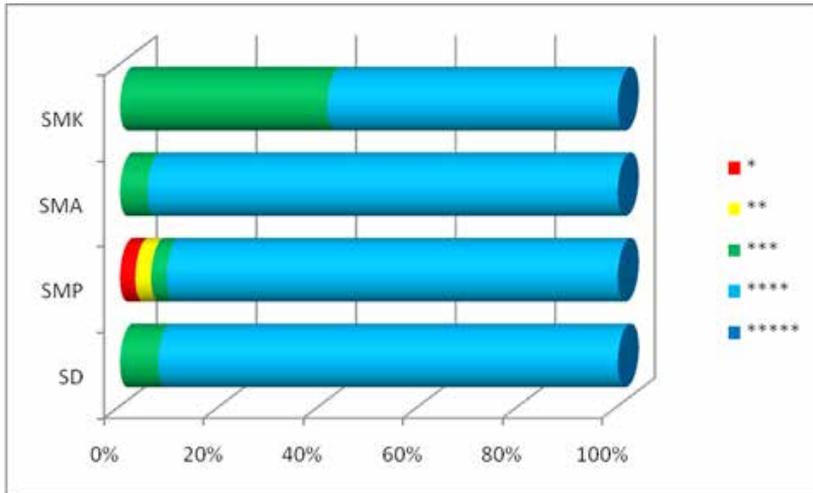
STANDAR	JENJANG			
	SD	SMP	SMA	SMK
SKL	6.51	6.37	6.81	6.30
ISI	5.86	5.59	5.31	5.16
PROSES	6.64	6.29	6.64	6.46
PENILAIAN	6.03	5.87	6.15	5.92
PTK	3.47	3.72	3.86	3.38
SARPRAS	3.10	2.97	3.12	2.86
PENGELOLAAN	5.99	5.74	6.24	5.73
PEMBIAYAAN	6.29	6.38	5.76	5.95
Capaian SNP	5.49	5.37	5.49	5.22

Dari tabel di atas, capaian SNP secara umum ada capaian menuju SNP 4. Secara rinci capaiannya yaitu: pada Standar Kompetensi Lulusan untuk Jenjang SMA capaian SNP telah mencapai SNP, namun pada jenjang SD, SMP, dan SMK ada pada capaian menuju SNP 4. Pada Standar Isi, Proses Penilaian, Pengelolaan, Dan Pembiayaan ada pada capaian menuju SNP 4. Capaian standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ada pada capaian menuju SNP 3 pada jenjang SMP dan SMK, dan ada pada capaian menuju SNP 2 pada jenjang SD dan SMK. Untuk standar proses capaian setisp jenjang ada pada capaian menuju SNP 2. Rasio masing-masing capaian SNP untuk setiap jenjang disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 7.9 Rekapitulasi Capaian SNP Sekolah Model Tahun 2017

CAPAIAN SNP	SD	SMP	SMA	SMK
*	0	1	0	0
**	0	1	0	0
***	6	1	1	5
****	72	28	17	7
*****	0	0	0	0

Dari tabel di atas, Capaian SNP sekolah model setiap jenjang sebesar 89,21% telah mencapai capaian mutu menuju SNP 4 (****), ada 9,35% sekolah model yang mencapai capaian mutu menuju SNP 3 (***).Namun demikian ada 0.72% sekolah model yang capaian SNP ada pada capaian mutunya menuju SNP 1 (*) dan 0,72% sekolah yang capaian mutunya menuju SNP 2 (**). Hasil analisis capaian mutu setiap jenjang disajikan seperti grafik berikut.



Grafik 7.12 Persentase Capaian Mutu Sekolah Model

Gambaran yang rinci tentang capaian mutu SNP sekolah model disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.10 Capaian Mutu SNP masing-masing Sekolah Model

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENI LAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGE LOLAAN	PEMBIA YAAN
1	SDN 1 Bondalem	5.24	6.30	5.26	6.61	5.88	3.46	2.51	5.42	6.43
2	SDN 1 Dencarik	5.44	6.05	5.88	6.35	5.55	3.55	3.39	5.99	6.72
3	SD N 1 Sangsit	5.59	6.96	6.21	6.86	6.04	3.7	3.08	6.41	5.45
4	SD Negeri 2 Penuktukan	5.34	6.3	5.85	6.55	5.55	2.47	3.28	5.95	6.76
5	SDN 3 Bubunan	5.69	7	6.39	6.99	6.5	3.07	2.98	6.38	6.19
6	SDN 3 Sambangan	5.73	6.86	6.08	6.83	6.21	3.69	2.77	6.4	6.98
7	SD N 4 Banyuasri	5.8	6.87	6.33	6.85	6.48	3.55	3.28	6.07	6.99
8	SDN 4 Kampung Baru	5.74	6.81	6.32	6.83	5.32	3.74	3.5	6.38	6.99
9	SD N 4 Tamblang	5.54	6.06	6.18	6.7	6.29	3.77	2.87	5.66	6.8
10	SD N 2 Patas	5.85	6.86	5.96	6.94	6.44	3.72	3.47	6.41	6.96
11	SMPN 1 Banjar	5.17	6.36	5.32	6.32	4.85	3.76	2.74	5.96	6.02
12	SMPN 1 Kubutambahan	5.43	6.38	6.02	6.34	6.16	3.84	2.75	6.14	5.81
13	SMPN 1 Sawan	1.6	0.42	0.98	0.73	0.12	3.65	0.84	1.05	4.99
14	SMPN 2 Singaraja	5.7	6.86	6.38	6.59	6.43	3.94	2.91	5.68	6.84

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENI LAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGE LOLAAN	PEMBIA YAAAN
15	SMPN 4 Singaraja	5.54	6.86	5.14	6.28	6.09	3.86	3.45	5.86	6.78
16	SMAN Bali Mandara	5.6	6.96	5.32	6.53	6.23	3.94	3.41	6.49	5.91
17	SMAN 1 Gerokgak	5.25	6.82	5.02	6.7	6.56	3.91	2.96	6.06	6.11
18	SMAN 1 Banjar	5.13	6.39	4.36	6.29	4.86	3.91	3.33	6.03	5.85
19	SMAN 3 Singaraja	4.95	6.74	3.79	5.9	5	3.9	2.96	5.37	5.97
20	SMK TI Bali Global	5.03	6.86	4.46	6.52	6	2	3.05	5.66	5.7
21	SMK Pariwisata Triatmajaya	5.31	6.57	5.14	6.63	6.66	3.17	2.63	5.79	5.91
22	SMKN 2 Seririt	5.93	7	6.74	7	6.99	3.77	3.1	6.63	6.22
23	SMKN 1 Kubutambahan	5.94	7	6.6	6.99	6.99	3.98	2.94	6.79	6.22
24	SD Negeri 1 Dangin Tukadaya	5.74	6.59	6.21	6.93	6.29	3.65	3.23	6.2	6.8
25	SDN 1 Kaliakah	5.27	6.22	5.29	6.47	5.63	3.69	2.99	5.27	6.6
26	SDN 1 Pekutatan	5.62	6.22	6.22	6.74	6.24	3.1	3.26	6.33	6.88
27	SD N 2 Baluk	5.18	6.02	5.92	6.46	6.22	3.47	2.79	6.16	4.41
28	SDN 2 Tegalcangkring	5.52	6.35	5.77	6.84	6.19	3.39	2.41	6.34	6.85
29	SMPN 3 Mendoyo	5.62	6.53	5.73	6.4	6.41	3.85	3.14	6.14	6.77
30	SMPN 3 Melaya	4.89	6.63	4.81	5.9	4.71	3.92	2.98	4.5	5.66
31	SMPN 4 Negara	5.6	6.53	4.98	6.86	6.42	3.84	2.92	6.28	6.95
32	SMAN 2 NEGARA	5.76	6.96	6.29	6.97	6.63	3.77	2.93	6.28	6.22
33	SMA N 2 MENDOYO	5.59	6.33	5.86	6.8	6.26	3.88	3.36	6.1	6.11
34	SMKN 3 Negara	4.9	5.25	4.1	6.67	5.82	3.83	2.02	5.85	5.69
35	SDN 5 Kediri	5.21	6.06	5.85	6.38	5.8	2.3	2.97	5.41	6.89
36	SDN 1 Mekarsari	5.41	6.13	5.87	6.69	6.24	3.48	2.73	6.03	6.08
37	SD N 1 Mundeh	5.46	6.4	5.9	6.82	6.44	2.44	3.18	6.38	6.15
38	SDN 2 Bajera	5.35	6.17	5.92	6.58	5.92	3.55	3	5.51	6.12
39	SDN 2 Cau Belayu	5.19	6.41	5.39	6.34	5.48	3.5	2.87	5.58	5.95
40	SDN 7 Banjar Anyar	5.58	6.95	6.14	6.77	6.13	3.75	3.34	6.5	5.04
41	SDN 1 PANDAK GEDE	5.18	5.98	5.62	6.63	6.18	2.41	2.71	6.15	5.8
42	SDN I Biaung	4.72	6.25	4.2	5.85	4.55	2.39	3.5	5.15	5.88
43	SDN 1 Kelating	5.27	5.66	5.28	6.37	6.08	3.55	3	6	6.21
44	SDN 2 Sudimara	5.62	6.21	6.14	6.79	6.39	3.66	2.88	6.18	6.74

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENILAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGELOLAAN	PEMBIA YAN
45	SDN1 Denbantas	5.34	6.28	5.49	6.3	6.2	3.69	2.78	5.93	6.06
46	SDN2 Jegu	5.89	6.92	6.5	6.99	6.5	3.57	3.44	6.17	6.99
47	SMPN 1 Penebel	5.64	6.51	5.48	6.81	6.49	3.79	2.87	6.18	6.99
48	SMPN 1 Baturiti	5.18	6.53	5.14	6.17	5.16	3.78	3.33	5.32	6.06
49	SMPN 2 Tabanan	5.48	6.8	5.87	6.68	6.08	3.2	3.41	5.69	6.11
50	SMPN 2 Selemadeg Timur	6.01	7	6.72	7	6.99	3.81	2.93	6.65	6.99
51	SMAN 1 Penebel	5.42	6.75	5.12	6.55	6.31	3.92	2.93	6.12	5.63
52	SMKN 3 Tabanan	4.92	6.49	4.67	6.05	4.71	3.38	2.85	5.24	5.97
53	SDN 4 Jimbaran	5.55	7	6.06	6.94	6.47	3.75	3	6.54	4.66
54	SDN 2 Tuban	5.44	6.71	6.2	6.68	6.14	3.75	3.34	6.28	4.43
55	SDN 2 Tibubeneng	5.83	6.83	6.58	6.98	6.43	3.75	3.55	6.41	6.14
56	SD No. 3 KEROBOKAN	5.69	6.25	6.55	6.88	6.34	3.78	3.23	6.3	6.19
57	SD No. 1 KUTA	6.1	7	6.73	6.97	6.99	3.86	3.59	6.69	6.99
58	SD Negeri 3 Mengwi	5.89	6.64	6.49	6.9	6.45	3.85	3.19	6.59	6.99
59	SD No 3 Darmasaba	5.73	6.71	6.2	6.79	6.37	3.14	3.6	6.17	6.9
60	SD No.11 Jimbaran	5.95	7	6.15	6.98	6.5	3.83	3.6	6.6	6.97
61	SD No. 1 Blahkiuh	5.89	7	6.71	7	6.99	3.66	2.97	6.58	6.22
62	SDN 2 Kapal	5.94	7	6.67	6.99	6.97	3.64	3.44	6.58	6.22
63	SMPN 1 Mengwi	5.55	6.91	5.76	6.69	5.55	3.19	2.87	6.46	6.99
64	SMPN 2 Kuta	5.62	6.53	6.18	6.3	6.32	3.84	3.49	6.18	6.09
65	SMP N 2 Mengwi	5.87	7	6.68	6.99	6.97	3.11	2.96	6.3	6.99
66	SMA N 1 MENGWI	5.59	6.85	5.33	6.76	6.33	3.97	2.93	6.37	6.18
67	SMAN 1 KUTA	5.79	7	6.47	6.98	6.99	3.17	2.82	6.65	6.22
68	SMAN 1 KUTA SELATAN	5.42	6.75	5.15	6.5	6.1	3.85	3.32	5.85	5.82
69	SDN 1 Ubud	5.38	6.71	5.03	6.29	5.21	3.73	3.45	5.81	6.77
70	SDN 1 Melinggih kelod	5.2	5.88	5.48	6.44	5.41	3.73	3.05	5.62	6.01
71	SDN 3 Kedewatan	5.09	6.07	5.39	6.9	5.87	3.59	2.93	5.7	4.26
72	SDN 3 Buruan	5.42	6.13	5.63	6.48	5.66	3.67	2.83	6.25	6.74
73	SDN 4 Manukaya	4.99	6.41	4.75	5.82	5.51	3.71	3.33	3.84	6.52
74	SDN 3 Tegallalang	5.48	6.24	6.13	6.64	5.86	3.67	2.77	5.82	6.74
75	SDN I Lebih	5.48	6.5	6.04	6.59	6.33	3.64	3.52	5.58	5.63

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENILAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGELOLAAN	PEMBIA YAAAN
76	SDN 1 Pejeng	5.39	6.37	5.54	6.13	5.78	3.67	2.87	5.94	6.81
77	SMPN 2 Gianyar	5.48	6.81	5.46	6.34	5.99	3.75	2.76	6	6.71
78	SMP N 1 Ubud	5.79	6.84	5.95	6.86	6.46	3.98	3.3	6.11	6.85
79	SMPN 1 Blahbatuh	5.61	6.32	5.63	6.83	6.45	3.34	3.1	6.28	6.93
80	SMAN 1 Tegallalang	5.69	6.97	5.53	6.98	6.41	3.96	2.87	6.67	6.16
81	SMA N 1 Gianyar	5.87	7	6.52	6.98	6.99	3.88	2.89	6.45	6.22
82	SMKN 1 Tegallalang	5.52	6.23	5.88	6.74	6.04	3.85	3.33	6.03	6.07
83	SMK PGRI 1 Gianyar	5.31	6.38	5.78	6.72	6.78	2.63	2.59	5.39	6.17
84	SMK Pariwisata Putra Bangsa	3.78	4.04	3.53	4.67	4.44	2.95	1.64	3.71	5.28
85	SDN 1 Takmung	5.69	6.8	6.48	6.75	6.41	3.71	2.96	6.19	6.17
86	SDN 2 Semarapura Tengah	5.81	7	6.36	6.99	6.5	3.79	3.17	6.44	6.21
87	SDN 1 Akah	5.78	6.99	6.14	6.98	6.47	3.65	3.33	6.48	6.18
88	SDN 3 Banjarangkan	5.05	6.53	4.57	6.15	4.82	3.67	3	5.05	6.58
89	SDN 3 Kusamba	5.18	6.37	6.1	6.31	4.36	3.68	2.93	4.7	6.99
90	SDN 1 Paksewali	5.81	7	6.43	6.96	6.4	3.74	3.27	6.44	6.21
91	SDN 1 Batununggul	5.56	6.28	6.19	6.62	6	3.78	2.78	5.97	6.87
92	SMPN 1 Banjarangkan	5.42	6.64	5.78	6.5	5.87	3.81	2.93	6.02	5.81
93	SMPN 1 Nusa Penida	5.41	6.19	5.37	6.41	6.41	3.89	2.73	6.25	6.05
94	SMAN 1 Semarapura	5.74	0.89	5.53	6.92	6.41	3.93	3.41	6.61	6.22
95	SMKN 1 Nusa Penida	5.05	6.25	4.44	6.32	5.23	3.88	3.39	5.02	5.89
96	SD N 1 Sulahan	5.51	6.6	5.32	6.49	6.07	3.63	3.33	5.97	6.65
97	SDN 1 Tamanbali	5.72	6.98	5.59	6.8	6.22	3.56	3.43	6.21	6.96
98	SDN 2 Kubu	5.23	6.19	5.52	6.43	5.43	3.65	3.35	5.61	5.68
99	SDN 3 Tembuku	5.99	7	6.72	7	6.99	3.6	2.94	6.67	6.99
100	SDN Manikliyu	5.11	6.18	5.3	6.56	5.58	3.5	2.83	5.64	5.31
101	SDN 1 Batur	5.84	6.99	6.32	6.99	6.44	3.66	2.97	6.53	6.8
102	SMPN 1 Susut	5.28	6.78	5.24	6.35	5.35	3.7	2.98	5.68	6.18
103	SMPN 3 Tembuku	5.46	6.69	5.73	6.42	5.74	3.8	3.23	5.27	6.84
104	SMPN 3 Bangli	5.66	6.9	5.89	6.99	6.31	3.83	2.98	6.54	5.85

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENI LAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGE LOLAAN	PEMBIA YAAAN
105	SMA 1 Susut	5.52	6.87	5.4	6.63	5.93	3.9	3.2	6.22	6.02
106	SMKN 1 Tembuku	5.39	6.66	4.94	6.53	5.5	3.78	3.34	6.24	6.14
107	SDN Bongaya	4.7	4.52	4.1	6.64	6.17	2.35	1.92	5.03	6.86
108	SDN 4 Padangkerta	5.68	6.59	6.25	6.57	6.05	3.7	3.29	6.09	6.89
109	SDN 5 Karangasem	5.3	6.6	5.46	6.5	6.18	2.3	3.36	5.92	6.03
110	SDN 1 Besakih	5.07	5.86	4.99	6.06	5.28	3.36	2.52	5.79	6.72
111	SDN 1 Ulakan	5.43	6.92	6.13	6.55	6.06	3.8	2.68	5.41	5.93
112	SD N 6 Karangasem	5.68	6.97	6.27	6.99	6.92	2.48	2.93	6.63	6.22
113	SDN 1 Sidemen	5.25	6.63	5.93	6.71	5.67	1.9	3.31	5.84	6.04
114	SDN 1 Pertama	5.33	6.08	5.6	6.34	6.39	3.71	2.74	5.71	6.02
115	SDN 4 Subagan	5.88	7	6.77	6.99	6.99	2.39	3.3	6.61	6.99
116	SDN 1 Tulamben	5.92	7	6.34	6.99	6.49	3.78	3.22	6.59	6.99
117	SMPN 1 Manggis	5.28	6.69	5.61	6.22	5.71	3.82	3.02	5.23	5.93
118	SMP N 1 Amlapura	5.54	6.72	5.91	6.59	6.08	3.74	3.06	5.35	6.89
119	SMPN 1 Abang	5.9	7	6.19	6.99	6.99	3.78	3.44	6.57	6.22
120	SMPN 2 Abang	6.05	7	6.69	6.99	6.91	3.87	3.17	6.79	6.99
121	SMAN 1 Bebandem	5.45	6.71	5.1	6.52	5.4	3.9	3.4	6.37	6.16
122	SMPN 1 Kubu	5.7	6.56	5.93	6.7	5.89	3.94	3.22	6.42	6.96
123	SDN 29 Dangin Puri	5.58	6.42	5.97	6.68	6.27	3.7	3	5.79	6.82
124	SDN 2 Sasetan	5.01	6.42	4.81	5.83	4.87	3.62	3.38	5.21	5.91
125	SDN 1 Sumerta	5.44	6.71	5.43	6.35	5.46	3.83	2.95	5.9	6.86
126	SDN 7 KESIMAN	5.84	6.97	6.36	6.93	6.49	3.73	3.55	6.48	6.2
127	SDN 8 Dauh Puri	5.47	6.38	5.66	6.57	6.23	3.82	3.4	6.37	5.32
128	SDN 9 Sasetan	5.17	6.35	5.38	6.12	4.84	3.72	3.38	5.63	5.92
129	SDN. 18 Pemecutan	5.58	6.3	5.96	6.82	6.23	3.73	2.76	5.98	6.86
130	SDN 17 Dauh Puri	5.09	6.78	5.51	6.7	5.36	3.15	2.92	5.87	4.41
131	SD Negeri 7 Dauh Puri	5.45	6.49	5.65	6.43	6.22	3.84	3.15	5.87	5.96
132	SDN 7 Pedungan	4.95	6.41	5.31	6.07	4.77	3.66	3.23	5.18	4.95
133	SMPN 4 Denpasar	2.71	2.61	2.84	2.57	2.64	3.11	1.48	2.42	4.02
134	SMPN 10 Denpasar	5.99	6.87	6.76	6.97	6.99	3.48	3.54	6.3	6.99

NO	INSTANSI	Capaian SNP	SKL	ISI	PRO SES	PENI LAIAN	PTK	SAR PRAS	PENGE LOLAAN	PEMBIA YAAN
135	SMP 3 Denpasar	5.66	6.42	6.11	6.57	6.28	3.9	3.54	5.79	6.66
136	SMPN 8 Denpasar	5.85	7	6.53	6.97	6.99	3.83	2.96	6.3	6.22
137	SMAN 5 Denpasar	5.21	6.88	4.84	6.55	5.73	3.99	2.83	6.39	4.51
138	SMA N 8 Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	SMAN 2 Denpasar	5.27	6.69	4.83	6.51	6.4	3.96	3.34	6.18	4.28
140	SMAN 7 Denpasar	5.25	6.93	5.2	6.52	6.08	3.82	3.25	6.07	4.13
141	SMK Pariwisata Harapan	5.54	6.88	5.68	6.67	5.88	3.28	3.45	6.39	6.12





BAB VIII
P E N U T U P

Rangkuman

Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi. Dengan karakter yang kuat, tanggung jawab yang tinggi beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru yang disebut di atas dapat dipenuhi atau diatasi. Oleh karena itu, selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah penting atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik. Berbagai intervensi terus dilakukan untuk meningkatkan layanan sekolah kepada siswa dan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana juga terus dilakukan. Pembangunan ruang kelas baru, renovasi sekolah, revitalisasi sekolah, pengadaan sarana laboratorium, pengadaan sarana TIK dan sarana lain untuk meningkatkan layanan pembelajaran telah dan akan banyak dilakukan. Tak kalah pentingnya, berbagai peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan berbagai aturan lain tentang pengelolaan sekolah dan peningkatan proses pembelajaran juga telah banyak dihasilkan.

Namun semua intervensi yang pernah dilakukan tersebut lebih banyak berpengaruh terhadap peningkatan akses terhadap layanan pendidikan masih perlu intervensi dalam hal untuk pendidikan. Menyangkut mutu memang ada peningkatan, namun belum terlalu menggembirakan. Berdasarkan survei di beberapa sekolah dan diskusi sekolah umumnya memang melaksanakan penjaminan mutu belum utuh. Dalam beberapa diskusi kepala sekolah dan guru juga tidak tahu standar mutu yang harus mereka capai sebagai tujuan. Peningkatan mutu dianggap bukan tugas sekolah namun menjadi tanggung jawab pemerintah.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang membantu mempercepat pencapaian mutu pendidikan yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai

sumberdaya untuk mencapai SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tahun 2018 ini pengembangan sekolah model telah memasuki tahun ketiga. Beberapa perubahan (metamorfosis) yang telah terjadi dalam pengembangan sekolah model, antara lain praktek baik implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI), praktek baik implementasi kurikulum 2013, akreditasi dan capaian mutu pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan melalui rapor mutu 2017. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap praktek implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) diperoleh bahwa pelaksanaan program SPMI bagi sekolah model di Provinsi Bali tergolong efektif dengan persentase 72,45%, artinya program SPMI baru mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebesar 72,45%. Praktek Implementasi kurikulum 2013 bagi sekolah model di Provinsi Bali tergolong sangat efektif dengan persentase 94,54%. Dilihat dari akreditasi, terlihat bahwa 84,29% sekolah mencapai akreditasi A dan 15,71% sekolah mencapai akreditasi B. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sekolah yang sudah terakreditasi A sebanyak 74,36%. dan yang sudah terakreditasi B sebanyak 25,64%. Capaian mutu pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK bagi sekolah model di Provinsi Bali tergolong menuju SNP-4 sebesar 89,21%. Bila dirinci capaian mutu pendidikan sekolah model tampak bahwa 89,21% capaian mutu menuju SNP 4 (****), ada 9,35% sekolah model capaian mutunya menuju SNP 3 (***). Namun demikian ada 0,72% sekolah model yang capaian SNP ada pada capaian mutunya menuju SNP 1 (*) dan 0,72% sekolah yang capaian mutunya menuju SNP 2 (**).

Rekomendasi

Program SPMI perlu dilakukan dengan persiapan lebih baik termasuk pembiayaan; hasil temuan menunjukkan bahwa dalam implementasi SPMI khususnya pengimbasan tidak bisa dihindari tentang pembiayaan. Frekuensi

pendampingan perlu dilakukan lebih banyak lagi baik oleh pengawas maupun LPMP Bali. Bentuk-bentuk pendampingan yang bersifat motivator perlu diterapkan. Implementasi SPMI perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan agenda kerja sekolah; artinya peta mutu sudah ada pada bulan Desember, sehingga dalam penyusunan RKS data mutu dapat digunakan. Perlu dukungan pemerintah daerah dalam implementasi SPMI; artinya pemerintah perlu memonitor pelaksanaan SPMI di sekolah dengan jalan membentuk tim penjaminan mutu daerah. Selain itu, sekolah perlu menetapkan kebijakan nasional menjadi kebijakan sekolah terkait dengan SNP, komite, pendidikan karakter, literasi, komite sekolah, dan penerimaan siswa baru dalam rangka memberikan arah pada pelaksanaan program sekolah.

Ada beberapa penekanan implementasi kurikulum 2013, yakni penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, keterampilan abad ke-21 dan pengembangan keterampilan tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills/HOTs*). Dalam implementasinya kesemua penekanan tersebut tertintegrasikan dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) hadir untuk menyiapkan Generasi Emas 2045 yang memiliki kecakapan abad ke-21. Dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia, berdampingan dengan intelektualitas, PPK berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Dengan demikian, tidak ada parsialitas dalam penyebutan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), seperti RPP PPK, RPP literasi, RPP Hots, dan lain-lain, yang ada adalah RPP Kurikulum 2013. PPK berbasis kelas lebih pada aksi guru di kelas dalam membentuk karakter, bukan pada penulisan nilai dalam kolom RPP. Kurikulum 2013 mendukung desain besar Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. PPK memperkuat Kurikulum 2013. Namun Kurikulum 2013 tidak sama dengan PPK, tetapi PPK lebih luas cakupannya.

Capaian standar mutu pendidikan sekolah model, tampak kurang sinkron dengan nilai akreditasi sekolah. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara Badan Akreditasi sekolah dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali untuk dalam mengawal mutu pendidikan di Bali. Selain itu, rapor mutu tahun 2017 belum seluruhnya mampu memberikan gambaran secara utuh tentang capaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan, terutama standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana. Untuk itu perlu adanya perbaikan sistem maupun sosialisasi yang lebih intensif berkaitan dengan pengisian instrumen PMP.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, Doni Koesoema. 2015. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Anonim. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland: European Association for Quality Assurance in Higher Education.
- Arends, R. I. 1997. *Classroom Instruction and Management*. New York: McGraw Hill Companies, Inc.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Aspin, D.C., Judith and V. Wilkinson. 1994. *Quality Schooling*. London: Cassell Villiers House.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- BAN PT. 2009. *Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2009 (10 Buku)*: Jakarta: BAN PT.
- BAN-PT. 2005. *Pedoman Evaluasi Diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Barnadib, Imam. 1978. *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Baumgart, Niel. 2007. *Teacher Quality and Professional Standards*. Paper disajikan dalam Lokakarya Regional Asia Pasifik Timur, Pengembangan dan Pengelolaan Guru untuk Dampak Pendidikan yang Lebih Baik. Beijing-China: 9-13 Juli.
- Becker, Gary S. 1975. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. 2d ed. New York: Columbia University Press for NBER.

- BPMA UI. 2007. *Manajemen Mutu Akademik*. Depok: BPMA UI. Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius. Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Tahun 2009.
- Djalal, Fasli, dkk. 2009. *Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta: Ministry of National Education.
- Effendy, Muhadjir. 2016. "Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam Pelatihan Pengembangan Kapasitas untuk Penguatan Pendidikan Karakter" di Hotel Santika, Jakarta, 27 September 2016. (transkrip rekaman Kemdikbud).
- Ennis, H. 1996. *Critical Thinking*. New Jersey: Prentice Hall.
- Faisal, Sanapiah dan Nur Yasik (penyadur). tanpa tahun. *Sosiologi Pendidikan: Bahan Terpilih bagi Para Mahasiswa, Pengelola, dan Pemikir Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gerth, H. dan C. Wright Mills. 1884. *From Max Weber*. New York: Oxford University Press.
- Ghafur, A.H.S. 2010. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisa Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghafur, A.H.S., dkk. 2011. *Arsitektur Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional: Sebuah Konstruksi Untuk Model Aplikasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. (Belum dipublikasikan).
- Gilbert, C. (ed). 1990. *Local Management of Schools*. London: Pogan Page.
- Goodlad, J.T. 1984. *A Place Called Schools: Prospects for the Future*. New York: McGraw Hill.
- Gravemeijer, K. 1994. *Developing Realistic Mathematics Education*. Utrech: Freudenthal Institute.
- Hanafiah, Nanang dan Cucu Suhana. 2009. *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hassan, Fuad. 2004. "Pendidikan Adalah Pembudayaan", dalam Tonny D.
- Hayat, Bahrul. 2006. *Prinsip-Prinsip dan Strategi Penilaian di Kelas*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Balibang Depdiknas.
- Hendarman, dkk. 2017. *Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdikbud
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008.
- Johnson, Elaine B. 2009. *Pembelajaran Kontekstual*, terjemahan Ardi Elsa Bandung: Alfabeta.

- Joyce, Bruce dan Marsha Weil. 2000. *Models of Teaching*. Boston: Allyn and Bacon.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2009, *Panduan Teknis dan Instrumen EDS dan MSPD*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Bagian I Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Komarudin. 2000. *Kamus Istilah karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lindsay, Stace. 2006. "Budaya, Model Mental, dan Kemakmuran Nasional", dalam Lawrence E Harrison dan Samuel P. Huntington (ed.), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajua Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Macionis, John J. 1990. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Marpaung, Y. 2001 "Prospek RME untuk Pembelajaran Matematika di Indonesia." *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional Realistic Mathematics Education (RME), di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, 24 Pebruari 2001.
- Marpaung, Y.2003. "Perubahan Paradigma Pembelajaran Matematika di Sekolah." *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Matematika di Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 27-28 Maret 2003.
- Mastuhu. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera Hati.
- Naomi, Intan (ed.), *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- National Center for Education Statistics. 2001. "Educational Achievement and Black-White Inequality," NCES 2001-061. U.S. Department of Education.
- Oxenham, John. 1989. *Education and Values in Developing Nations*. New York: Paragon House.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Polanyi, Karl. 1989. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Polla, Gerardus. 2001. "Upaya Menciptakan Pengajaran Matematika yang Menyenangkan." Volume 4, dalam *Buletin Pelangi Pendidikan*, 2001: 46-50.

Pusat Statistik Pendidikan, Tabel 1: Gambaran Umum Keadaan Pendidikan Tahun 2009/2010.

Sagala, Saiful. 2010 *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Sallis, Edward. 2010. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod.

Slavin, Robert E. 1995 *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.

Streefland, L. 1991. *Realistic Mathematics Education in Primary School*. Utrecht: Freudenthal Institute.

Tadjudin, M.K. 2002. *Sejarah Akreditasi Perguruan Tinggi* (makalah tidak diterbitkan).

Tahmir, S. 2007. "Model Pembelajaran Resik Sebagai Strategi Mengubah Paradigma Pembelajaran Matematika di SMP yang *Teachers Oriented* Menjadi *Student Oriented*." *Laporan Penelitian*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.

Tim Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Treffers, A. 1991. *Rational Analysis of Realistic Mathematics Education*. Utrecht: Utrecht University.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UNDP. 2011. *Report on Human Development Report*.

UNESCO. 2015. *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?*. Paris: UNESCO Publishing.

Widiastono (ed.), *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

World Bank. 2008. *Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency and Quality Improvement*, Jakarta: World Bank.

World Bank. 2004. *Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization*. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2007. *Investing in Indonesia: Allocation, Equity and Efficiency of Public Expenditures*, Jakarta: World Bank.